

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2015 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2015.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2015 merupakan penjabaran dari pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015 pada Tahun ke-5 (lima) serta berpedoman pada RPJPD Kota Denpasar dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2015 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



# Daftar Isi

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	v
<b>Daftar Gambar</b>	ix
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-5
C. Hubungan Antar Dokumen	I-6
D. Maksud dan Tujuan	I-7
E. Sistematika RKPD	I-7
<b>Bab II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-7
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-7
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-11
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya	II-12
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-13
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-13
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-69
2.1.4. Aspek daya Saing	II-72
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-72
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-73
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-74
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-75
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-76
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-76
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-76
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-81



<b>Bab III</b>	<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015	III-2
3.1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	III-4
3.1.1.2.	Inflasi	III-6
3.1.1.3.	Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN)	III-7
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015	III-10
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-12
3.2.1.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-12
3.2.1.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-15
3.2.1.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16
<b>Bab IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1	Visi	IV-1
4.1.2	Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2010-2015	IV-3
4.1.3	Tujuan	IV-3
4.1.4	Sasaran	IV-4
4.1.5	Tema Pembangunan	IV-6
4.2	Prioritas Pembangunan	IV-6
<b>Bab V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b>	
5.1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	V-19
5.2.	Pendidikan	V-22
5.3	Kesehatan	V-25
5.4	Penanggulangan Kemiskinan	V-26
5.5	Infrastruktur	V-30
5.6	Kebudayaan	V-34
5.7	Kreatifitas dan Inovasi	V-35
5.8	Ketahanan Pangan	V-36
5.9	Perekonomian	V-38
5.10	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	V-41
5.11	Kesejahteraan rakyat	V-43
5.12	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	V-47
5.13	Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban	V-49



- LAMPIRAN I      EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN  
KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN  
DAN REALISASI RPJMD**
- LAMPIRAN II     REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN  
KEGIATAN DAERAH TAHUN 2013 KOTA  
DENPASAR**



# DAFTAR TABEL

No.		Halaman
2.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar	II - 4
2.2	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar	II - 8
2.3	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s,d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Denpasar	II - 8
2.4	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar	II - 9
2.5	PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2009 -2013	II - 9
2.6	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s.d Tahun 2014 Kota Denpasar	II - 10
2.7	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar	II - 11
2.8	Angka Melek Huruf dari tahun 2009-2012 Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 12
2.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2013 Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Kota Denpasar	II - 14
2.10	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 15
2.11	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 15
2.12	Perkemangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010-2013	II - 16
2.13	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010-2013	II - 16
2.14	Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar	II - 18
2.15	Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2013	II - 19
2.16	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010-2013	II - 19
2.17	Jumlah Posyandu dan Balita menurut kecamatan Tahun 2013	II - 20
2.18	Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama tahun 2013	II - 20



2.19	Angka Kematian Bayi	II - 22
2.20	Angka kematian Ibu Maternal	II - 23
2.21	Angka kematian Ibu	II - 24
2.22	Demam Berdarah dangue	II - 26
2.23	Gizi Buruk	II - 27
2.24	Umur Harapan Hidup	II - 28
2.25	BOR dan jumlah Kunjungan Pasien	II - 29
2.26	Pelanggan, produksi air minum dan penggunaanya	II - 33
2.27	Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013	II - 34
2.28	Panjang Jaringan Jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2013	II - 34
2.29	Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014	II - 35
2.30	Rasio jaringan irigasi tahun 2009 s/d 2013 kota Denpasar	II - 35
2.31	Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar	II - 38
2.32	Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar	II - 39
2.33	Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013	II - 43
2.34	Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2009 s/d 2013	II - 44
2.35	Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2013	II - 44
2.36	Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa Tahun 2008-2013	II - 45
2.37	Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2013	II - 45
2.38	Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2009 s/d 2013	II - 49
2.39	Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatantahun 2013	II - 50
2.40	Distribusi Penduduk tahun 2013	II - 53



2.41	Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2009 s.d. 2013	II - 57
2.42	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2009 s.d. 2013	II - 58
2.43	Rincian keragaan koperasi dari tahun 2009-2013	II - 60
2.44	Perkembangan UMKM dari tahun 2010 – 2013	II - 61
2.45	Jumlah Anggota Perpustakaan	II – 67
2.46	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2010 s/d 2013	II - 67
2.47	Judul Buku dan Koleksi Buku	II - 68
2.48	Angka Konsumsi RT perkapita Menurut Kecamatan Kota Denpasar	II - 72
2.49	Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar	II - 72
2.50	Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s/d 2012 Kota Denpasar	II - 73
2.51	Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013 Kota Denpasar	II – 73
2.52	Angka Kriminalitas Kota Denpasar	II - 74
2.53	Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar	II - 75
2.54	Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2012 Kota Denpasar	II - 76
2.55	Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Tahun 2014	II - 82
3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar	III - 3
3.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas dasar Konstan dan Atas dasar Harga Berlaku Kota Denpasar	III - 5
3.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2010-2014 (dalam persen)	III - 6
3.4	Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2009 s/d 2012	III - 9
3.5	Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Periode Tahun 2010 s/d 2013	III - 9
3.6	Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2010 s/d 2013	III- 9
3.7	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2010 s/d 2013	III- 9



3.8	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016	III- 12
3.9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d 2016	III- 15
3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d 2016	III- 16
4.1	Sinergitas keterkaitan prioritas pembangunan	IV - 8
4.2	Prioritas Pembangunan 2011 s/d 2015	IV - 8
4.3	Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015	IV - 10
5.1	Prioritas Pembangunan Kota Denpasar 2015	V – 1
5.2	Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015	V - 2



## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
2.1	Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar	II - 3
2.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Kota Denpasar	II - 8
2.3	Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014	II - 11
2.4	Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar	II - 18
2.5	Sarasan Kesehatan Tahun 2013	II - 20
2.6	Angka Kematian Bayi (Akb)	II - 22
2.7	Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH)	II - 23
2.8	Angka Kematian Ibu (AKI)	II - 24
2.9	Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS di Kota Denpasar 2008 s/d 2012	II - 25
2.10	Demam berdarah dangue	II - 26
2.11	Gizi Buruk	II - 27
2.12	BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien	II - 29
2.13	Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya	II - 33
2.14	Panjang Jalan Kota Denpasar Keadaan Tahun 2009 s/d 2013	II - 34
2.15	Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2012	II - 35
2.16	Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar Tahun 2009-2013	II - 44
2.17	Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2009 s/d 2013	II - 44
2.18	TPS dan Daya Tampung Sampah	II - 50
2.19	Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar	II - 58
2.20	Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar	II - 58
2.21	Perkembangan UMKM	II - 61
2.22	Porsentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013	II - 74
4.1	Tema RKPD 2010 - 2015	IV - 6



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun dokumen RPJPD Kota Denpasar 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD 2010-2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012.

Penyusunan RPJMD 2010-2015 mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kota Denpasar Tahun 2015 ini merupakan tahun ke lima pelaksanaan RPJMD 2010-2015.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2010-2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2010-2015 yaitu: “ *Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan* ”

Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan RKPD berdasarkan Misi pembangunan sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Denpasar 2010-2015 adalah:

1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali.
2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*good governance*) melalui Penegakan Supremasi Hukum (*law enforcement*)



4. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (*welfare society*)
5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar khususnya dalam kerangka mewujudkan Visi, Misi dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2010-2015, maka RKPD Kota Denpasar Tahun 2015 merupakan wujud implementasi (penjabaran) tahun kelima (tahun terakhir) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015. Posisi RKPD 2015 sangat strategis dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD 2010-2015.

Penyusunan RKPD Kota Denpasar tahun 2015 ini, telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari a) Proses Politik, yaitu Penjabaran Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai konsekuensi politik dari pemilihan langsung Kepala Daerah, b) Proses Teknokratik, Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana, c) Proses Partisipatif, Perencanaan yang melibatkan masyarakat (*stake holders*), antara lain melalui pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), d) Proses *Bottom-Up* dan *Top-Dow*, Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2015 merupakan *Out put* dari proses perencanaan di atas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengalokasian sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari kepemimpinan baru Kepala Daerah Kota Denpasar periode Tahun 2010-2015, dengan memperhatikan pencapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kota.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan, terutama sasaran-sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas pemerintah/pemerintah daerah sebagai pelaku utama (sedapat mungkin dalam rentang kendali pemerintah daerah untuk mewujudkannya).



4. Realistis untuk dilaksanakan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercerminkan dalam bentuk (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, maka perlu direformulasikan kembali isu strategis dan prioritas pembangunan yang baru. Upaya reformulasi ini sangat penting, selain untuk tetap sesuai dengan arah pembangunan pemerintah, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 tetap mengarah kepada pencapaian visi, misi dan target yang ditetapkan dalam Renstra Pemerintah Daerah. Selain dari itu untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian prioritas pembangunan, telah dirumuskan pula tujuan bersama (common goals) yang menjadi komitmen semua pihak serta pelibatan secara aktif lintas SKPD dan para pelaku pembangunan dalam pelaksanaannya.

Proses perumusan RKPD Kota Denpasar Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:





## B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2015 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang 2008 Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun



2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 6);  
tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 6

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota tanggal 27 Desember 2013 Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 48);

### C. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kota yang berpedoman pada RPJMD Kota tersebut juga mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Denpasar tahun 2015 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015, mengacu pada RPJM Provinsi Tahun 2008–2013, serta RPJM Nasional Tahun 2010–2015.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (lima tahunan) dan dokumen rencana Strategis (lima tahunan) maupun Rencana Kerja (tahunan) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hubungan antar dokumen tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- **RPJPD dengan RPJM** : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang memuat visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, yang hakekatnya merupakan penjabaran visi misi kepala daerah selama periode 5 tahun.
- **RPJMD dengan RKPD** : RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja tahunannya.
- **Rencana Strategis SKPD (renstra-SKPD)** merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD
- **RKPD dengan Renja-SKPD** : RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (renja) SKPD.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2015, kita selalu berpedoman kepada aturan terbaru yang ada. Ditingkat tertinggi yang dipakai pedoman adalah RPJPD yang diteruskan ditingkat yang lebih rendah adalah RPJPD Provinsi Bali. Setelah itu barulah bisa dibuat dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang dijadikan acuan untuk membuat dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan acuan pokok dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Selanjutnya RKPD Kabupaten/ Kota ini dijadikan pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota.



## **D. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.

### **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

## **E. Sistematika RKPD**

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA DENPASAR TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Berisi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya.



## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

## **BAB VI PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Denpasar Tahun 2015 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Denpasar, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

## **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen  
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen yang lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti : RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kab/Kota
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

### **BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

- 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing
- 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
- 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
  - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
  - 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

### **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
  - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun...(Tahun Lalu) dan Perkiraan Tahun...(tahun berjalan)
  - 3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun....(rencana)dan tahun....(satu tahun setelah tahun rencana)
- 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
  - 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan



- 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  - 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
  - 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

**BAB. IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

**BAB. VI PENUTUP**





## BAB II

# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Perubahan adalah fenomena alamiah di jagat raya, karena itu tidak ditemukan adanya masyarakat dan kebudayaan yang statis. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembangunan, inovasi, dan kreatifitas. Semua ini berjalan berhimpitan dengan ruang dan waktu (*space and time*). Pembangunan merupakan perubahan sistemik yang didasarkan dan dikendalikan oleh kebutuhan manusia yang harus mempertimbangkan aspek masa lalu (*atitha*), masa datang (*anagatha*), dan masa kini (*warthamana*). Spektrum pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan (*sustainable*).

Sejak kurang lebih lima tahun belakangan ini, pembangunan Kota Denpasar digerakkan oleh visi: *“Terciptanya Kota Denpasar yang kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan”*. Visi ini secara filosofis dilandasi oleh filsafat Tri Hita Karana, yaitu harmoni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Kerangka filosofis ini diadopsi dan diadaptasi menjadi kerangka dasar keseluruhan aspek pembangunan Kota Denpasar.

Keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini, searah dengan visi yang telah dicanangkan dengan mengetengahkan landasan filosofis tersebut. Dengan demikian, secara langsung proses pembangunan Kota Denpasar telah mampu menyentuh keseluruhan elemen dasar dari aspek religi, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Dengan kata lain Pemerintah Kota Denpasar telah meletakkan dasar yang kuat bagi terciptanya Denpasar menjadi Kota Berwawasan Budaya.

Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar dalam periode 2005-2010 telah merealisasikan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan pembangunan tersebut telah mendorong pembangunan industri kreatif sehingga Kota Denpasar mengarah menjadi Kota Kreatif. Secara konkret pelaksanaan pembangunan, baik dalam level mikro maupun makro bertumbuh secara kreatif. Baik pada level mikro (*banjar* termasuk *sekaa-sekaa* yang ada di dalamnya) maupun pada level makro (SKPD) telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas.

Dengan landasan di atas Kota Denpasar telah melakukan pendalaman terhadap eksistensi sebuah kebudayaan bahwa sesungguhnya dasar-dasar kebudayaan harus dipahami dengan baik. Dalam pandangan ini kebudayaan dijadikan sentral ide kemudian, karena stimulus dan motivasi berproses melalui reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi akan memberikan sebuah pemahaman baru tentang suatu hal. Melalui proses inilahantisipasi pengaruh perubahan oleh arus modernisasi dan globalisasi akan memperkuat tradisi yang sudah berkembang di masyarakat.

Beranjak dari kenyataan arah perkembangan masyarakat Kota Denpasar yang telah bertumbuh menjadi masyarakat kreatif karena digerakkan oleh visi *“Terciptanya Kota Denpasar yang kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan”*, karena itu tidaklah berlebihan bila pada periode 2010—2015 Kota Denpasar dicanangkan menjadi Kota Kreatif. Untuk



menguatkan fondasi Denpasar sebagai Kota Kreatif pada tahun 2010-2015, dibutuhkan aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggul secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan (*sustainable*). Penguatan fondasi ini selaras dengan **Purradhipa Bhara Bhawana**, yakni kewajiban pemerintah meningkatkan kemakmuran rakyat. Untuk itu Pemerintah Kota Denpasar memerlukan berbagai hal yang bersifat mendasar, antara lain sebagai berikut:

- (1) Konsep utuh dan operasional tentang Kota Kreatif, Industri Kreatif, dan Kebudayaan Unggul yang cocok dengan kondisi kontekstual masyarakat Kota Denpasar sebagai komunitas urban, berjatidiri kebudayaan Bali, dan bersifat multikultural.
- (2) Inventori data dasar (*database*) tentang keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan.
- (3) Kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan unggul dalam habitat urban. Pada satu sisi kehidupan urban yang modern dan mengglobal di tengah-tengah isu komodifikasi, hegemoni, dan marginalisasi. Pada sisi lain semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Dalam berbagai pembaharuan bentuk, fungsi, dan makna, serta beragam peluang dan tantangan kontekstual. Untuk itu diperlukan kajian akademis guna merumuskan konsep-konsep kunci unsur-unsur budaya unggulan dalam rangka mewujudkan kota kreatif.

Dengan demikian paradigma Kota Denpasar Kreatif hendaklah bercirikan dan mengandung muatan berikut.

1. Membangun identitas lokal.
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi yang signifikan.
3. Menciptakan iklim bisnis yang positif.
4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan.
5. Mendorong inovasi dan kreatifitas yang menjadi unggulan kompetitif.
6. Memberikan implikasi yang positif pada masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik formal maupun informal.

Keseluruhan paradigma pembangunan di atas dijadikan dasar menggerakkan individu dan komunitas-komunitas kreatif yang esensinya membangun keseimbangan antara jiwa dan raga, batiniah dan lahiriah, spritual dan material. Oleh karena itu dinamika dan dialektika kehidupan masyarakat secara berangsur-angsur secara kreatif menuju perubahan dalam keseimbangan. Dengan demikian ketiga pilar pembangunan, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat menjadi penyangga utama untuk mewujudkan Denpasar Kreatif.

### **2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

#### **A. Luas dan Batas Wilayah Administratif**

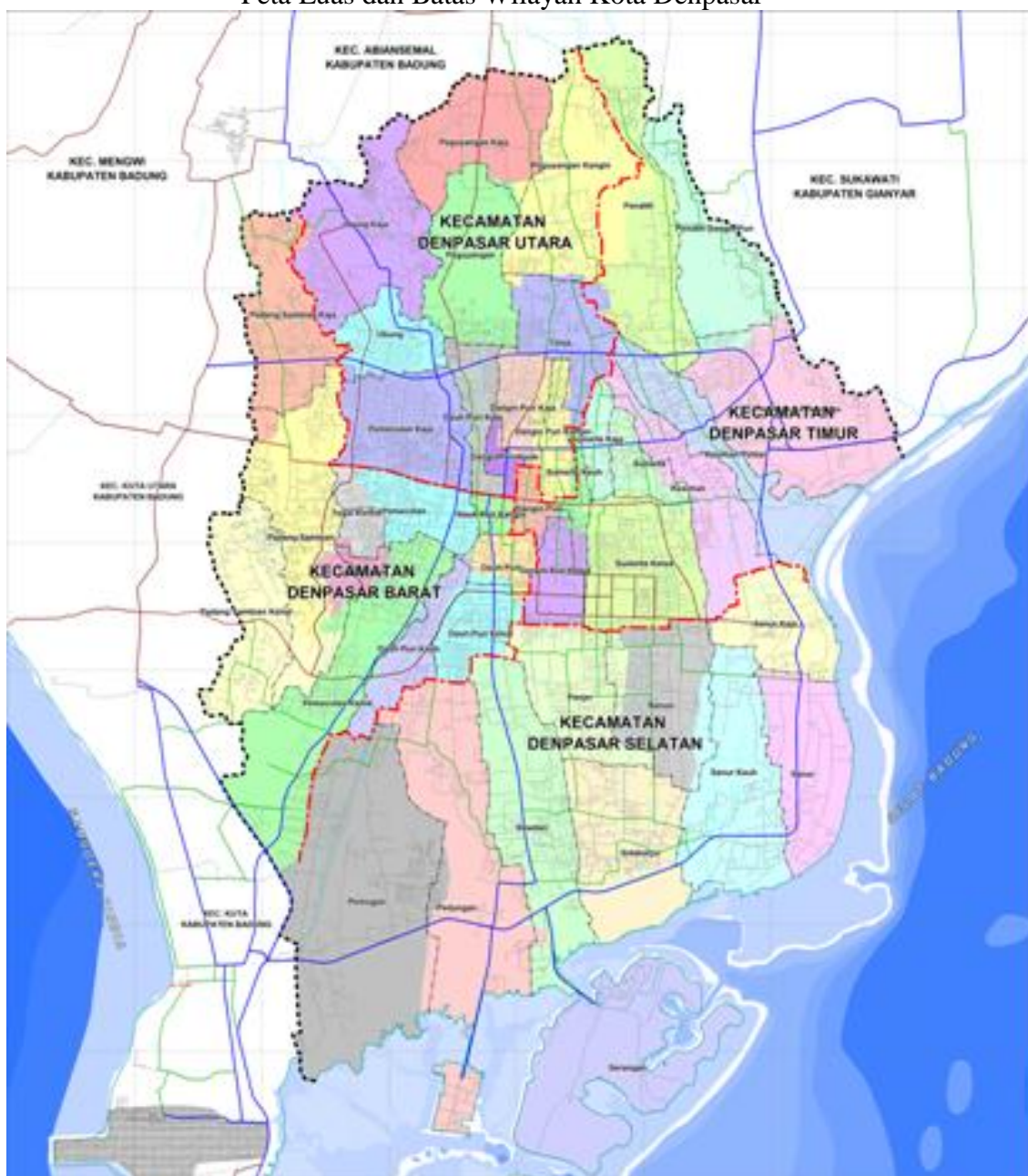
Kota Denpasar memiliki wilayah daratan seluas 12.778 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
- b. Sebelah Timur: : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Bena
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan.



Gambar 2.1  
Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar



Tabel 2.1  
Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LUAS (HA)	% Ls WIL.
I	DENPASAR UTARA	1 Kelurahan Dangin Puri Kaja	142,00	1,11
		2 Desa Dangin Puri Kangin	75,00	0,59
		3 Kelurahan Tonja	230,00	1,80
		4 Desa Dangin Puri Kauh	72,00	0,56
		5 Desa Pemecutan Kaja	385,00	3,01
		6 Desa Ubung	103,00	0,81
		7 Desa Ubung Kaja	400,00	3,13
		8 Desa Dauh Puri Kaja	109,00	0,85
		9 Kelurahan Peguyangan	644,00	5,04
		10 Desa Peguyangan Kaja	536,00	4,19
		11 Desa Peguyangan Kangin	416,00	3,26
			<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.112,00</b>
II	DENPASAR BARAT	1 Desa Padang Sambian Klod	412,00	3,22
		2 Desa Pemecutan Klod	450,00	3,52
		3 Desa Dauh Puri Kauh	190,00	1,49
		4 Desa Dauh Puri Klod	188,00	1,47
		5 Kelurahan Dauh Puri	60,00	0,47
		6 Desa Dauh Puri Kangin	59,00	0,46
		7 Kelurahan Pemecutan	186,00	1,46
		8 Desa Tegat Harum	50,00	0,39
		9 Desa Tegat Kertha	35,00	0,27
		10 Kelurahan Padang Sambian	374,00	2,93
		11 Desa Padang Sambian Kaja	409,00	3,20
			<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.413,00</b>
III	DENPASAR TIMUR	1 Desa Dangin Puri Klod	142,00	1,11
		2 Desa Sumerta Klod	271,00	2,12
		3 Kelurahan Kesiman	266,00	2,08
		4 Desa Kesiman Petilan	290,00	2,27
		5 Desa Kesiman Kertalangu	405,00	3,17
		6 Kelurahan Sumerta	52,00	0,41
		7 Desa Sumerta Kaja	73,00	0,57
		8 Desa Sumerta Kauh	89,00	0,70
		9 Kelurahan Dangin Puri	65,00	0,51
		10 Kelurahan Penatih	281,00	2,20
		11 Desa Penatih Dangin Puri	320,00	2,50
			<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.254,00</b>
IV	DENPASAR SELATAN	1 Desa Pemogan	971,00	7,60
		2 Kelurahan Pedungan	749,00	5,86
		3 Kelurahan Sesetan	739,00	5,78
		4 Kelurahan Serangan	481,00	3,76
		5 Desa Sidakarya	389,00	3,04
		6 Kelurahan Panjer	359,00	2,81
		7 Kelurahan Renon	254,00	1,99
		8 Desa Sanur Kauh	386,00	3,02
		9 Kelurahan Sanur	402,00	3,15
		10 Desa Sanur Kaja	269,00	2,11
			<b>Sub Jumlah</b>	<b>4.999,00</b>
	<b>KOTA DENPASAR</b>	<b>TOTAL JUMLAH (HA)</b>	<b>12.778,00</b>	<b>100,00</b>

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Denpasar terletak pada koordinat 08°35'31" - 08°44'49" LS dan 115°10'23" - 115°16'27" BT,



### C. Kondisi Topografi

Wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0 – 25 m dpl, dan sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %.

### D. Kondisi Geologi

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuartar, kuartar bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuanya adalah sebagai berikut :

Batuan vulkanik kuartar menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan.

Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar.

Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

### E. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kota Denpasar, terdapat potensi sumber daya air dapat disebutkan lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut.

### F. Kondisi Klimatologi

Kota Denpasar beriklim tropis dengan dua musim (hujan dan kemarau). Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson (1959), Kota Denpasar termasuk iklim tipe A, sedangkan menurut Peta Agroklimat Bali skala 1 : 250.000 (Oldeman, Irsal, dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk ke dalam Zone Agroklimat D3. Jumlah curah hujan tahun 2013 1819 mm, dengan bulan basah (curah hujan > 100 mm/bulan) selama 7 bulan (Januari – April, Oktober – Desember), dan sisanya bulan kering.

Temperatur rata-rata pada tahun 2013 berkisar antara 25,4°C – 28,7°C, dengan rata-rata 27,0°C. Temperatur rata-rata terendah (Agustus 25,4°C) dan tertinggi Februari (28,7°C). Lama penyinaran matahari pada tahun 2013 berkisar antara 27% pada bulan Januari sampai 97% pada bulan Mei, dengan rata-rata 74,0 %.

Kelembaban udara rata-rata tahun 2013 berkisar antara 74% dan 83 % dengan rata-rata 76,8 %. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Mei dan September, sedangkan kelembaban tertinggi terjadi pada



## G. Penggunaan Lahan

### Analisis Kesesuaian Lahan

Berdasarkan satuan Land Unit dan kriteria penentuan kesesuaian lahan sebagai berikut :

(1) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Basah

Lahan potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) di wilayah Kota Denpasar mempunyai tingkat kesesuaian S1 (sangat sesuai ) Kelas S1 ini didukung oleh kondisi fisik seperti keadaan topografi yang datar dengan kemiringan 0-2% dan sifat-sifat tanah baik fisik maupun kimia cocok untuk tanaman padi sawah.

(2) Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Lahan Kering (Tanaman Semusim)

Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering (tanaman semusim) di wilayah Kota Denpasar masuk dalam kategori S1, S2. Lahan dengan kemiringan 0-2 % dan tekstur tanah sedang yang mencakup sebagian besar wilayah kota mempunyai tingkat kesesuaian S2 untuk tanaman musiman dengan faktor pembatas seperti drainase tekstur tanah (r) temperatur udara (t) dan atau kelembaban udara (w). Oleh karena itu tingkat kesesuaiannya tergolong S2r, S2tr dan S2wr .

(3) Kesesuaian Lahan bagi Tanaman Tahunan /Perkebunan

Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan di wilayah kota termasuk dalam kelas kesesuaian S1,S2, S3 dan N. Lahan dengan kesesuaian S1 terdapat pada bagian timur Kecamatan Denpasar Timur dengan lahan kemiringan 2-8 % dan pada bagian kecil Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sekitar Sanur dan Pulau Serangan. Untuk tingkat kesesuaian S2 meliputi di sebagian besar wilayah kota terutama pada kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-2 % dan tekstur tanah yang agak kasar.

Berdasarkan analisa kesesuaian lahan untuk masing-masing tanaman tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah sangat dominan atau 80,9 % dari luas wilayah.
- Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar atau  $\pm 7,0$  % dari luas wilayah perencanaan.
- Lahan sesuai untuk tanaman tahunan dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar khususnya di sekitar Penatih, Sanur dan Kelurahan Serangan, atau 8,5 % dari luas wilayah perencanaan.
- Lahan yang perlu perlindungan dari peruntukan yang bersifat produktif adalah kawasan pohon bakau di bagian selatan Kota Denpasar, seluas  $\pm 450$  ha, atau 3,6 % dari luas wilayah

Berpedoman pada potensi kesesuaian lahan ini kondisi objektif di lapangan, dengan demikian, lokasi pemanfaatan lahan Kota Denpasar, secara global, dapat dikelompokkan menjadi : kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Untuk kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan secara rinci menjadi budidaya non pertanian dan budidaya dominan pertanian, masing-masing mempunyai luas areal 8.985 ha dan 3.837 ha. Sedangkan kawasan yang dikategorikan sebagai lahan non budidaya terdiri dari kawasan hutan bakau, sempadan sungai dan sempadan perbatasan wilayah dengan jumlah luas  $\pm 675$  ha.



## **2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**

#### **A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Secara khusus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pembangunan manusia merupakan perluasan kebebasan dan kapabilitas orang untuk memiliki pilihan-pilihan hidup yang bernilai. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan cerminan dari kinerja pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur berupa indikator komposit IPM, yang merupakan indeks gabungan dari indeks kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah) dan indeks ekonomi (tingkat daya beli penduduk). Secara umum perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 IPM Kota Denpasar 78,80 atau lebih tinggi dari capaian tahun 2011 sebesar 78,31 menempatkan Denpasar sebagai yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali.

#### **B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja makro perekonomian daerah yang mampu menggambarkan pendapatan per kapita, struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. PDRB merupakan suatu pendekatan yang baik untuk pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi/usaha dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu (PDRB menurut lapangan usaha) atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan akhir (PDRB menurut komponen penggunaan). Tujuan dari pembangunan ekonomi pada dasarnya berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pada pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata serta memacu pertumbuhan sektor penggerak utama.

Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku (current price) dan harga dasar/konstan (constant price). PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah dari barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar). Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki daerah tersebut.

Sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada industri pariwisata yang menyebabkan kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier) disusul sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi (sektor sekunder). Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 38,13% terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 kontribusi sektor ini diperkirakan mencapai 38,20%. Kondisi yang berlawanan terjadi di sektor pertanian, dimana kontribusi ini selama kurun waktu 2012 hingga 2013 terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian sebesar 6,64% namun pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian diperkirakan menurun menjadi 6,35%.

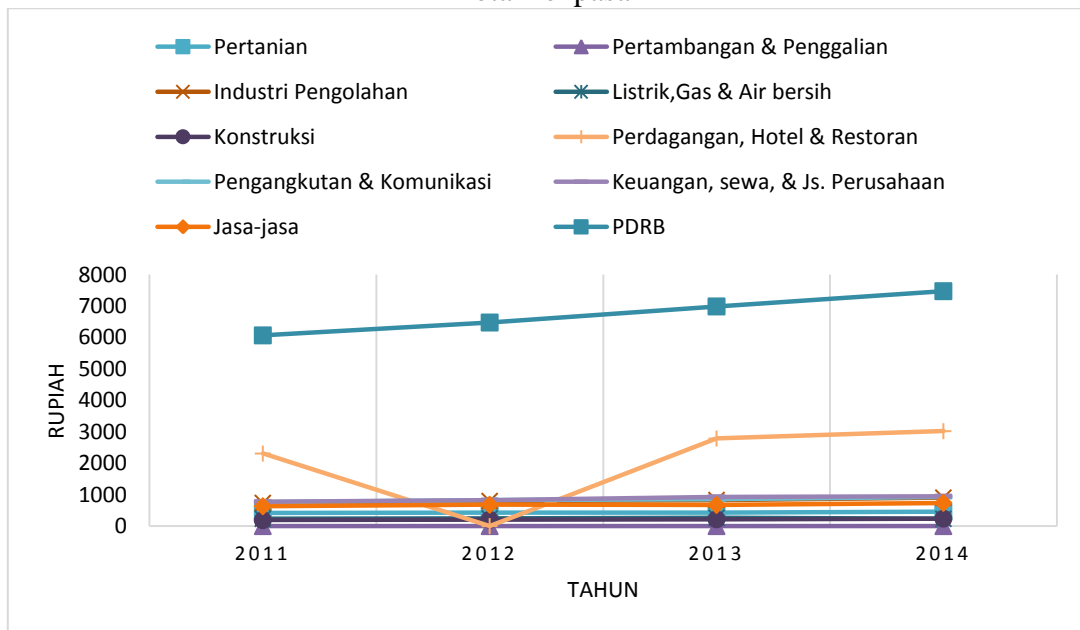


Tabel 2.2  
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014  
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014  
 Kota Denpasar

NO	Sektor	REALISASI						PREDIKSI	
		2011		2012		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	421,20	6,94	429,87	6,64	432,92	6,19	459,30	6,159
2	Pertambangan & Penggalian	0,26	0	0,27	0	0,25	0,00	0,13	0,00
3	Industri Pengolahan	736,81	12,14	796,84	12,30	829,44	11,87	904,63	12,10
4	Listrik, Gas & Air bersih	234,42	3,86	243,55	3,76	264,25	3,78	232,21	3,11
5	Konstruksi	189,73	3,13	203,51	3,14	216,55	3,10	238,41	3,19
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.309,00	38,05	2.469,32	38,13	2.786,63	39,87	3.019,78	40,41
7	Pengangkutan & Komunikasi	766,40	12,63	826,60	12,76	855,63	12,24	928,97	12,43
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	777,73	12,82	826,61	12,76	930,71	12,69	952,05	12,74
9	Jasa-jasa	632,61	10,43	679,95	10,50	672,23	9,62	738,25	9,88
	PDRB	6.068,16	100	6.476,52	100	6.988,71	100	7.473,73	100

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.2  
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014  
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014  
 Kota Denpasar



Tabel 2.3  
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014  
 Atas Dasar Harga Berlaku  
 Kota Denpasar

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	822,21	6,08	862,20	5,60	919,80	5,23	1.267,95	6,74
2	Pertambangan & Penggalian	0,66	0	0,73	0	0,80	0	0,70	0,00
3	Industri Pengolahan	1.702,75	12,59	2.047,93	13,31	2.475,26	14,08	2.025	10,76
4	Listrik, Gas, & Air bersih	583,27	4,31	650,90	4,23	727,47	4,14	781,96	4,16



NO	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
5	Konstruksi	555,15	4,10	658,98	4,28	784,13	4,46	707,75	3,76
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	4.642,16	34,32	5.166,32	33,58	5.763,99	32,79	7.430,41	39,49
7	Pengangkutan & Komunikasi angkutan & Komunikasi	1.785,67	13,20	2.032,95	13,21	2.320,04	13,20	2.256,68	11,00
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	1.996,09	14,76	2.307,61	15,00	2.671,66	15,20	2609,54	13,87
9	Jasa-jasa	1.436,19	10,62	1.657,69	10,77	1.916,38	10,90	1.736,34	9,23
	PDRB	13.524,15	100	15.385,31	100	17.579,53	100	18.816,56	100

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

**Tabel 2.4**  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Denpasar

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	6,08	6,94	5,60	6,64	5,23	6,35	6,74	6,15
2	Pertambangan & Pengalihan	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	12,59	12,14	13,31	12,30	14,08	12,49	10,76	12,10
4	Listrik, Gas & Air bersih	4,31	3,86	4,23	3,76	4,14	3,66	4,16	3,11
5	Konstruksi	4,10	3,13	4,28	3,14	4,46	3,16	3,76	3,19
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	34,32	38,05	33,58	38,13	32,79	38,20	39,49	40,41
7	Pengangkutan & Komunikasi	13,20	12,63	13,21	12,76	13,20	12,89	11,00	12,43
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	14,76	12,82	15,00	12,76	15,20	12,69	13,87	12,74
9	Jasa-jasa	10,62	10,43	10,77	10,50	10,90	10,56	9,23	9,88
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

### C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengkonsumsi semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan.

**Tabel 2.5**  
PDRB per kapita Kota Denpasar Tahun 2009 – 2013

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Perkapita (Rp/juta)	Pertumbuhan (%)	Perkapita (Rp/juta)	Pertumbuhan (%)
2009	10.755.112,28	14,36	5.358.246,42	6,53
2010	12.497.412,51	16,20	5.710.412,32	6,57



2011	13.856.496,18	10,87	6.097.167,27	6,77
2012	15.557.924,87	12,28	6.535.171,36	6,18
2013**	17.777.752,59	14,27	6.988.712,25	6,94

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

\*\*Angka sangat sementara

#### D. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Tabel 2.6  
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)  
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s.d Tahun 2014  
Kota Denpasar

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	-14,70	- 2,6 2	- 7,8 2	- 4,3 8	- 6,6 3	- 4,3 4	- 3,1 7	- 2,3 4
2	Pertambangan& Penggalian	11,17	- 2,4 0	- 2,7 7	- 2,7 0	- 4,0 9	0,44	0,9 0	0,8 3
3	Industri Pengolahan	1,52	- 2,1 0	5,72	1,33	5,78	1,50	6,01	2,97
4	Listrik,Gas&Air bersih	12,63	0,89	- 1,9 0	- 2,6 6	- 2,1 9	- 2,7 9	3,42	3,07
5	Konstruksi	30,47	- 0,6 2	4,34	0,50	4,14	0,42	0,08	0,02
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	-8,91	0,98	- 2,1 7	0,20	- 2,3 6	0,20	2,76	1,86
7	Pengangkutan & Komunikasi	4,12	- 0,4 0	0,08	1,05	- 0,1 2	1,03	1,17	1,04
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	15,69	0,46	1,62	0,4 2	1,33	0,5 7	2,05	2,00
9	Jasa-jasa	2,41	0,54	1,46	0,71	1,18	0,58	1,11	0,40
	PDRB	54,39	- 5,2 8	- 1,4 5	- 6,3 6	- 2,9 7	- 3,5 4	2,01	0,75



#### E. Laju Inflasi Harga

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

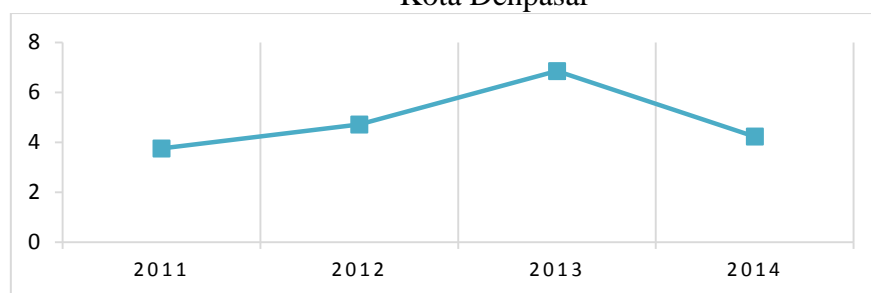
Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau.

Tabel 2.7  
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014  
Kota Denpasar

Uraian	2011	2012	2013	2014
Inflasi	3,75	4,71	6,85	4,23

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar 2.3  
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s/d 2014  
Kota Denpasar



Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2010 di Kota Denpasar relatif cukup tinggi dan berada di atas kisaran ideal tingkat inflasi yaitu 5% sampai 7%. Kenaikan ini sebagian besar disumbang oleh komoditas bahan makanan dan pangan. Dilihat dari inflasi tahun 2011 Denpasar mempunyai inflasi sebesar 3,75% jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya 8,10% dan juga sedikit lebih rendah dari angka inflasi nasional yang mencapai 3,79%. Capaian inflasi Kota Denpasar ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

#### 2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Salah satu indikator kinerja penting dalam urusan pendidikan adalah angka melek huruf dan lama sekolah. Angka melek huruf yaitu besaran nilai yang membandingkan nilai antara banyaknya penduduk disuatu wilayah yang berusia di



atas 15 tahun, yang mampu membaca huruf latin dengan banyaknya penduduk disuatu wilayah yang berusia di atas 15 tahun. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa besar kemampuan kinerja bidang pendidikan dalam upaya mencerdaskan masyarakat di wilayahnya dalam hal penguasaan dan kemampuan membaca huruf latin. Indikator pendidikan melalui tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) dapat menggambarkan tingkat keberhasilan dan perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya.

Tabel 2.8  
Angka Melek Huruf dari tahun 2009-2012 Menurut Kecamatan  
Kota Denpasar

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis				Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas				Angka melek huruf			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	Kecamatan Denpasar Utara	143,675	148,638	153097	157985	148,058	152,967	157556	158100	97,040	97,170	99,90	99,92
2	Kecamatan Denpasar Selatan	175,012	181,057	186488	191815	180,350	186,330	191919	196800	97,040	97,170	99,90	99,94
3	Kecamatan Denpasar Barat	176,291	182,521	187596	192895	181,668	187,837	193472	193100	97,040	97,170	99,80	99,70
4	Kecamatan Denpasar Timur	115,315	119,299	122877	126215	118,833	122,773	126546	127100	97,040	97,170	99,75	99,73
	Jumlah	610293	631515	650485	668910	628,909	649,907	669403	675100	97,040	97,170	99,83	99,82

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

### 2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA

Seni budaya adalah sebuah keahlian dalam mewujudkan ide atau gagasan yang memiliki nilai estetika. Di dalam proses tersebut, terdapat kemampuan serta imajinasi pandangan tentang benda, suasana atau karya yang bisa memunculkan rasa indah. Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui pesta kesenian tingkat Kota maupun Privinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata.

Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Denpasar sebagai tujuan utama diantaranya city tour, pengembangan obyek alternatif, variasi acara-acara pagelaran yang bisa menarik minat wisatawan dan meningkatkan kualitas objek wisata yang sudah ada. Sampai tahun ini di Kota Denpasar sudah terdapat 30 grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebanyak 48 buah.

Sedangkan pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepoloporan dan kepemimpinan pemuda.

Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha, yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepoloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, disamping mampu meningkatkan



kualitas fisik dan kesehatan, juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang, yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.

### **2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 2013 telah melaksanakan 28 urusan, terdiri atas 25 urusan wajib dan 3 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 44 SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB**

##### **1. URUSAN PENDIDIKAN**

###### **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

###### **1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Denpasar berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Karena pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Pendidikan merupakan jendela kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pencapaian prestasi di bidang pendidikan menjadi indikator kemajuan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kemajuan suatu bangsa dengan mudah dapat diteropong lewat keberhasilan penyelenggaraan dunia pendidikan. Kemajuan pendidikan mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar, sebagai mana tercermin dari realisasi anggaran urusan pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjang pembangunan nasional, karena mendidik dan mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi media inovasi untuk menghasilkan berbagai temuan, teknologi, eksplorasi yang mampu mempermudah manusia menjalankan kehidupannya.

Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat.

Partisipasi sekolah merupakan indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain angka melek huruf dan buta huruf. Angka Partisipasi



Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun),SLTP (13-15 tahun) dan SMU (16-18 tahun)

Tabel 2.9  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009-2013  
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan  
Kota Denpasar

NO	Kecamatan	SD/MI										APS 2013
		jumlah murid usia 7-12 thn					jumlah penduduk usia 7-12 th					
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Kecamatan Denpasar Utara	21.033	17,274	21,525	21.767	18.748	21.033	13.364	18.038	18.218	18.253	1,03
2	Kecamatan Denpasar Selatan	20.840	20,840	21,586	21.883	18.957	20.840	14.837	23.144	23.375	23.975	0,79
3	Kecamatan Denpasar Barat	17.172	25,845	26,401	26.394	22.967	25.845	16.322	22.563	22.788	22.988	1,00
4	Kecamatan Denpasar Timur	25.845	17,172	17,665	17.890	15.953	17.172	10.130	13.771	13.908	14.025	1,14
	Jumlah	84.890	81,131	87,177	87.934	77.989	84.890	54.653	77.516	78.289	79.241	3,95

NO	Kecamatan	SMP/MTs										APS 2013
		jumlah murid usia 13-15 thn					jumlah penduduk usia 13-15 th					
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Kecamatan Denpasar Utara	12043	7,990	12,595	12.945	9.555	12043	6.133	8.063	8.143	8.263	1,16
2	Kecamatan Denpasar Selatan	8514	6,163	9,078	9.505	7.471	8514	7.124	9.494	9.588	9.594	0,78
3	Kecamatan Denpasar Barat	5387	4,616	6,506	6.472	4.487	5387	7.534	9.463	9.557	9.600	0,47
4	Kecamatan Denpasar Timur	6639	3,678	5,489	5.676	4.153	6639	4.811	5.998	6.057	7.157	0,58
	Jumlah	32583	22,447	33,668	34.598	25.671	32583	25.602	33.018	33345	34.614	2,98

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Rendahnya taraf pendidikan penduduk di suatu daerah, kemungkinan terjadi karena rendahnya partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain penilaian orangtua terhadap nilai pendidikan anak. Di lain pihak, rendahnya penilaian itu kemungkinan berkaitan dengan tipologi daerah dimana mayoritas penduduk bertempat tinggal. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.

Kalau dilihat berdasarkan data pokok pendidikan maka bisa dikatakan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Denpasar cukup memadai. Kategori ini bisa dijelaskan dengan melihat kemajuan atau perkembangan indikator-indikator dasar seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, kelulusan, ruang kelas, guru dan fasilitas sekolah.

Secara umum baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/MA keadaan komponen-komponen tersebut relatif baik. Jumlah sekolah cukup banyak, siswa baru juga semakin meningkat, kelulusan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, kondisi kelas cukup baik, sebagian besar guru berpendidikan tinggi, dan fasilitas pendukung pendidikan tersedia di seluruh tingkatan. Pendidikan merupakan usaha yang tidak hanya tergantung dari keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana namun lebih merupakan usaha sadar yang lebih banyak tergantung dari kemauan, kesungguhan dan usaha dari manusia sebagai faktor utama.



Tabel 2.10  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014  
Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kota Denpasar	SD/MI								
		Jumlah gedung sekolah					jumlah penduduk usia 7-12 th			
(1)	(2)	(3)					(4)			
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013
1	Kecamatan Denpasar Utara	56	56	56	55	54	13.364	18.038	18.218	18.253
2	Kecamatan Denpasar Selatan	62	62	63	64	63	14.837	23.144	23.375	23.975
3	Kecamatan Denpasar Barat	56	56	56	55	55	16.322	22.563	22.788	22.988
4	Kecamatan Denpasar Timur	49	49	51	53	53	10.130	13.771	13.908	14.025
	Jumlah	223	223	226	227	225	54.653	77.516	78.289	79.241

NO	Kota Denpasar	SMP/MTs								
		Jumlah gedung sekolah					jumlah penduduk usia 13-15 th			
(1)	(2)	(3)					(4)			
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013
1	Kecamatan Denpasar Utara	17	19	20	20	20	6.133	8.063	8.143	8.263
2	Kecamatan Denpasar Selatan	14	16	18	18	19	7.124	9.494	9.588	9.594
3	Kecamatan Denpasar Barat	12	12	12	12	12	7.504	9.463	9.557	9.600
4	Kecamatan Denpasar Timur	11	11	11	12	12	4.811	5.998	6.057	7.157
	Jumlah	54	58	61	62	63	25.602	33.018	33.345	34.614

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Tabel 2.11  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO	Kecamatan	SD/MI									
		Jumlah Guru					Jumlah Murid				
(1)	(2)	(3)					(4)				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kecamatan Denpasar Utara	932	959	759	803	2060	17,274	21,525	21.767	21.472	21.257
2	Kecamatan Denpasar Selatan	887	964	822	819	1252	20,840	21,586	21.883	22.018	22.367
3	Kecamatan Denpasar Timur	829	842	991	1.025	1870	17,172	17,665	17.890	17.922	18.328
4	Kecamatan Denpasar Barat	1,857	1,092	946	943	2250	25,845	26,401	26.394	26.225	25.745
	Jumlah	4,505	3,857	3518	3.590	7432	81,131	87,177	87.934	87.637	87.697

NO	Kecamatan	SMP/MTs									
		Jumlah Guru					Jumlah Murid				
(1)	(2)	(3)					(4)				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kecamatan Denpasar Utara	837	796	822	837	752	12,043	12,268	12.945	12.595	15590
2	Kecamatan Denpasar Selatan	594	594	667	631	490	8,514	8,741	9.505	9.078	10239
3	Kecamatan Denpasar Timur	932	381	403	385	246	5,387	5,485	5.676	5.489	4825
4	Kecamatan Denpasar Barat	466	468	470	468	337	6,639	6,506	6.472	6.506	7028
	Jumlah	2,829	2,239	2.362	2.321	1825	32,583	33,000	34.598	33.668	37682

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

## 1.2. Angka rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata rata Lama Sekolah di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 10,65 tahun 2010, menjadi 10,70 tahun 2011, tahun 2012 menjadi 10,94 tahun dan tahun 2013 menjadi 11,05



### 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)  
Tahun 2010 - 2013

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>				
1.1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	73.163	75.910	74.347	76.625
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	54.653	77.516	78.289	79.241
1.3	APM SD/MI	133,87	97,93	94,96	96,70
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>				
2.1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	22.447	23.468	24.626	25.560
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	25.602	33.018	33345	34.614
2.3	APM SMP/MTs	87,68	71,08	73,85	73,84
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>				
3.1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	22.215	23.272	25.755	14.726
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18	31.552	34.770	35.315	38.184
3.3	APM SMA/MA/SMK	70,41	66,93	72,93	38,57

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

### 1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar.

Tabel 2.13  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Tahun 2010 - 2013

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>				
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	84.890	87.117	87.150	87.209
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	54.653	77.516	78.289	79.241
1.3	APK SD/MI	155,33	112,39	111,32	110,06
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>				
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	32.583	33.668	34.601	36.185
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-	25.602	33.018	33345	34.614



	15				
2.3	APK SMP/MTs	127,27	101,97	103,77	104,54
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>				
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	33.985	40.593	36.635	38.014
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18	31.552	34.770	35.315	38.184
3.3	APK SMA/MA/SMK	107,71	116,75	103,74	99,55

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

## 2. URUSAN KESEHATAN

### A. DINAS KESEHATAN

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan indikator, antara lain Indikator Indonesia sehat dan Indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Indikator Indonesia sehat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut diatas dapat digolongkan ke dalam : (1) Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi (2) Indikator hasil antara, yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta (3) Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas pelayanan minimal kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri atas 26 indikator pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan



kesehatan, baik dalam segi pemberdayaan masyarakat, desentralisasi upaya kesehatan maupun lingkungan strategis termasuk globalisasi.

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Akses terhadap sarana Kesehatan

a) Puskesmas

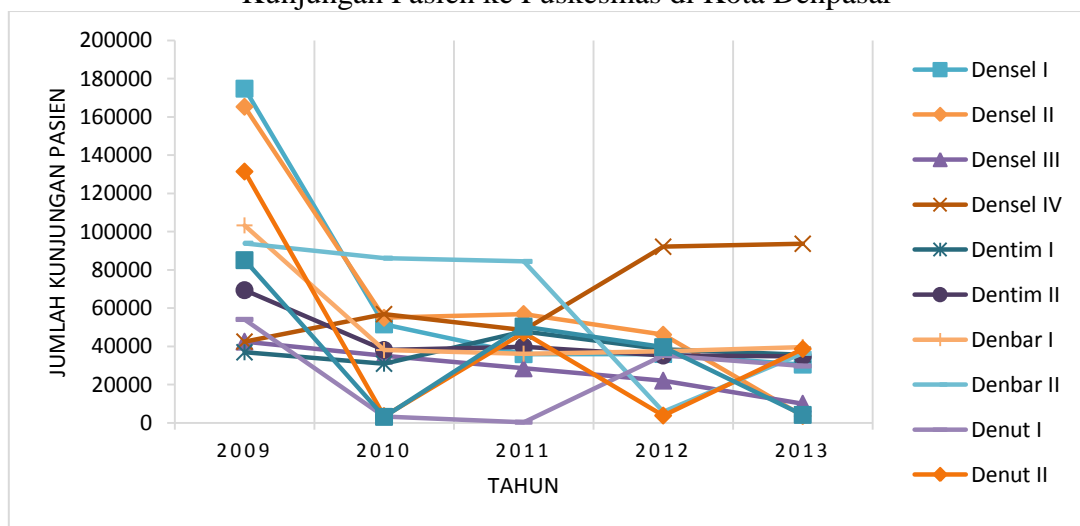
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan disuatu wilayah kerja. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1,69. Cakupan kunjungan rawat jalan ke Puskesmas yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2013 sebanyak 47,04% sedangkan cakupan kunjungan puskesmas untuk rawat inap sebesar 0,18%. Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 15%, sedangkan cakupan kunjungan rawat inap ke puskesmas masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,5%.

Tabel 2.14  
Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar

	2009	2010	2011	2012	2013
Densel I	174768	51.483	35.918	35.999	30.468
Densel II	165281	54.954	56.934	46.107	3.5880
Densel III	42476	35.151	28.518	22.091	10.039
Densel IV	42476	56.839	48.424	92.108	93.654
Dentim I	36912	30.953	47.807	38.428	35.685
Dentim II	69389	38.121	39.839	35.221	34.825
Denbar I	103271	38.081	36.192	37.485	39.697
Denbar II	93927	86.129	84.409	57.970	36.373
Denut I	54102	3.294	38.700	35.364	29.742
Denut II	131425	3.568	47.101	38.250	38.658
Denut III	85084	3.147	50.342	39.589	41.780

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar 2.4  
Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar



b) Rumah sakit

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya dan merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui rumah sakit, tanpa melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Rumah sakit yang ada di Kota Denpasar terdiri dari 5 buah rumah sakit pemerintah (1 buah RS Tipe A, 1 buah RS Tipe B dan 3 buah RS Tipe C) dan 14 buah rumah sakit swasta yang seluruhnya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C, memiliki kemampuan gawat darurat, memiliki kemampuan laboratorium kesehatan dan seluruhnya sudah memiliki 4 (empat) spesialis dasar serta memiliki akses ketersediaan darah untuk ibu hamil dan neonatus resti/komplikasi yang dirujuk kecuali RS Indra Masyarakat.

Tabel 2.15  
Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2013

No	Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Kapasitas (TT x 365)	BOR (%)
1	RSUD Wangaya	200	73.000	78.9
2	RSUP Sanglah	703	256.595	87.2
3	RS Trijata/Bhayangkara	58	21.170	31.0
4	RS Udayana	120	43.800	47.7
5	RS Puri Raharja	101	36.865	68.0
6	RS Harapan Bunda	25	9.125	38.8
7	RS Dharma Usadha	32	11.680	34.0
8	RS Dharma Yadnya	50	18.250	29.3
9	RS Surya Husadha	100	36.500	84.0
10	RS Prima Medika	114	41.610	82.7
11	RS Manuaba	40	14.600	61.5
12	RS Kasih Ibu	95	34.675	59.0
13	RS Indera	25	9.125	2.4
14	RS Balimed	120	43.800	64.2
15	RS Bali Royal	100	36.500	70.5
16	RS Surya Ubung	48	17.520	45.0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

2. Sarana Kesehatan lainnya

Disamping Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan rumah sakit masih banyak terdapat sarana kesehatan lainnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16  
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Posyandu	456	456	459	485
2.	Jumlah Balita	20.337	18.548	18.706	18.321
3.	Rasio				



Tabel 2.17  
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2013

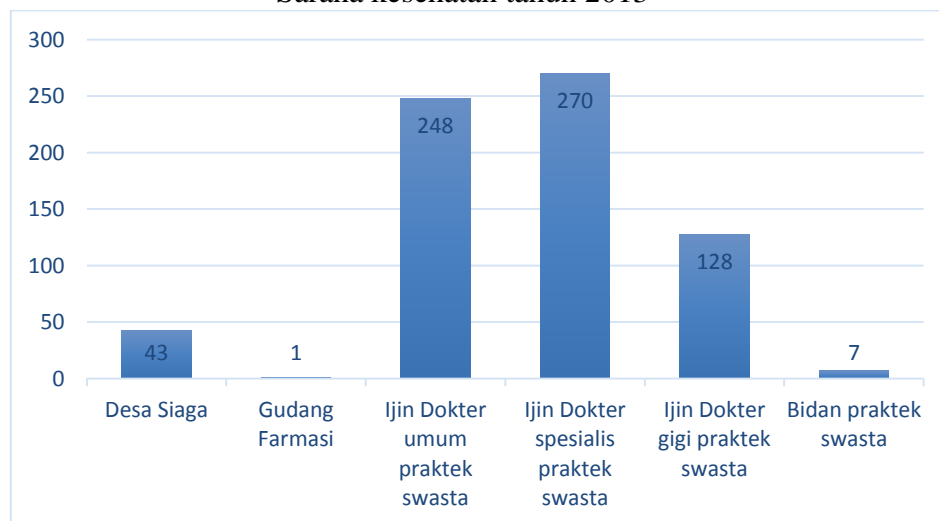
No (1)	Kecamatan (2)	Jumlah Posyandu (3)	Jumlah Balita (4)	Rasio (5=3/4*1000)
1.	Denpasar Selatan	125	4.421	28.27/1000 balita
2.	Denpasar Timur	102	3.622	28.16 /1000 balita
3.	Denpasar Barat	125	5.790	21.58 /1000 balita
4.	Denpasar Utara	133	4.488	29.63 /1000 balita
	JUMLAH	485	18.321	26.47 /1000 balita

Tabel 2.18  
Data Ijin Sarana Kesehatan yang dikeluarkan selama Tahun 2013

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Desa Siaga	43
2	Gudang Farmasi	1
3	Ijin Dokter umum praktek swasta	248
4	Ijin Dokter spesialis praktek swasta	270
5	Ijin Dokter gigi praktek swasta	128
6	Bidan praktek swasta	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar 2.5  
Sarana kesehatan tahun 2013



### 3. Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain :

#### a) Angka Kematian Netto (*Net Death Rate/NDR*)

Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2013 :

- 1) RSUP Sanglah Denpasar : 3.8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 2) RS Darmayadnya : 48 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 3) RS Puri Raharja : 1.2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 4) RS Surya Husada : 0.9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 5) RS Bali Med : 0.8per 1000 pasien keluar hidup dan mati



b) Angka Kematian Umum (*Gross Death Rate/GDR*)

Angka Kematian Umum (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi di beberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2013 adalah :

- 1) RSUP Sanglah : 7.1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 2) RSUD Wangaya : 3.3 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 3) RS Kasih Ibu : 1.7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 4) RS Surya Husada : 1.6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- 5) RS Darma Yadnya : 1.5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

c) Angka Penggunaan Tempat Tidur (*Bed Occupation Rate/BOR*)

BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2013 adalah :

- 1) RSUP Sanglah : 87.2
- 2) RS Surya Husada : 84.0
- 3) RSUD Wangaya : 78.9
- 4) RS Prima Medika : 82.7
- 5) RS Bali Royal : 70.5

d) Rata-rata Lama Dirawat (*Length Of Stay/LOS*)

Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2013 adalah 3.4 hari.

#### 4. Indikator Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir, di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, meningkatkan umur harapan hidup, peningkatan jumlah bayi, balita tertimbang, peningkatan bayi balita yang menunjukkan kenaikan berat badannya, penurunan angka bagi balita yang dibawah garis merah, penurunan angka balita gizi buruk

a) Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sensitif terhadap kesediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan prenatal. Disamping itu AKB juga mempunyai asosiasi dengan angka GNP per kapita, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan masyarakatnya, beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara



umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

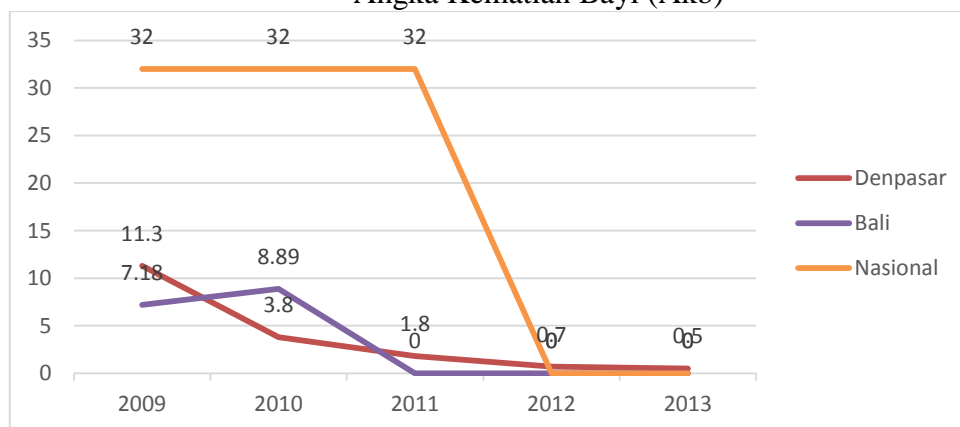
Angka kematian bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.19  
Angka Kematian Bayi

No	Tahun	Angka Kematian Bayi (Akb)		
		Denpasar	Bali	Nasional
1	2009	11.3/1000 KH	7.18	32
2	2010	3.8/1000 KH	8.89	32
3	2011	1.8/1000 KH	7.22	32
4	2012	0,7/1000 KH	6.37	32
5	2013	0.5/1000 KH	5.49	32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar 2.6  
Angka Kematian Bayi (Akb)



Dalam tiga tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan kematian bayi di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.

#### b) Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.



Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil (bumil), pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan milenium yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu Angka Kematian Ibu Maternal.

Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir.

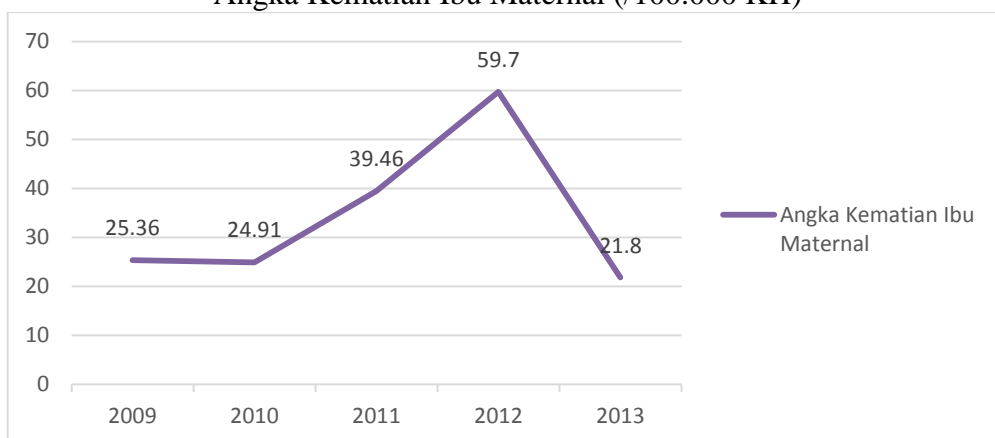
Angka Kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.20  
Angka Kematian Ibu Maternal

No	Tahun	Angka Kematian Ibu Maternal
1	2009	25.36/100.000 KH
2	2010	24.91/100.000 KH
3	2011	39.46/100.000 KH
4	2012	59,7/100.000 KH
5	2013	21.8/100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar 2.7  
Angka Kematian Ibu Maternal (/100.000 KH)



Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan namun dapat ditekan pada tahun 2013. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2013 (21.8 per 100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Rensra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2013 (95 per 100.000 KH). Selama tahun 2013 di Kota



Denpasar terjadi 4 kematian ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 3 orang ibu nifas. Bila kita lihat seluruh ibu hamil meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Lima puluh persen kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstetri seperti HIV/Aids, jantung, ginjal dan penyakit penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan.

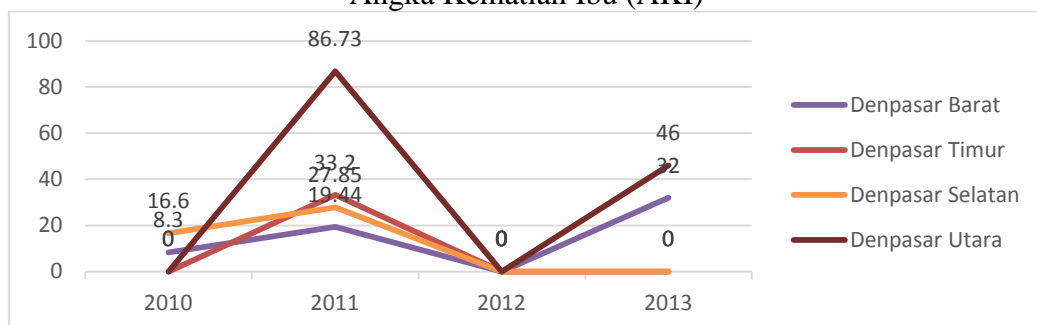
Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan.

Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di 4 kecamatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Tabel 2.21  
Angka Kematian Ibu

No	Tahun	Angka Kematian Ibu (AKI)			
		2010	2011	2012	2013
1	Denpasar Barat	8.3/100.000 KH	19.44/100.000 KH	50,55/100.000 KH	32/100.000 KH
2	Denpasar Timur	-	33.20/100.000 KH	60,33/100.000 KH	0
3	Denpasar Selatan	16.6/100.000 KH	27.85/100.000 KH	53,01/100.000 KH	0
4	Denpasar Utara	-	86.73/100.000 KH	78,74/100.000 KH	46/100.000 KH

Gambar 2.8  
Angka Kematian Ibu (AKI)



Data pada grafik 2.7 di atas menunjukkan bahwa kematian maternal tertinggi di kecamatan Denpasar Selatan Bila dilihat kelompok umurnya kematian ibu hamil tertinggi pada kelompok umur 20-34 tahun.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Kota Denpasar pada tahun 2013 masih dibawah target Nasional ( 125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), dan bila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar (95 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Kota Denpasar sudah cukup baik. Disamping itu pula akses terhadap sarana pelayanan sangat mudah karena penyebarannya hampir merata di wilayah seluruh Kota Denpasar.



## 5. Angka Kesakitan

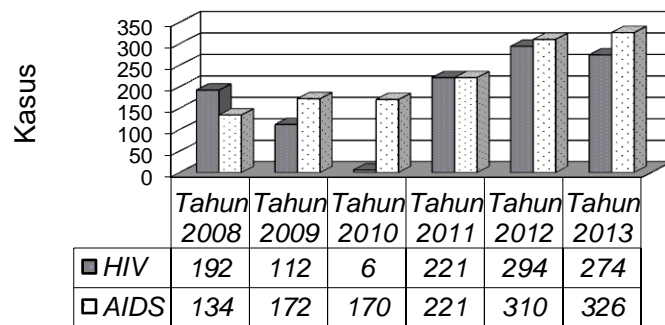
### a) HIV/AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat.

Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.9  
Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar  
2008 s/d 2012



Data pada grafik 4.9 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 tercatat kasus baru HIV-AIDS sebanyak 221 kasus HIV dan 221 kasus AIDS. Pada tahun 2012 ditemukan 294 kasus HIV dan 310 kasus AIDS. Pada tahun 2013 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 274 orang (128 penderita laki-laki dan 98 perempuan) dan AIDS sebanyak 326 orang (228 penderita laki-laki dan 98 penderita perempuan). Selama tahun 2013 ditemukan 9 kematian akibat AIDS (5 laki-laki dan 4 perempuan). Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV+. Situasi kasus HIV-AIDS menurut kelompok resiko di Kota Denpasar sebagian besar terdapat pada kelompok heterosex (57,53%) kemudian disusul IDU (30,97%), Homo/Biseksual (6,10%), tidak diketahui (4,12) dan perinatal (1,28%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2013 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 3.586 pendonor darah. Dari jumlah tersebut sebanyak 25 sampel darah (0,70%) positif terinfeksi HIV-AIDS.



Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.

b) Demam Berdarah Dangu (DBD)

Demam Berdarah Dangu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dangu dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk *Aedes aegypti* tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Denpasar merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya

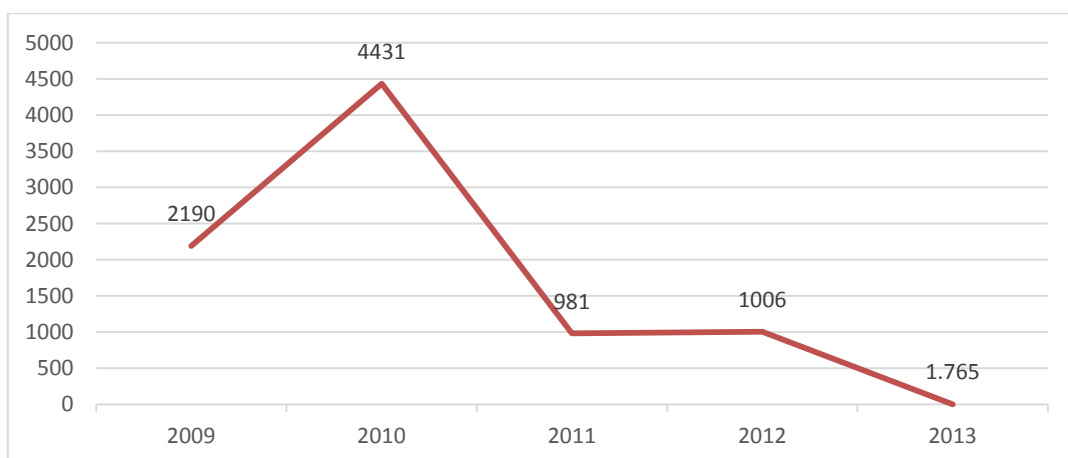
Jumlah kasus DBD pada tahun 2013 adalah 1.765 kasus, terdiri dari 950 penderita laki-laki dan 815 perempuan. Kematian akibat DBD pada tahun 2013 sebanyak 4 orang (CFR=1.8%). Incidence rate DBD pada tahun 2013 adalah 249.9 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.22  
Demam berdarah dangu

No	Tahun	Demam berdarah dangu
1	2009	2190
2	2010	4431
3	2011	981
4	2012	1006
5	2013	1.765

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar 2.10  
Demam berdarah dangu



Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan



pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PSN adalah angka bebas jentik (ABJ). Tahun 2012 ABJ Kota Denpasar adalah sebesar 96,36%.

## 6. Status Gizi

Keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis (pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lainnya). Gizi buruk pada balita sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian pada balita. MDGs menetapkan prevalensi bagi Indonesia sebesar 18,5 persen dan pencapaian Indonesia sebesar 5,4 persen berarti target MDGs sudah terpenuhi

Pada tahun 2013 prevalensi gizi buruk di Kota Denpasar adalah sebesar 0.04 persen, pencapaian ini sudah lebih rendah dari pencapaian secara nasional dan target MDGs.

Kejadian gizi buruk dan BBLR dipengaruhi oleh multi faktor seperti keadaan soal ekonomi orangtua, tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua serta adanya penyakit kronis seperti TB, Paru, HIV AIDS dan lain sebagainya.

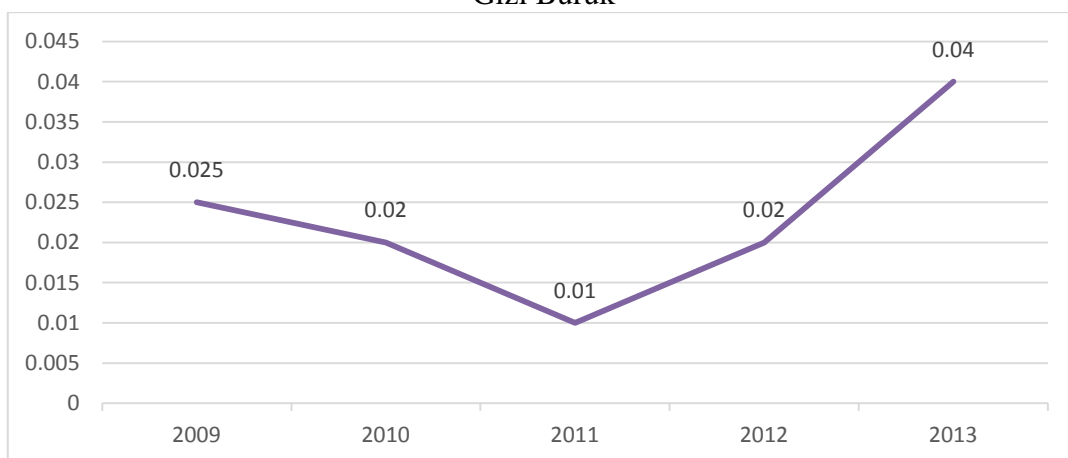
Dalam lima tahun terakhir kasus gizi buruk di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :

Tabel 2.23  
Gizi Buruk

No	Tahun	Gizi Buruk
1	2009	0,025%
2	2010	0,02%
3	2011	0,01%
4	2012	0,02% (4/18.888)
5	2013	8/18.321 (0.04)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar 2.11  
Gizi Buruk



## Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi Askes, Jamsostek, Askeskin dan jenis jaminan kesehatan prabayar lainnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 850.600 jiwa. Penduduk yang tercakup dalam Asuransi Kesehatan (Askes) sebanyak 88.279 jiwa (13%), Jamsostek mencapai 72.779 jiwa (8,55%), Askeskin sebanyak 68.579 jiwa (8,17%), JKMB 415125 (48,80%).

Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.579 jiwa, seluruhnya (8,17%) sudah tercakup dalam Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Pelayanan yang berhak didapatkan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit dari 69.579 jiwa masyarakat miskin yang ada, yang memanfaatkannya 23.813 jiwa di puskesmas dan 19.007 jiwa di rumah sakit.

## 7. Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat juga dapat dilihat dari nilai Umur Harapan Hidup (UHH). UHH juga merupakan indikator Indeks keberhasilan Pembangunan Manusia. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan UHH. Umur Harapan Hidup penduduk Kota Denpasar tahun 2013 berdasarkan data BPS sebesar 73.06 tahun. Angka ini lebih tinggi dari UHH Propinsi Bali berdasarkan kajian Bali Sehat 2005 oleh BPS sebesar 72,4 tahun untuk semua jenis kelamin dan lebih tinggi dari proyeksi UHH nasional tahun yaitu sebesar 68,7 tahun.

Tabel 2.24  
Umur harapan hidup

No	Tahun	Umur harapan hidup
1	2009	72,96
2	2010	73,01
3	2011	73,06
4	2013	73.06

Sumber : Badan Pusat Statistik

## B. RUMAH SAKIT UMUM WANGAYA

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya adalah rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Denpasar, merupakan rumah sakit tipe B non pendidikan yang berdiri sejak tahun 1921 dengan luas tanah 23.271 m<sup>2</sup>, luas bangunan 12.063,372 m<sup>2</sup> dengan 200 tempat tidur. Mulai tahun 2003 menjadi rumah sakit swadana dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 dan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 RSUD Wangaya ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan kategori penuh. Sebagai satu - satunya Rumah Sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan pembenahan, baik manajemen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 RSUD Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standard pelayanan, serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538 / Menkes / SK / 2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan.



Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum ( BLU ). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi PPK - BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan status RSUD Wangaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan motivasi untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya Kota Denpasar dalam rangka mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan, inovatif dalam pelayanan berbasis budaya kerja. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, disamping memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasien, dan pada tahun 2010 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus akreditasi untuk 16 standar pelayanan.

Didalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesional serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasionalnya, RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat - alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan :

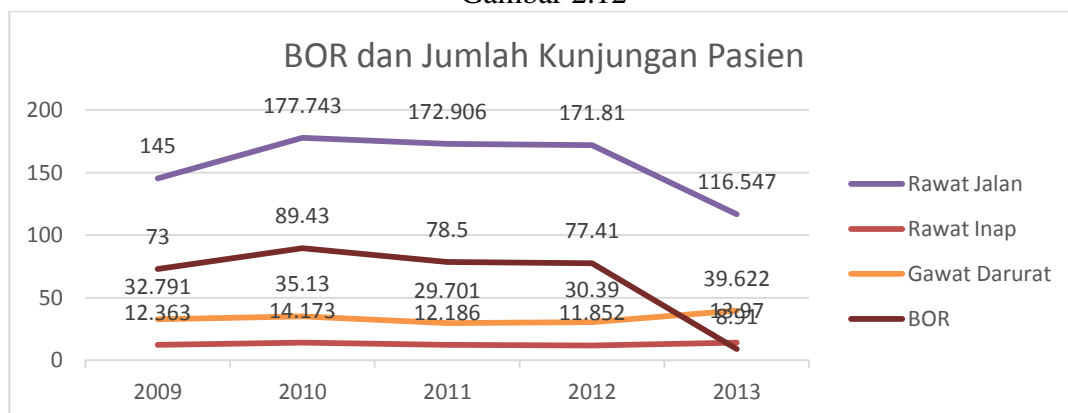
1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
2. Pendukung Pelayanan

Tabel 2.25  
BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Rawat Jalan	145.364	177.743	172.906	171.810	116.547
2.	Rawat Inap	12.363	14.173	12.186	11.852	13.970
3.	Gawat Darurat	32.791	35.130	29.701	30.390	39.622
4.	BOR	73 %	89,43 %	78,50 %	77.41%	78,91%

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Gambar 2.12



Tabel di atas menunjukkan bahwa, tingkat kunjungan pasien mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2013, hal ini disebabkan karena renovasi ruang rawat inap dan ruang rawat jalan.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah :

1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan
2. Mutu pelayanan
3. Tingkat efisiensi pelayanan

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar, adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
3. Terbatasnya dana / anggaran yang tersedia

Dengan adanya kendala dan hambatan ini, maka secara langsung mempengaruhi ruang gerak RSUD Wangaya Kota Denpasar didalam memberikan pelayanan yang mengakibatkan mutu pelayanan belum optimal. Pada tahun 2012 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus ISO 9001-2008, serta mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bali sebagai juara 1 peserta lomba terbaik Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B) tingkat Provinsi Bali dan berhak mewakili Bali untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

### **3. URUSAN PEKERJAAN UMUM**

#### **A. DINAS PEKERJAAN UMUM**

Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan peningkatan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan mampu minimalis terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat kemajuan perkembangan kota. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke PU-an khususnya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan untuk mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

##### **1) Drainase**

Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang penampung utama air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai (tukad) yang mengalir di Kota Denpasar, tetapi dari semua tukad yang ada dapat dipilah 3 (tiga) buah sungai yang benar-benar berfungsi sebagai sungai yaitu yaitu : Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung. Sedangkan yang lainnya sebagian berupa



saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa-rawa.

Karakter tiga sungai pembuang utama saluran drainase Kota Denpasar adalah :

1. Tukad Ayung mengalir di bagian Timur Kota Denpasar dan bermuara di Pantai Padanggalak, merupakan sungai terbesar di Bali yang melewati beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Bangli. Tukad Ayung dengan luas DAS = 109.30 km<sup>2</sup>, panjang sungai utama = 62.50 km alaur sungai berbentuk U sampai V.
2. Tukad Badung mengalir di bagian tengah Kota Denpasar, melewati Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan bermuara di hutan mangrove Denpasar Selatan, dengan panjang sungai utama = 17 km dan Luas Daerah Pengaliran = 22.55 km<sup>2</sup>
3. Tukad Mati mengalir di bagian barat Kota Denpasar, melewati Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, bermuara di hutan mangrove sebelah Barat Tukad Badung, Luas Daerah Aliran sungai Tukad Mati 25.40 km<sup>2</sup> panjang total sungai = 12 km.

Sedangkan sungai-sungai yang berasal dari saluran irigasi dan drainase berubah menjadi sungai (tukad) antara lain :

- i. Tukad Loloan mengalir sekitar Blanjong Sanur atau Suwung Kangin bermuara di pantai Selatan. Intake yang terdapat pada sungai ini merupakan bangunan pengambilan untuk irigasi saat ini berfungsi menjadi seperti sungai yaitu Tukad Tegeh.
- ii. Tukad Ngenjung di sebelah Barat Tukad Tegeh di Suwung Kangin (Komplek perumahan Kerta Petasikan) bermuara di Pantai Denpasar Selatan.
- iii. Tukad Punggawa, mengalir sekitar Suwung Kangin (antara Kerta Petasikan dengan Sidakarya), dan bermuara di Pantai Selatan. Tukad ini mempunyai anak sungai yaitu Tukad Guming.
- iv. Tukad Rangda, mengalir mulai dari Kelurahan Panjer dan membelah Kelurahan Sidakarya bermuara di pantai Denpasar Selatan. Tukad ini mempunyai anak sungai yaitu Tukad Panjer.
- v. Tukad Klandis berasal dari bendung (dam) Oongan di Tukad Ayung lalu bermuara ke Tukad Badung.
- vi. Tukad Panjer merupakan saluran irigasi cabang dari saluran Oongan yang berfungsi sebagai saluran drainase mengalir ke arah selatan dan bermuara pada Tukad Rangda.
- vii. Tukad Tebe merupakan saluran drainase dari daerah Ubung dan bergabung dengan intake Mergaya Tukad Badung sebagai saluran irigasi dan bermuara di Tukad Mati.
- viii. Tukad Pekaseh mengalir mulai dari daerah Suci membelah wilayah Sanglah dan bermuara ke Pantai di daerah Suwung.

Seperti telah diuraikan bahwa sungai-sungai tersebut di atas mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai saluran drainase dari saluran irigasi, dan bahkan ada yang berfungsi sebagai sumber air baku, obyek wisata dan lain-lain.

Sampai saat ini, sistem drainase di Kota Denpasar belum sepenuhnya dapat diatasi, mengingat tumbuhnya permukiman dengan begitu pesat sehingga menumbuhkan daerah genangan yang semakin banyak. Selain genangan, saluran drainase di kiri-kanan jalan masih belum menyatu dalam sistem yang terpadu.

## 2) Air Limbah dan Sanitasi

Sesuai data tahun 2012 sistem pembuangan air limbah di Kota Denpasar masih ada yang dilakukan secara individual, sebagian besar rumah penduduk di Kota Denpasar sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi pembuangan air limbah seperti : Kecamatan Denpasar sekitar 85 persen, Denpasar Utara 87 persen, Denpasar Timur sekitar 93 persen dan Denpasar Selatan sekitar 90 persen. Sedangkan sisanya masih



menggunakan dan memanfaatkan sungai atau saluran umum untuk kegiatan bersama (BBAS= Buang Air Besar Sembarangan) .

Limbah cair yang berasal dari rumah tangga (limbah domestik) masih dianggap tidak sebagai penyebab tercemarnya lingkungan padahal limbah domestik ternyata cukup potensial menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Denpasar. Hal ini diindikasikan dari tercemarnya sungai-sungai di Kota Denpasar (Tukad Badung dan Tukad Mati) dan sumur-sumur penduduk oleh minyak dan lemak.

Guna mengatasi pencemaran air limbah ini, di Kota Denpasar telah dibangun jaringan perpipaan yang menampung air limbah melalui program DSDP (Denpasar Sewarage Development Program). Melalui sistem perpipaan dan IPAL terpusat. Demikian pula dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan, di Kota Denpasar telah diperkenalkan sistem Sanitasi yang berbasis kepada masyarakat melalui program Sanimas ( Sanitasi Oleh Masyarakat ).

Sanitasi merupakan gerakan pembangunan yang mengkoordinasikan pembangunan secara terintegrasi antara sektor air bersih, air limbah, sampah dan drainase. Sampai saat ini pembangunan sektor sanitasi masih bersifat sektoral dan belum adanya integrasi dan koordinasi sehingga terkesan sanitasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal sanitasi merupakan indikator penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Denpasar sebagai sebuah kota metropolitan dihadapkan pada masalah sanitasi yang cukup pelik, oleh karenanya penanganan sanitasi kota perlu lebih diintensifkan melalui berbagai program pembangunan. Salah satu program sanitasi yang diperkenalkan oleh Pusat adalah program ISSDP (*Indonesia Sanitation Sector Development Program*). Melalui program ini kondisi sanitasi kota dipetakan, Kebijakan sanitasi dirumuskan, yang akhirnya strategi implementasi sanitasi kota disusun untuk dapat dilaksanakan secara terpadu. Sampai saat ini pemerintah Kota Denpasar sedang berproses dalam upaya implementasi strategi sanitasi kota, melalui keikutsertaan dalam program ISSDP 2.

Secara garis besar program Sanitasi di Kota Denpasar dilakukan melalui 2 (dua) sistem antara lain :

Sistem IPAL terpusat melalui program DSDP, kegiatan yang dilakukan dengan membangun Sambungan Rumah (SR) :

- a. Tahun 2007 sebesar : 1.300 SR
- b. Tahun 2008 sebesar : 1.116 SR
- c. Tahun 2011 sebesar : 230 SR
- d. Tahun 2012 sebesar : 701 SR
- e. Tahun 2013 direncanakan sebesar : 700 SR

Sistem IPAL Komunal melalui program Sanimas, dengan menysasar kawasan Padat dan Komunal yang tidak terjangkau program DSDP, kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Tahun 2010  
IPAL Komunal Rabic Pro di Desa Pemecutan Kaja dengan jumlah SR 81 buah
2. Tahun 2011  
IPAL Komunal Pasar Desa + Tembau, Sidakarya, Tegal Harum, Panjer dan Anggabaya
3. Tahun 2012  
IPAL Komunal Desa pemecutan Kaja (WASAP-D)  
Tahap I : 3 buah IPAL dengan jumlah : 108 SR  
Tahap II : 1 buah IPAL dengan jumlah : 28 SR  
IPAL Komunal Pasar Desa : Ubung dan Sidakarya  
IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (DAK) sebanyak 2 (dua) IPAL dengan jumlah :107 SR



4. Tahun 2013

IPAL Komunal Desa Pemecutan Kaja (DAK) sebanyak 1 (satu) dengan jumlah : 68 SR

3) Air Bersih

Pesatnya perkembangan penduduk dan perkembangan pariwisata di wilayah Denpasar dan sekitarnya sehingga kebutuhan air baku semakin meningkat baik untuk kebutuhan air bersih domestik maupun non domestik. Pengadaan air bersih bagi penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yang memiliki keterbatasan terhadap fasilitas-fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan pemukiman.

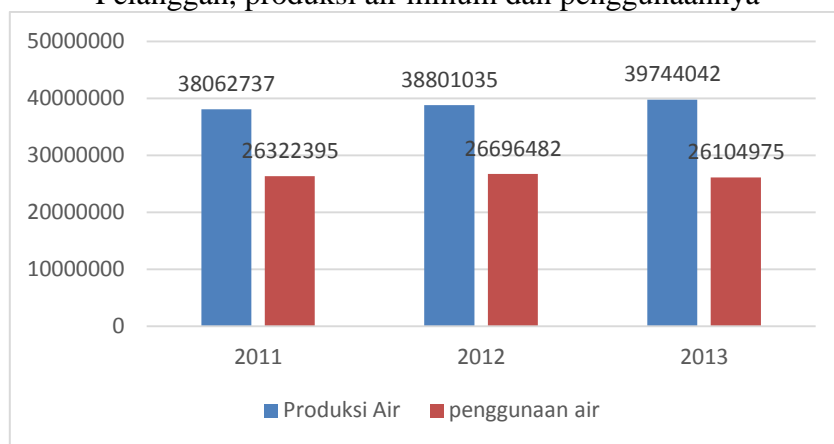
Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya dari tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada table 2.21

Tabel 2.26  
Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya

No	Uraian	Tahun					
		2011		2012		2013	
1	Jumlah pelanggan	69.509 sambungan		71.664 sambungan		73.572 sambungan	
2	Produksi Air	38.062.737 m <sup>3</sup>	1.223,72 l/dt	38.801.035 m <sup>3</sup>	1.247,46 l/dt	39.744.042 m <sup>3</sup>	1.277,78l/dt
3	penggunaan air	26.322.395 m <sup>3</sup> /thn	846.27 l/dt	26.696.482 m <sup>3</sup>	858,30 l/dt	26.104.975 m <sup>3</sup>	839,28l/dt
	- Domestik	23.849.483 m <sup>3</sup>		24.299.251 m <sup>3</sup>	-	23.836.720 m <sup>3</sup>	
	- Non Domestik	2.472.912 m <sup>3</sup>		2.397.231 m <sup>3</sup>	-	2.268.255 m <sup>3</sup>	

Sumber : PDAM Kota Denpasar

Gambar 2.13  
Pelanggan, produksi air minum dan penggunaannya



Kendala yang dihadapi selama ini adalah :

1. Keterbatasan sumber air baku, pelayanan tidak optimal
2. Cakupan pelayanan masih rendah
3. Daftar tunggu semakin banyak
4. Potensi penurunan pendapatan, masyarakat lebih banyak memanfaatkan air bawah tanah yang berdampak terhadap lingkungan
5. Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas 20% target MDGs tidak tercapai.



#### 4) Kondisi Jalan Umum

Permasalahan transportasi darat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh terbatasnya jaringan existing dan kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Sistem jaringan kota terkonsentrasi pada koridor timur-selatan-barat dan koridor utara-timur belum tersedia aksesibilitas yang seimbang, ketidak seimbangan utara-timur dan utara-selatan mengakibatkan volume lalu lintas menjadi tinggi di kawasan kota yang menimbulkan efisiensi transportasi kota.

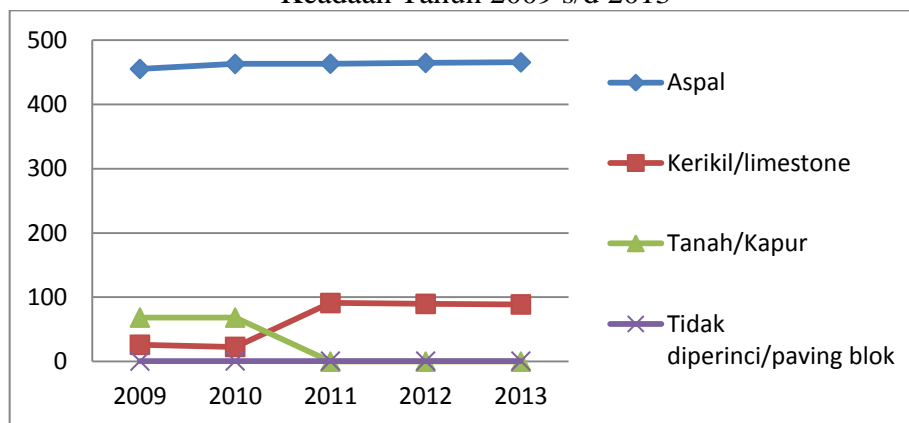
Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan meperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui darat.

Tabel 2.27  
Panjang Jalan Kota Denpasar  
Keadaan Tahun 2009 s/d 2013

K E A D A A N	Panjang Jalan (km)				
	2009	2010	2011	2012	2013
JENIS PERMUKAAN					
Aspal	454,996	462,779	463,096	464,400	475,952
Kerikil/limestone	26,196	22,854	91,044	89,740	85,483
Tanah/Kapur	68,507	68,507	-	-	-
Tidak diperinci/paving blok	0,724	0,936	0,936	0,936	1,666
<b>Jumlah</b>	<b>550,423</b>	<b>555,076</b>	<b>555,076</b>	<b>555,076</b>	<b>563,101</b>

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar

Gambar 2.14  
Panjang Jalan Kota Denpasar  
Keadaan Tahun 2009 s/d 2013



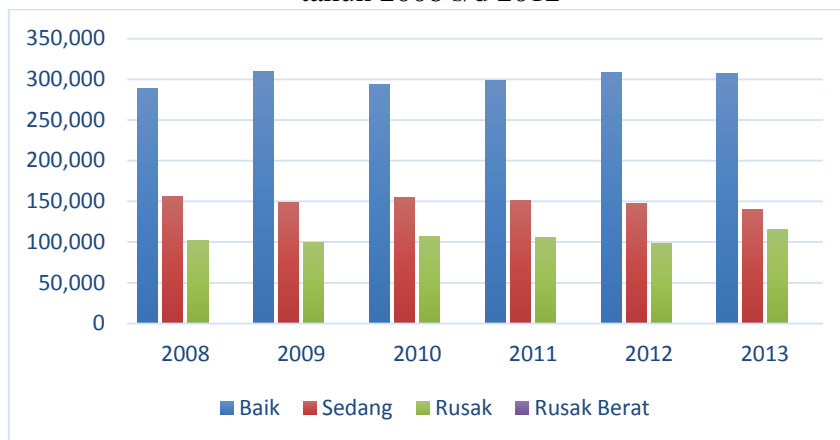
Tabel 2.28  
Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2013

KONDISI JALAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Baik	289,197	309,874	293,651	298,562	308,587	307,380
Sedang	156,038	148,313	154,901	151,294	147,901	140,085
Rusak	102,188	98,889	106,524	105,220	98,588	115,636
Rusak Berat	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>547,423</b>	<b>557,076</b>	<b>555,076</b>	<b>555,076</b>	<b>555,076</b>	<b>563,101</b>

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar



Gambar 2.15  
Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi tahun 2008 s/d 2012



Tabel 2.29  
Panjang dan kondisi jembatan di Kota Denpasar 2014

No	Status Jembatan	Satuan	Kondisi				
			Panjang	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Jembatan Negara	M	549,70	549,70	-	-	-
2	Jembatan Provinsi	M	230,20	230,20	-	-	-
3	Jembatan Kab/Kota	M	1.043,94	981,60	-	62,34	-

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar

Tabel 2.30  
Rasio jaringan irigasi tahun 2009 s/d 2013 kota Denpasar

No	Jaringan irigasi	Panjang jaringan				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jaringan primer	4.864 m	4.864 m	4.864 m	4.864 m	4.864 m
		13.439 m	13.439 m	13.439 m	13.439 m	13.439 m
2	Jaringan sekunder	10.541 m	10.541 m	10.541 m	10.541 m	10.541 m
		13.626 m	13.626 m	13.626 m	13.626 m	13.626 m
3	Jaringan tersier	95.156 m <sup>3</sup>	93.656 m <sup>3</sup>	93.656 m <sup>3</sup>	93.656 m <sup>3</sup>	93.656 m <sup>3</sup>
4	Luas lahan budidaya	3.687 ha	3.687 ha	3.687 ha	3.687 ha	2.967,37 ha

Sumber : Dinas PU Kota Denpasar

## B. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari pembangunan Nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip dasar manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana yang terjadi selama ini datangnya tidak dapat kita prediksi sehingga memerlukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila terjadi dengan berupaya meningkatkan kemampuan, baik itu personil/petugas maupun sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana.



Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara penanggulangan bencana, sesuai dengan pasal 5 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Amanat dari undang-undang tersebut diatas, pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana dengan tanggungjawab dan kewenangannya antara lain mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan dari dampak bencana, menetapkan kebijakan dan merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.

Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Jumlah penduduk yang padat dalam dimensi positif dapat menjadi sumber tenaga kerja potensial bagi pembangunan, disisi lain dapat menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri. Bencana dapat timbul dimana saja kapan saja dan dapat menimpa siapa saja, sebagaimana diketahui bencana itu bersumber dari alam, manusia atau kombinasi keduanya dan bencana dapat juga timbul sebagai dampak social. Bencana yang selama ini sering kalau diklasifikasikan berdasarkan data antara lain : kebakaran gedung dan pemukiman, banjir sebagai akibat curah hujan yang tinggi, angin putting beliung yang berdampak pada pohon tumbang, tanah longsor, gempa bumi dan bencana social lainnya.

Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tercatat bencana alam beserta kerugiannya sebagai berikut : 147 kejadian di tahun 2010 dengan kerugian Rp. Rp. 9.160.000.000,- sebanyak 141 kejadian tahun 2011 dengan kerugian Rp. 24.107.311.000,- dan 216 kejadian tahun 2012 dengan total kerugian Rp. 14.896.100.000,- sebanyak 141 kejadian tahun 2013 dengan total kerugian Rp. 13.455.500.000,-

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :

1. Secara umum kinerja yang masih belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat.
2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana
3. Masih optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana di tingkat instansi terkait, Kecamatan maupun desa/kelurahan
4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana

Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan solusi permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif berupa pengurangan resiko bencana
3. Membentuk tim-tim siaga bencana dari tingkat instansi terkait, tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan



4. Merumuskan program-program pembangunan melalui kegiatan pencegahan pengurangan resiko bencana

#### **4. URUSAN PENATAAN RUANG**

##### **DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN**

Dinas Tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar merupakan dinas daerah yang melaksanakan sebagian rumah tangga daerah di bidang penataan ruang dan perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan. Pemanfaatan ruang untuk perumahan dan permukiman di Kota Denpasar meliputi luasan 5900 ha atau 46% dari luas wilayah Kota Denpasar. Dari 43 wilayah desa/kelurahan, permukiman semuanya berawal dari kelompok-kelompok perumahan tradisional. Pada kawasan pusat Kota dan beberapa kelompok kawasan permukiman, kepadatan permukiman kelihatan lebih padat, namun di beberapa tempat terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah. Kepadatan permukiman yang agak rendah terlihat pada kawasan-kawasan yang masih memiliki persawahan yaitu : pada koridor kawasan Peguyangan Kaja – Penatih, Kawasan Kesiman Kertalangu dan Petilan, Kawasan Renon – Sanur Kauh, Kawasan Pemogan – Pedungan, dan Kawasan Pemecutan Kelod, dan sekitar Padang Sambian sebelah selatan, namun di beberapa blok terdapat kelompok-kelompok permukiman baru dengan kepadatan tinggi.

Kepadatan bangunan pada lingkungan perumahan dan permukiman juga bervariasi yaitu:

- a. Permukiman dengan kepadatan bangunan rendah dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah ke besar, Kawasan LC, atau permukiman tradisional yang masih asli)
- b. Permukiman dengan kepadatan bangunan sedang dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling menengah, dan permukiman tradisional kapling kecil)
- c. Permukiman dengan kepadatan bangunan tinggi dan teratur (pada kawasan permukiman baru dengan kapling kecil, dan permukiman tradisional kapling kecil)
- d. Permukiman kepadatan tinggi dan tidak teratur (pada kawasan permukiman yang berada pada gang-gang sempit, lahan sewa, dan beberapa permukiman kumuh).
- e. Di dalam kawasan perumahan, telah terdapat berbagai fasilitas penunjang perumahan seperti warung sampai supermarket, sekolah dasar dan menengah, jasa-sasa penunjang lainnya.

Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota, tingginya pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. Permasalahan perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik perlu diantisipasi dengan penataan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kota Denpasar diprioritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi-fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi-fungsi bangunan yang diwadahnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas.



Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak diperlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia.

Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

#### 1. Pemanfaatan Ruang Daratan

Tabel 2.31  
Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan  
Di Kota Denpasar

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				DENPASAR (Ha)	% LUAS
		Dps Utara	Dps Timur	Dps Barat	Dps Selatan		
<b>I KAWASAN LINDUNG</b>							
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588,99	588,99	4,61
2	Sempadan Pantai	-	16,00	-	152,50	168,50	1,32
3	Sempadan Sungai	46,11	64,21	45,87	52,34	208,53	1,63
4	RTHK Hutan Kota	2,47	9,51	7,13	25,96	45,08	0,35
	<b>SUB TOTAL I</b>	<b>48,57</b>	<b>89,72</b>	<b>53,00</b>	<b>819,79</b>	<b>1.011,09</b>	<b>7,91</b>
<b>II KAWASAN BUDIDAYA</b>							
1	Permukiman	1.872,10	850,19	1.456,12	1.726,29	5.904,69	46,21
2	Perdagangan dan Jasa	355,68	208,90	525,86	615,88	1.706,32	13,35
3	Perkantoran Pemerintahan	40,85	92,02	19,38	17,82	170,07	1,33
4	Kawasan Efektif Pariwisata	-	47,16	-	683,70	730,86	5,72
5	Perindustrian dan Pergudangan	-	-	-	32,50	32,50	0,25
6	Fasilitas Pendidikan	18,28	20,26	15,42	23,61	77,57	0,61
7	Fasilitas Kesehatan	8,03	3,30	28,30	10,20	49,83	0,39
8	Pertahanan dan Keamanan	2,65	7,30	4,70	29,82	44,47	0,35
9	Fasilitas Peribadatan	11,10	17,90	9,90	12,19	51,09	0,40
10	Fas.Rekreasi dan Olah Raga	54,05	66,45	40,26	112,71	273,47	2,14
11	Kaw. Bddy T. Pangan (sawah)	473,72	610,28	24,28	455,24	1.563,52	12,24
12	Kuburan dan Setra	3,80	6,40	11,00	14,20	35,40	0,28
13	TPA Suwung	-	-	-	10,00	10,00	0,08
14	IPAL Suwung	-	-	-	19,57	19,57	0,15
15	Estuary Dam	-	-	-	33,03	33,03	0,26
16	Jaringan Jalan	218,61	234,12	222,26	328,87	1.003,86	7,86
17	Pelabuhan	-	-	-	52,00	52,00	0,41
18	Terminal	4,55	-	2,52	1,58	8,66	0,07
	<b>SUB TOTAL II</b>	<b>3.063,42</b>	<b>2.164,28</b>	<b>2.360,00</b>	<b>4.179,21</b>	<b>11.766,91</b>	<b>92,09</b>
<b>III</b>	<b>TOTAL I + II</b>	<b>3.112,00</b>	<b>2.254,00</b>	<b>2.413,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>12.778,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>RUANG TERBUKA (%)</b>	<b>6,29</b>	<b>7,88</b>	<b>2,77</b>	<b>14,30</b>	<b>31,23</b>	
<b>V</b>	<b>RUANG TERBANGUN (%)</b>	<b>93,71</b>	<b>92,12</b>	<b>97,23</b>	<b>85,70</b>	<b>68,77</b>	



Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota yang tidak sama, merupakan suatu ancaman sebab perkembangan fisik di daerah hinterland tersebut sering tidak sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Ancaman lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat dengan sumber daya lahan yang terbatas, yang sudah barang tentu memerlukan ruang untuk bermukim. Hal ini mendorong timbulnya kawasan pemukiman padat dan juga percepatan pembangunan sehingga mengakibatkan terjadinya alih fungsi penggunaan lahan di Kota Denpasar.

Tabel 2.32  
Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private  
Per-Kecamatan Di Kota Denpasar

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				DENPASAR (Ha)	% LUAS
		Den-Ut	Den-Tim	Den-Bar	Den-Sel		
<b>I RTHK PUBLIK</b>							
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588,99	588,99	4,61
2	Sempadan Pantai	-	16,00	-	152,50	168,50	1,32
3	Sempadan Sungai	46,11	64,21	45,87	52,34	208,53	1,63
4	RTHK Hutan Kota	2,47	9,51	7,13	25,96	45,08	0,35
5	Fas. rekreasi dan Olah Raga (90%)	48,65	59,81	36,23	101,44	246,12	1,93
6	Kuburan dan Setra	3,80	6,40	11,00	14,20	35,40	0,28
7	RTHK Pertanian (sawah Ekowisata)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
8	Perkantoran Pemerintahan (20%)	8,17	18,40	3,88	3,56	34,01	0,27
9	Fasilitas Pendidikan (10%)	1,83	2,03	1,54	2,36	7,76	0,06
10	Fasilitas Kesehatan (10%)	0,80	0,33	2,83	1,02	4,98	0,04
11	Fasilitas Peribadatan (20%)	2,22	3,58	1,98	2,44	10,22	0,08
12	Estuary Dam (10%)	-	-	-	3,30	3,30	0,03
13	Jaringan Jalan (20%)	43,72	46,82	44,45	65,77	200,77	1,57
14	Pelabuhan (10%)	-	-	-	5,20	5,20	0,04
15	Terminal (10%)	0,45	-	0,25	0,16	0,87	0,01
	<b>TOTAL RTHK PUBLIK</b>	<b>395,08</b>	<b>532,23</b>	<b>167,31</b>	<b>1.246,87</b>	<b>2.341,48</b>	<b>18,32</b>
<b>II RTHK PRIVATE</b>							
1	RTHK Pertanian (sawah murni)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
2	Permukiman (20%)	374,42	170,04	291,22	345,26	1.180,94	9,24
3	Perdagangan dan Jasa (10%)	35,57	20,89	52,59	61,59	170,63	1,34
4	Kawasan Efektif Pariwisata (10%)	-	9,43	-	136,74	146,17	1,14
5	Perindustrian dan Pergudangan (10%)	-	-	-	3,25	3,25	0,03
6	Pertahanan dan Keamanan (20%)	0,53	1,46	0,94	5,96	8,89	0,07
7	TPA Suwung (10%)	-	-	-	1,00	1,00	0,01
8	IPAL Suwung (10%)	-	-	-	1,96	1,96	0,02
	<b>TOTAL RTHK PRIVATE</b>	<b>647,38</b>	<b>506,96</b>	<b>356,89</b>	<b>783,38</b>	<b>2.294,60</b>	<b>17,96</b>
<b>III</b>	<b>TOTAL RTHK</b>	<b>1.042,45</b>	<b>1.039,19</b>	<b>524,20</b>	<b>2.030,25</b>	<b>4.636,09</b>	
<b>IV</b>	<b>LUAS WILAYAH (HA)</b>	<b>3.112,00</b>	<b>2.254,00</b>	<b>2.413,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>12.778,00</b>	
<b>V</b>	<b>% RTHK</b>	<b>33,50</b>	<b>46,10</b>	<b>21,72</b>	<b>40,61</b>	<b>36,28</b>	

## 2. Pemanfaatan Ruang Kelautan

Secara umum ruang laut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi, aktivitas pariwisata, sektor perikanan dan penggunaan lainnya seperti habitat/konservasi flora dan fauna, pertahanan dan keamanan serta penelitian.

Penggunaan ruang laut Kota Denpasar untuk kepentingan transportasi dibedakan atas prasarana pelabuhan dan penggunaan bagi jalur-jalur lintasan



perhubungan laut, baik jalur angkutan laut tradisional maupun jalur angkutan kapal laut. Kota Denpasar memiliki satu prasarana pelabuhan laut yang beroperasi secara aktif dan permanen, yaitu Pelabuhan Benoa. Sedangkan untuk penyeberangan ke Pulau Nusa Penida, sementara ini masyarakat pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut memanfaatkan Pantai Sanur sebagai dermaga yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil.

Pesatnya pembangunan dan berbagai aktifitas di sepanjang pesisir dan lautan telah menimbulkan berbagai tekanan-tekanan terhadap lingkungan dan menjadi isu masalah lingkungan yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar antara lain kerusakan habitat (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) dan kerusakan fisik pantai oleh abrasi.

Hutan mangrove yang sebagian besar terletak di kawasan Pulau Serangan, Teluk Benoa dan Sekitarnya mengalami kerusakan akibat reklamasi Pulau Serangan. Faktor penyebab lainnya adalah faktor pengendapan pasir/ lumpur yang tinggi dengan adanya perubahan pola aliran air seperti di sebelah barat jalan Pelabuhan Benoa dan muara Tukad Tegeh.

### 3. Pemanfaatan Ruang Udara

Pemanfaatan ruang udara saat ini di Kota Denpasar antara lain untuk: penerbangan, layang-layang, para sailing, cerobong asap industri, tower dan frekwensi komunikasi, tower Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk jaringan listrik, dan ruang untuk bangunan tinggi. Untuk manuver penerbangan dan pendaratan penerbangan daerah bagian selatan Kota Denpasar terkena batas ketinggian bangunan dan ketinggian aktivitas lainnya sesuai dengan sudut pendaratan dan penerbangan. Tower komunikasi baik untuk hubungan telepon, televisi cenderung bertambah semarak sehingga menimbulkan “kekumuhan” ruang udara, oleh karena itu perlu dibatasi jumlah dan lokasi pembangunannya dikendalikan seupaya tidak membahayakan jiwa dan barang.

Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang udara di wilayah Kota yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara berupa pengaturan ruang udara untuk kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di wilayah kota sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara diantaranya :

- 1) Struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada radius daerah penerbangan untuk mengikuti aturan yang berlaku.
- 2) Ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara diatas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter.
- 3) Lokasi bangunan menara penerima dan atau pemancar radio televisi dan telekomunikasi harus dibangun pada kawasan budi daya memberi rasa aman dan keselamatan lingkungan.
- 4) Pembuangan hasil proses kegiatan ke ruang udara harus dijamin tidak menimbulkan pencemaran udara
- 5) Pengaturan kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan, serta jalur penerbangan helicopter wisata lainnya.

### 4. Perumahan dan Fasilitas Umum

Perkembangan penduduk di Kota Denpasar tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yang berdampak akan kebutuhan perumahan penduduk beserta



infrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin meningkat pula. Kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kota Denpasar semakin terbatas, terkait dengan ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah yang telah melampaui batas pemanfaatan ruang yang ada. Disamping hal tersebut diatas persaingan akan kesempatan kerja juga semakin ketat, sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat .

Keberadaan Kota Denpasar yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah di sekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman/perumahan kumuh di berbagai kawasan. Berdasarkan hasil survey pendapatan perumahan kumuh yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar pada TA 2011, diperoleh data keberadaan kawasan kumuh di Kota Denpasar di 4 Kecamatan sebanyak 70 titik kumuh. Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh perlu disusun program perbaikan/penataan titik kumuh secara bertahap dan dialokasikan APBD kota ataupun diusulkan kepada APBD Propinsi dan APBN setiap tahun agar dapat dituntaskan segera.

Untuk rumah tidak layak bagi warga yang sudah terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar mulai tahun 2010 sudah melakukan / memberikan bantuan perbaikan RTM dengan rincian sebagai berikut:

1. TA 2010 jumlah bantuan RTM	= 190 unit
2. TA 2011 induk jumlah bantuan RTM	= 80 unit
3. TA 2011 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 26 unit
4. TA 2012 Induk jumlah bantuan RTM	= 28 unit
5. TA 2012 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 28 unit
6. TA 2013 Induk jumlah bantuan RTM	= 80 unit
7. TA 2013 Perubahan jumlah bantuan RTM	= 27 unit

Bantuan perbaikan rumah RTM tetap diusulkan dapat berlanjut sampai tuntas, fasilitas umum perumahan sejak Tahun 2008 penyelenggaraanya di koordinir oleh Dinas Perijinan Fasilitas umum dikelola bersama fasilitas sosial sekarang dinamakan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Dinas Tata Ruang dan perumahan, Kota Denpasar turut dalam unsur dalam Tim PSU tersebut.

Peruntukan PSU antara lainnya untuk jalan beserta utilitasnya, taman, tempat bermain, Balai Banjar dan Pos jaga. Diharapkan pengarahannya dan pemanfaatan fasilitas umum perumahan dapat diselenggarakan secara optimal sesuai peruntukannya pada masing-masing kawasan sehingga manfaat PSU tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat terutama warga di kawasan tersebut.

## **5. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, regional dan nasional.



Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana pembangunan. Selanjutnya adalah pelibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).

Perencanaan menentukan arah yang hendak ditempuh di masa depan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas atau mutu dari perencanaan. Kualitas suatu perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangatlah bergantung pada keakuratan data masukan yang akan diolah. Kenyataannya, sering terjadi ketidakakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data disebabkan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas yang berimplikasi pada kualitas perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*inpact*).



## 6. URUSAN PERHUBUNGAN

### DINAS PERHUBUNGAN

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun mulai tahun 2010-2014 pelayanan system transportasi kawasan sarbagita akan dilaksanakan diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transport yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dimana didalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mengingat dalam kegiatan perekonomian Kota Denpasar, masih bertumpu pada potensi pariwisata dan pertanian dalam arti luas, maka pembangunan transportasi diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana sebagai satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terintegrasi, untuk menunjang kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa dari sentra-sentra produksi ke daerah konsumen. Namun demikian, oleh karena keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan merupakan aspek yang sangat rentan terhadap perkembangan pariwisata, maka untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial di masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan memperhatikan posisi penting bandar udara yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung tata ruang wilayah.

Rincian data penumpang dan barang keluar-masuk Kota Denpasar, terlihat pada tabel berikut ini :

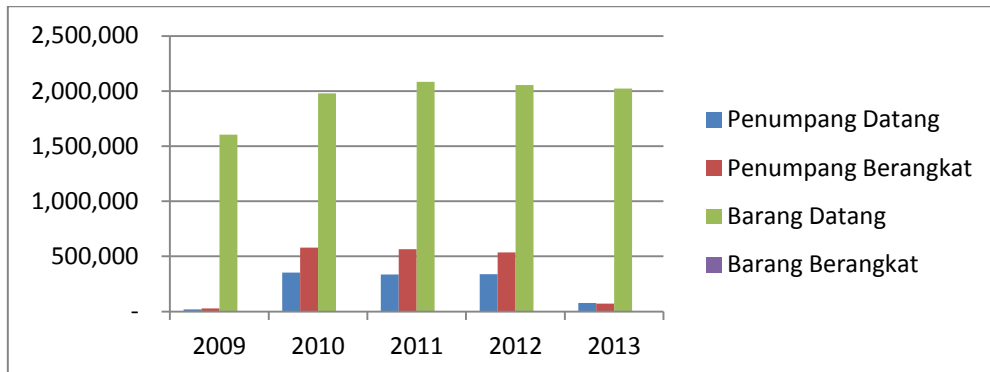
Tabel 2.33  
Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar  
Tahun 2009-2013

No	Muatan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Penumpang					
	- Datang	20.791	352.090	337.203	338.170	78.046
	- Berangkat	28.561	580.088	565.268	536.584	73.022
	<b>Jumlah</b>	<b>49.352</b>	<b>932.178</b>	<b>902.471</b>	<b>874.754</b>	<b>151.068</b>
2	Barang (Ton)					
	- Datang	1.603.560	1.978.352	2.083.593	2.053.807	2.022.821
	- Berangkat	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.603.560</b>	<b>1.603.560</b>	<b>2.083.593</b>	<b>2.053.807</b>	<b>2.022.821</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar



Gambar 2.16  
Jumlah Penumpang dan Barang Keluar-Masuk di Kota Denpasar  
Tahun 2009-2013



Tabel 2.34  
Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2009 s/d 2013

No	Angkutan Umum	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%
1	Mobil Penumpang Umum	3.829	5.439	142	4.508	5.335	118,3	5.011	6.233	124,3	9.359	8.477	90,5	10.512	8.110	77,15
2	Mobil Bus	1.359	2.378	174,9	1.576	2.342	148,6	1.548	2.423	156,5	2.065	2.492	120,6	2.367	2.379	100,13
3	Mobil Barang	19.892	34.427	173	23.013	38.256	166,2	24.804	41.610	167,8	28.403	44.158	155,4	31.346	42.274	134,86
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.080</b>	<b>42.244</b>	<b>150</b>	<b>29.097</b>	<b>45.933</b>	<b>157,9</b>	<b>31.363</b>	<b>50.266</b>	<b>160,3</b>	<b>39.827</b>	<b>55.127</b>	<b>138,4</b>	<b>44.225</b>	<b>52.763</b>	<b>119,3</b>

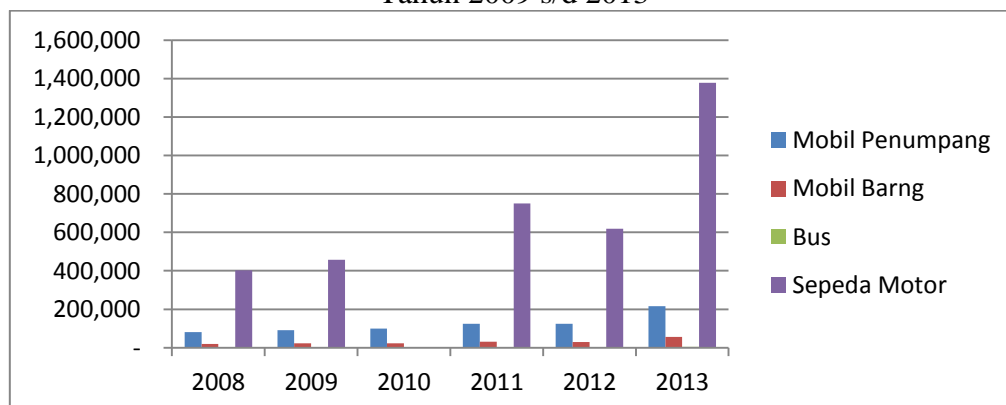
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Tabel 2.35  
Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar  
Tahun 2009 s/d 2013

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Mobil Penumpang	81.256	91.434	98.893	124.931	124.667	215.854
2	Mobil Barang	20.199	22.155	23.196	31.952	29.606	56.425
3	Bus	1.376	1.610	1.604	2.454	2.156	4.198
4	Sepeda Motor	402.795	457.772	492.285	749.802	618.853	1.377.836

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Gambar 2.17  
Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar  
Tahun 2009 s/d 2013



Tabel 2.36  
Kunjungan Pelayaran di Pelabuhan Benoa  
Tahun 2008-2013

No	Tahun	Angkutan Laut Dalam Negeri	Angkutan Laut Luar Negeri	Angkutan Laut Khusus		Pelayaran Rakyat
				Perikanan	Pariwisata	
1	2008	1.606	435	2.683	4.816	163
2	2009	1.188	328	3.249	4.519	85
3	2010	1.206	321	3.275	5.429	54
4	2011	1.399	306	2.893	4.931	42
5	2012	1.159	354	3.105	4.669	24
6	2013	1.318	334	3.013	4.476	16

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Denpasar*

Tabel 2.37  
Jumlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tahun 2013

No	Simpang/Ruas	Terpasang	
		Baik	Rusak
1	Simpang 4/Lebih	47	0
2	Simpang 3	18	0
3	Jumlah titik di ruas & simpang untuk Pelican Cross	2	0
4	Jumlah titik di ruas jalan untuk Lampu Kuning/Warning Light	19	0
	<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>0</b>

**Rambu-rambu yang sudah terpasang s/d Bulan Juni Tahun 2014**

- Jumlah Rambu yang terpasang : 2.787 Unit
- Traffic Light : 65 Unit
- Warning Light : 19 Unit
- Marka Jalan : 405.000 Meter
- Halte : 14 Unit

(6 Unit dari APBD Kota Denpasar dan sisanya 8 Unit merupakan Milik Provinsi yang terpasang di wilayah Kota Denpasar)

**Type Terminal di Kota Denpasar**

1. Terminal Penumpang :
  - Terminal UBUNG, Terminal Penumpang Type B
  - Terminal KRENENG, Terminal Penumpang Type C
  - Terminal TEGAL, Terminal Penumpang Type C
2. Terminal Barang : 1



## 7. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

### A. BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik.

Sebagai kota metropolitan Denpasar dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif di sektor perdagangan, transportasi menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam. Isu lingkungan sudah menjadi isu dunia dan menjadi kewajiban daerah untuk menanganinya secara terintegrasi. Isu lingkungan itu menyangkut alih fungsi lahan, masalah sumber daya air, abrasi pantai, pencemaran limbah dan sampah, degradasi fauna dan flora, degradasi investasi dan munculnya masalah sosial.

Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga tercemar berat.

Kualitas udara juga menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif (industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang disebabkan oleh aktifitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara), serta emisi gas buang kendaraan bermotor.

Denpasar sebagai Kota tujuan wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan pariwisata banyak pula memanfaatkan lahan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata seperti alih fungsi hutan mangrove, eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan. Pesatnya pembangunan fisik di Kota Denpasar dan didaerah pantai menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan air, maka tidak dapat dihindari terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya air yang berakibat meluasnya interusi air laut di Kota Denpasar. Akibat lain dari pembangunan ini adalah tingginya urbanisasi yang berakibat pula tingginya produksi limbah baik limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan oleh aktifitas penduduk Kota Denpasar. Drainase sebagai salah satu komponen penanggulangan limbah fungsinya masih belum optimal dibandingkan beban limbah yang harus dialirkannya.

Denpasar sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan banyak mempunyai usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, banyak usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun dan limbah-limbah lainnya yang mencemari lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam pengelolaan lingkungan dibutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan tanggungjawab semua pihak. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang ditanggung negara-negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahun 2020.



Kota Denpasar harus segera melakukan upaya-upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain “ Mengubah Krisis Menjadi Peluang”.

#### 1) Pencemaran Udara

Pencemaran udara dibedakan menjadi dua yaitu, Pencemaran primer dan Pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi Pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Pencemaran udara Ambien pada umumnya disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan, Industri, pembakaran sampah yang tidak sempurna dan aktivitas lainnya yang bersifat insidental. Untuk wilayah Kota Denpasar pencemaran udara yang paling utama disebabkan oleh asap kendaraan bermotor karena di wilayah Kota Denpasar tidak ada usaha industri yang secara signifikan mengakibatkan pencemaran udara.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkecil terjadinya pencemaran udara ini, memperbanyak penanaman pohon penghijauan, penggunaan bahan bakar rendah timbal dan produksi kendaraan yang ramah lingkungan, sesuai standar ISO namun belum sepenuhnya bisa diikuti oleh kesadaran masyarakat karena masih beroperasinya mesin-mesin berteknologi lama yang tidak laik jalan dan munculnya usaha-usaha baru yang masih menggunakan teknologi yang potensial mencemari udara. Upaya lainnya program langit biru yaitu menekan emisi gas buang melalui uji emisi kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Program pembangunan taman kota dan penghijauan juga memberikan manfaat terhadap pengendalian kualitas udara di perkotaan. Taman dan penghijauan di kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang dapat memperbaiki kualitas udara dan mengendalikan iklim mikro disekitarnya.

#### 2) Polusi Lingkungan

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup bersih. Hal ini dapat dijadikan indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan disebabkan oleh dua faktor antara lain :

1. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan secara alamiah terjadi disebabkan karena kegiatan dari alam sendiri.
2. Polusi lingkungan yang terjadi karena ulah manusia, baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan dalam bentuk perusahaan.

### **B. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga dalam penanganan lebih lanjut memerlukan kerjasama serta koordinasi yang baik antar seluruh sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kesadaran masyarakat memang sudah mulai



nampak namun baru sebatas skala kecil di tingkat rumah tangga. Hal ini terbukti rumah memang bersih dan bahkan bebas dari sampah ternyata di luar rumah sampah belum dikelola dengan baik sehingga sering ditemukan lahan kosong, selokan, sungai dan tempat lainnya menjadi sasaran TPS liar. Dapat disimpulkan bahwa pada bagian hulu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah saja. Sedangkan rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah.

Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana.

Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan kebersihan masih belum mencukupi jumlah dan kualitasnya, nantinya perlu diadakan peremajaan sehingga kinerja dapat meningkat. Kondisi prasarana dan sarana pada tahun 2013 meliputi :

1. Dump truck : 89 unit termasuk 20 unit pengadaan 2013 untuk di operasikan tahun 2014
2. Truk armroll : 20 unit termasuk 6 unit pengadaan 2013 untuk di operasikan tahun 2014
3. Kontainer : 110 unit termasuk 84 unit kondisi baik, 16 unit rusak, 10 unit container terpilah pengadaan 2013 untuk di operasikan tahun 2014
4. Transfer depo : 7 unit
5. Convektor truk : 11 unit termasuk 8 unit pengadaan tahun 2013 untuk dioperasikan tahun 2014
6. Sweeper truk : 1 unit

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelola manajemen dan aparat pelaksana atau tenaga lapangan. Aparat pengelola manajemen kebersihan adalah para pejabat struktural yang menduduki jabatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada tahun 2013 jumlah tenaga lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 1.472 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi serta komponen lainnya.

Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. TPA (Tempat pemrosesan Akhir) overload/penyempitan lahan pembuangan serta sulitnya/terbatasnya mendapatkan lahan untuk pembuatan TPS/Depo

Pada tahun 2013 pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar masih dilakukan dengan cara konvensional yakni proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah di badan jalan dilakukan melalui kegiatan penyapuan jalan. Penyapuan jalan yang dilakukan DKP Kota Denpasar telah mencakup 80% dari seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Sedangkan



pengumpulan sampah masih dilakukan di transfer depo dan kontainer yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh DKP Kota Denpasar mencapai 74% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 13% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 7% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 6% dibuang di tanah masyarakat yang kosong (tegalan).

Berdasarkan kondisi terkini di Kota Denpasar dalam bidang kebersihan, maka isu yang mendesak adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diamanatkan

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu :

- Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bagian hulu,
- Rendahnya peranserta masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara 3R (reduse, reuse, recycle)
- Kurangnya partisipasi masyarakat swasta dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Kebersihan dan keindahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena kedua hal itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan indah.

Program pengelolaan kebersihan kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran adalah mengurangi volume tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan volume sampah yang masuk ke TPA.

Tabel 2.38

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk tahun 2009 s/d 2013

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah TPS/Kontainer	59	59	83	84	100
2	Jumlah daya tampung TPS	1,092	1,092	1,682	1,688	1,784
3	Jumlah penduduk	649,762	788,589	804,905	830,662	833,900
4	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

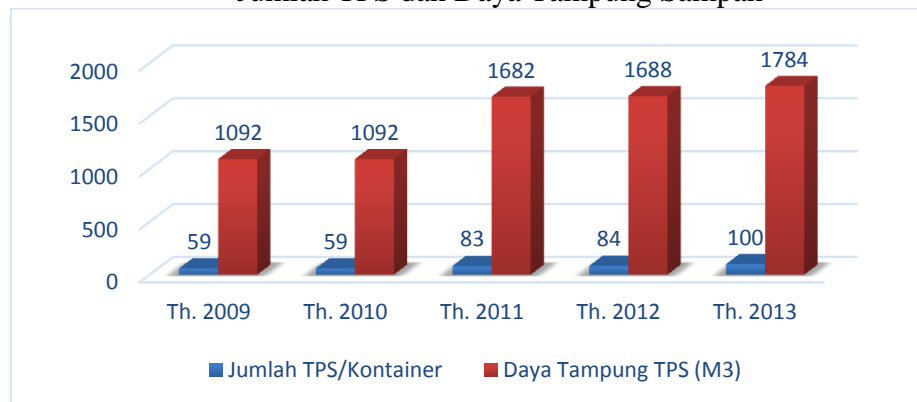
Pada tahun 2009 rasio pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk hanya dapat menampung 2 liter per orang dari produksi sampah yang dihasilkan per orang 4 liter sehingga hanya 50% rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk. Kemudian untuk tahun 2010 terjadi penurunan akibat kenaikan jumlah penduduk, sehingga rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk hanya bisa 1 liter per orang dengan prakiraan produksi sampah per orang 4 liter per hari. Untuk jumlah penduduk tahun 2011 di perkirakan laju pertumbuhan penduduk 3,2% sehingga diperkirakan jumlah penduduk meningkat dan rasio daya tampung TPS hanya bisa menampung 50% dari produksi sampah penduduk, begitu pula untuk tahun 2012 dan tahun 2013.



Tabel 2.39  
Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah daya tampung (M <sup>3</sup> )	
1	2	3	4	5	6=5/3
1	Kecamatan Denpasar Timur	145,200	25	298	0.002
2	Kecamatan Denpasar Barat	242,100	28	524	0.002
3	Kecamatan Denpasar Selatan	261,000	29	538	0.002
4	Kecamatan Denpasar Utara	185,600	18	424	0.002

Gambar 2.18  
Jumlah TPS dan Daya Tampung Sampah



Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari masing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari.

Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Propinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2013 jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 833.900 orang. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.335 m<sup>3</sup> per hari atau setara dengan 667 ton sampah.

Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah.

Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak di lapangan umum khususnya di Lapangan Puputan, median jalan dan persimpangan jalan serta perindangan kota.

Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana



pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang.

Permasalahan yang dihadapi dibidang pertamanan dalam upaya mempercantik wajah kota, adalah sebagai berikut :

- Pada penataan taman, lahan untuk taman kota terbatas dan sulit dilakukan perluasan sehingga perlu ditingkatkan kualitas taman. Luas taman yang dipelihara tahun 2013 sekitar 139.513 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 59.353 m<sup>2</sup> Taman Median, 36.610 m<sup>2</sup> Taman Lapangan dan 43.550 m<sup>2</sup> Taman Telajakan.
- Pada bidang penghijauan dan perindangan pohon, saat ini jumlah pohon perindang di Kota Denpasar mencapai 29.023 pohon. Jumlah ini masih kurang dan terancam akan berkurang karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menebang pohon dan adanya pohon tumbang akibat bencana alam.
- Dalam bidang LPJU permintaan masyarakat terhadap bantuan pemasangan lampu penerangan untuk prasarana sosial seperti pura dan jalan lingkungan sangat banyak dan perlu di prioritaskan pemenuhannya.

## 8. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan dibidang kependudukan. Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan proses cepat serta terkendalinya mobilitas penduduk.

Dalam kaitannya dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ini, terdapat dua sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kota Denpasar, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Kedua sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### A. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

##### 1. Penduduk ber-KTP

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP.

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	637.781	629.588	679.979	708.488
Penduduk yang wajib ber KTP	460.233	562.671	496.579	512.995
Penduduk ber KTP	403.182	89.009	183.402	303.220
Persentase b/c	87,60%	15,82%	36,93%	59,11%



## 2. Penduduk ber-KK

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada. Jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga pada tahun 2013 sebanyak 183.286 KK.

## 3. Bayi lahir ber-Akte Kelahiran

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk baru lahir yang telah memiliki akte kelahiran dari seluruh penduduk yang baru lahir.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah yang memiliki akte kelahiran sebanyak 22.352 kelahiran pada tahun 2011, 25.236 kelahiran pada tahun 2012, 60.459 pada tahun 2013

## B. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan diukur berdasarkan kecepatan waktu pelayanan pengurusan KTP, KK, akte kelahiran dan akte kematian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian pengurusan KTP.

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus KTP mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya KTP. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan KTP adalah 15 menit.

### 2. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Kartu Keluarga.

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Kartu Keluarga, mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya Kartu Keluarga, dengan asumsi bahwa seluruh kelengkapan pendukungnya sudah memenuhi syarat. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan KK adalah 7 (tujuh) hari.

### 3. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Akte Kelahiran.

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Akte Kelahiran, mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya Akte kelahiran. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan Akte Kelahiran adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPD OA) tinggal terbatas dan Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN), SKPD OA tinggal tetap, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) OA Terbatas, SKPLN WNI, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Permohonan Menjadi Penduduk (SPMP);



2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil meliputi pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan akte perkawinan;
3. Pelayanan informasi publik bidang kependudukan;

Kota Denpasar sebagai Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga penduduk berduyun-duyun datang dengan berbagai motivasi, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan untuk berjuang mengadu nasib dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini memicu pertumbuhan penduduk yang besar sebagai sumbangan dari migrasi penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi.

Pengendalian penduduk ini mutlak perlu dilakukan guna menghindari ekseseks negatif yang dapat menghambat upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Potensi Kearifan lokal perlu diberdayakan guna membantu pengendalian pertumbuhan dengan sistem dan pola yang benar.

### 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan

Berdasarkan angka statistik bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan terus mengalami peningkatan . Laju perkembangan penduduk yang diakibatkan migrasi penduduk perlu ditekan dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sehingga mereka yang memenuhi kelengkapan administrasi dan mempunyai tujuan, ketrampilan dan keahlian tertentu yang direkomendasikan menetap di Kota Denpasar.

Penduduk Kota Denpasar pada Tahun 2013 berjumlah 708.488 jiwa, . Kecamatan yang paling banyak Penduduknya adalah Kecamatan Denpasar Barat yaitu sebanyak 204.263 jiwa atau (28,83%) dari seluruh Penduduk Denpasar, kemudian Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 192.893 jiwa ( 27,23%), di Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 177.381 jiwa (25,04%) dan di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 133.951 jiwa (18,91%)

Tabel 2.40  
Distribusi Penduduk tahun 2013

No	Uraian	Distribusi Penduduk tahun 2013
1	Denpasar Barat	204.777 jiwa
2	Denpasar Timur	134.275 jiwa
3	Denpasar Selatan	193.277 jiwa
4	Denpasar Utara	177.828 jiwa

### 2. Kepadatan

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2012 telah mencapai 680.919 jiwa /km<sup>2</sup>, sedangkan kalau dilihat di masing – masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Denpasar Barat sebesar 7.541 jiwa/km<sup>2</sup>
- b. Kecamatan Denpasar Timur sebesar 5.280 jiwa/km<sup>2</sup>
- c. Kecamatan Denpasar Utara sebesar 5.159 jiwa/km<sup>2</sup>
- d. Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 3.423 jiwa/km<sup>2</sup>



### 3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Piramida penduduk merupakan grafik yang menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Denpasar tahun 2013 dimana penduduk kelompok umur 0 – 14 tahun berjumlah 157.424 orang atau 22,22%, penduduk yang tergolong dalam kelompok umur 15 – 49 tahun berjumlah 423.808 orang atau 59,82%, sedangkan penduduk Kota Denpasar yang tergolong kelompok umur 50 tahun keatas berjumlah 127.256 orang atau 18.07%. Bentuk piramida penduduk Kota Denpasar juga menandakan telah terjadinya migrasi penduduk ke Kota Denpasar dan didominasi oleh mereka yang tergolong dalam usia produktif.

## 9. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

### **BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Sampai saat ini permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan masih tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan yang serius, lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam Millenium Summit yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8 goal dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015 yang meliputi :

1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim
2. Mencapai pendidikan dasar secara universal
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Memperbaiki kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan
8. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan

Dari ke 8 tujuan tersebut di atas, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi goal ke tiga sehingga hal ini cukup menjadi isu prioritas. Ini berarti bahwa setiap Negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut harus mampu menanggulangi isu tersebut di tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pendeklarasian kesepakatan tersebut berarti juga dituntut untuk mampu menangani 8 goal yang salah satunya adalah mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam untuk bisa mencapai target ini.

Untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah perkara mudah mengingat hal ini berkaitan erat dengan konstruksi social budaya yang sudah tertanam sejak lahirnya adam dan hawa di muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, karena segala sesuatu bentukan manusia tidak ada yang bersifat statis tetapi semua bisa diubah dan diperbaiki. Tentu hal ini memerlukan komitmen dan perjuangan yang serius dan konfrehensif, untuk itu sangat diperlukan adanya dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait.

Secara historis, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 70-an yang diawali dengan dengan dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi Kementrian Negara Pemeberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika



dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti walaupun ia telah tiada, cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia lainnya yang memiliki visi serupa dengan Kartini seperti R.A Sutinah Joyopranoto, Rr. Rukmini dan lain-lain.

Wujud pergerakan perempuan Indonesia pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum dan lain-lain. Pada dekade berikutnya organisasi perempuan ini menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta dan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus berlanjut. Melalui lembaga kementerian yang sudah terbentuk di tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah *women in development/WID* karena saat itu disadari bahwa perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termajinalkan perlu diikutsertakan dalam pembangunan.

Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan gender dan pembangunan (*gender and development/GAD*). Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan (Nugroho, 2008; 140). Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan pada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata.

Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan seperti tersebut diatas, nampaknya juga masih belum efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000 bersamaan dengan dicetuskannya kesepakatan MDGs, pemerintah Indonesia mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dilegitimit melalui inpres No. 9/2000 tentang pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender/gender mainstreaming. Strategi ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender dalam setiap perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi ini pada dasarnya ditujukan kepada para penyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga mereka dapat dan mampu menyusun program/kegiatan yang *responsive gender*.

Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun program adalah memahami teknik analisa gender (TAG). Analisa gender merupakan perangkat analisa yang dapat membantu para perencana dalam menganalisa suatu kebijakan/program apakah sudah *responsive gender* atau belum. Dengan menggunakan analisa gender bisa diidentifikasi dalam hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam akses, partisipasi, control atau manfaat. Juga kesenjangan itu sudah bisa



diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran.

Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknis analisis gender adalah eksistensi data terpilih menurut jenis kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan yang responsive gender. Oleh karena itu, penyusunan propil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting.

## 10. URUSAN KETENAGAKERJAAN

### DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan nasional memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Sosial (PMKS).

<b>KEGIATAN PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>						
DINSOSNAKER TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN BERUPA PMKS SEBAGAI BERIKUT:						
NO	KEGIATAN	2009	2010	2011	2012	2013
PMKS						
1	Peringatan HAN, HALUN	500 org	500	400	330	330
2	Penyandang cacat yang mendapat pelayanan dan bantuan sosial	142 org	302 org	904 org	294 org	96 org
3	Penyandang cacat yang diberikan pelatihan	40 org	40 org	30 org	40 org	4 org
4	Gepeng yang dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya	266 org	198 org	216 org	160 org	201 org
5	Keluarga miskin yang memperoleh bimbingan dan binaan sosial melalui KUBE	90 kk	80 kk	40 kk	40 kk	30 kk
6	Masyarakat yang memperoleh bimbingan penanggulangan bencana	120 org	120 org	30 org	40 org	40 org
7	Korban bencana yang mendapat bantuan sosial	175 kk	400 kk	320 kk	330 kk	360 kk
8	Jumlah anak nakal yang mendapat bimbingan sosial	20 org	20 org	10 org	7 org	5 org



	pelatihan keterampilan & tirtayatra					
	PSKS					
1	PSM yang dibina	15 PSM	5	5	5	5
2	PSM yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS)	15	5	5	5	5
3	Organisasi sosial yang mendapat bantuan (PWS, PWRI, LVRI, KKKS)	2	3	4	4	4
4	Karang taruna yang dibina dalam rangka lomba & yang diberikan motivasi	9	9	5	5	5
5	Karang taruna yang berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial (UKS)	5	5	5	5	5
6	Panti yang dibina	15	15	15	15	15

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Tabel 2.41  
Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2009 s.d. 2013

NO	Uraian	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Pekerja	331.638	422.780	439.150	418.839	438.687
2.	Jumlah Pencari Kerja	5.323	7.087	4.850	5.405	3.301
3.	Jumlah Angkatan Kerja	346.231	452.508	455.990	429.184	450.579
4.	Prosentase Pekerja dengan Penduduk	51,27	66.28	69.75	61.60	61.92

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar

Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan disebabkan semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Hal ini disebabkan oleh dampak



krisis yang berkepanjangan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha/ lapangan kerja.

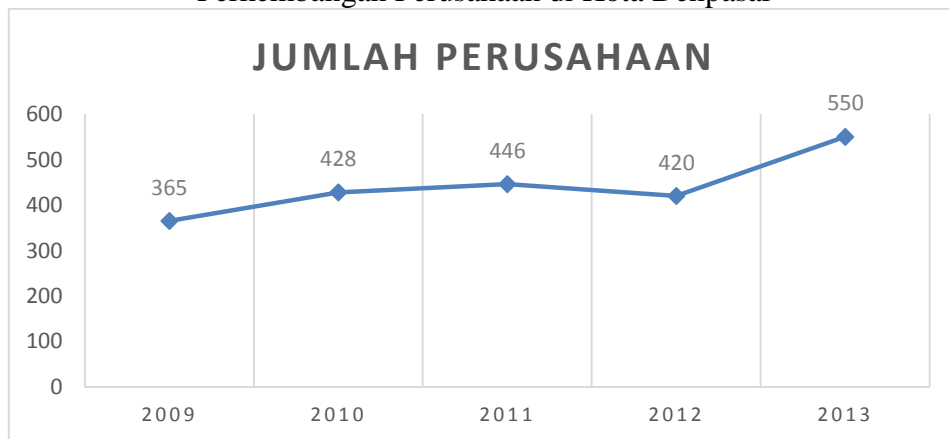
Pembangunan dan pengembangan sektor tenaga kerja antara lain mempunyai tujuan untuk terciptanya pembinaan dan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja, perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja, menciptakan ketenangan berusaha melalui pembinaan dan pembentukan sarana dan Hubungan Industrial seras Pengawasan ketenagakerjaan guna meningkatkan kesadaran pekerja dan pengusaha dalam mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Tabel 2.42  
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2009 s.d. 2013

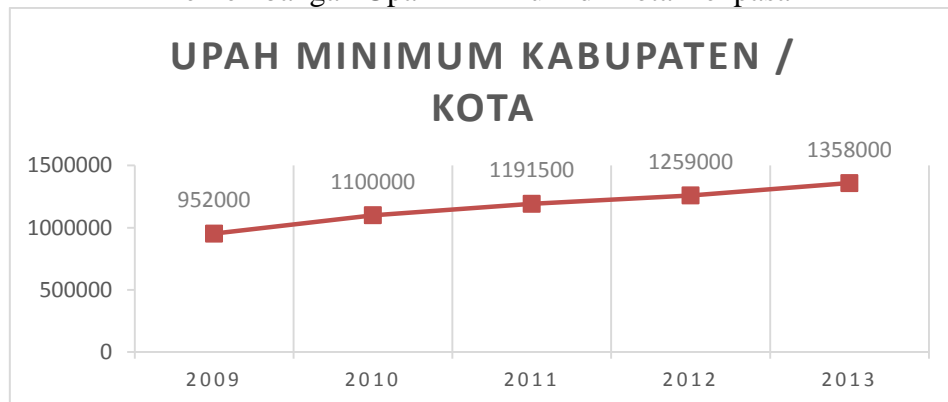
NO	Uraian	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Perusahaan	365	428	446	420	550
2.	Upah Minimum Kabupaten / Kota	952.000	1.100.000	1.191.500	1.259.000	1.358.000

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar

Gambar 2.19  
Perkembangan Perusahaan di Kota Denpasar



Gambar 2.20  
Perkembangan Upah Minimum di Kota Denpasar



Data jumlah perusahaan di Kota Denpasar yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar bersumber dari wajib lapor ketenagakerjaan. Adanya peningkatan data perusahaan yang tercatat, mengidentifikasi adanya kesadaran dari perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya, walaupun diakui data tersebut masih sangat minim dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data jumlah perusahaan yang lebih akurat dapat juga dilakukan penyanding dengan Dinas / Instansi lain seperti Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Statistik Kota Denpasar.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan Pengupahan dari masing – masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek – aspek ekonomi lainnya. UMK merupakan upah minimum ( gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UMK Kota Denpasar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan.

## **11. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

### **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Seperti diketahui, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Dilihat dari cirri koperasi yang seperti itu, terkandung arti bahwa, kegiatan koperasi yang dijalankan para pengurusnya, tidak bisa terlepas dari aktifitas dan keperluan para anggotanya. Karena dengan melaksanakan konsep ini koperasi akan bisa berjalan dengan berkesinambungan.

Sejalan dengan perkembangan jaman dan juga kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat disekitar lingkungan koperasi, program yang bisa dijalankan tidak hanya simpan pinjam. Peluang untuk mengembangkan program baru sesuai dengan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi pilihan tepat untuk mencapai tujuan dari koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Munculnya koperasi banjar disejumlah tempat di Denpasar, merupakan sebuah terobosan dari pada pengelola koperasi bersangkutan. Keistimewaan koperasi banjar ini, basis anggotanya tentunya saja merupakan warga setempat. Demikian pula program yang bisa diluncurkan juga sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi koperasi dimana mereka berada. Mewujudkan koperasi berkelanjutan yang berbasis banjar dengan bermodal budaya dan modal social tersebut secara langsung maupun tak langsung mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan ekonomi berbasis budaya bali. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah sekitarnya. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka factor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan dilapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:

1. Potensi masyarakat
2. Pengusaha
3. Lembaga perkreditan
4. Instansi terkait
5. Koperasi sebagai badan usaha



Meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam tatanan ekonomi kerakyatan berbasis budaya unggulan yang bertumpu pada mekanisme pasar dalam menunjang Denpasar sebagai Kota budaya, telah menjadi Visi dinas koperasi dalam mencapai tujuan pembangunan koperasi. Visi ini dijabarkan melalui misi menyelenggarakan lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif serta berwawasan lingkungan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan baru berbasis ilmu pengetahuan yang berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif. Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif sehingga memberikan nilai tambah usaha ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

Tabel 2.43  
Rincian keragaan koperasi dari tahun 2009-2013

No	Uraian	Satuan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Jumlah Koperasi	Unit	776	874	936	976	1.016
2	Jumlah Anggota	Orang	113.473	117.120	121.662	125.570	330.575
	Laki - laki	Orang	77.749	79.975	83.114	79.313	252.362
	Perempuan	Orang	35.724	37.143	38.548	46.257	78.213
3	Pelaksanaan RAT	Unit	557	557	557	749	883
4	Koperasi Aktif	Unit	653	751	835	870	913
5	Koperasi Tidak Aktif	Unit	123	123	101	103	103
6	Koperasi Sehat	unit	53	53	57	22	25
7	Koperasi Cukup Sehat	unit	76	76	69	101	99
8	Koperasi Kurang sehat	unit	16	16	25	107	18
9	Koperasi tidak sehat	unit	55	55	6	0	4
10	Koperasi sangat tidak sehat	Unit	0	0	0	0	0
11	Permodalan						
	Modal Sendiri	Rp.	172.197.962.500	177.049.962.500	220.312.962.500	236.975.975.543	232.581.179.783
	Modal Luar	Rp.	716.229.775.000	718.024.775.000	718.024.775.000	718.024.775.000	753.926.013.750
12	Total Asset	Rp.	888.427.737.500	895.074.737.500	938.337.737.500	955.000.750.543	986.507.193.533
13	Volume Usaha	Rp.	1.718.714.367.775	1.725.879.367.775	1.727.630.367.775	1.734.187.367.775	1.994.315.472.941
14	SHU	Rp.	63.517.136.510	63.517.139.953	63.517.136.953	63.517.136.953	73.044.707.496
15	Jumlah Karyawan	Orang	2.632	2.934	3.225	3.339	3.367
16	Manager	Orang	246	247	247	247	266

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Dari hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan terlihat perkembangan yang baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 976 unit di tahun 2012 menjadi 1.016 unit di tahun 2013 dan di ikuti dengan jumlah modal sendiri perdesember 2012 sebesar Rp. 236.975.975.543,- menjadi Rp. 232.581.179.783,- ditahun 2013. Modal luar per desember 2012 Rp. 718.024.775.000,- menjadi Rp. 753.926.013.750,- Di tahun 2013. Total asset tahun 2013 sebesar Rp. 986.507.193.533,- bila dilihat dari jumlah anggota koperasi, jumlahnya meningkat yaitu 125.570 orang di tahun 2012 menjadi 330.575 orang di tahun 2013.

Mengacu pada manfaat koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang di kelola.

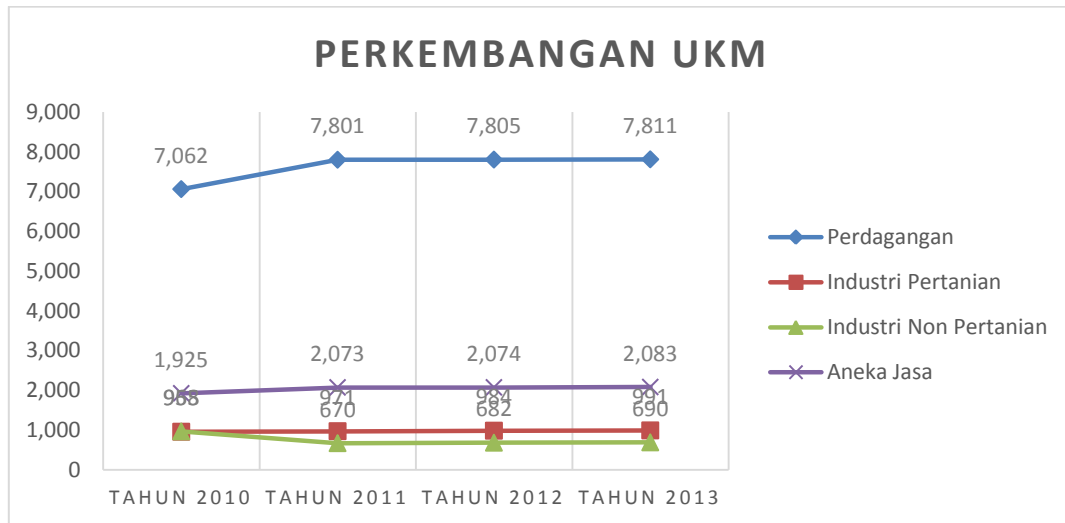


Tabel 2.44  
Perkembangan UMKM dari tahun 2010 – 2013

No	Klasifikasi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Perdagangan	7,062	7,801	7,805	7,811
2	Industri Pertanian	958	971	984	991
3	Industri Non Pertanian	965	670	682	690
4	Aneka Jasa	1,925	2,073	2,074	2,083
	<b>JUMLAH</b>	<b>10,910</b>	<b>11,515</b>	<b>11,545</b>	<b>11,575</b>

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Gambar 2.21



Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang trampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Selain sulitnya memperoleh bahan baku yang murah dan belum terjalinnnya kemitraan dengan perusahaan / BUMN dalam pengembangan pasar. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UKM terutama kredit investasi.

## 12. URUSAN KEBUDAYAAN

### DINAS KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan sebuah komponen yang menciptakan pengaruh pada pola pikir dan pengetahuan masyarakat. Di dalamnya terdapat sistem atau gagasan yang berasal dari pikiran manusia, yang berasal dari perilaku keseharian masyarakat dan bersifat abstrak. Sedangkan untuk mewujudkan kebudayaan itu sendiri dapat dilihat dari benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Kota Denpasar sangat peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan, upaya pelestarian terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya dilakukan secara terus menerus baik dalam bentuk sosialisasi nilai budaya, pengembangan budaya dan pelestarian nilai dan cagar budaya. Bali merupakan sebuah pulau kecil yang terbatas dalam potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk namun memiliki potensi kebudayaan yang besar. Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan



identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala nasional, kebudayaan Bali ikut berperan dalam membangun dan memperkaya kebudayaan nasional, dalam skala internasional kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu identitas warisan budaya dunia. Dalam keberadaannya ini kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik kearah kemajuan. Kemajuan pembangunan Kota Denpasar yang juga sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian secara sosio-kultural Denpasar telah berkembang menjadi daerah heterogen dengan berbagai konsekuensi permasalahannya. Dalam penanganan masalah tersebut disamping melakukan pendekatan formal struktural, juga harus menghormati kearifan lokal yang ada, seperti menempatkan partisipasi lembaga tradisional yakni Desa Pekraman, Subak, Banjar Adat dan Sekee Teruna secara proporsional dalam efektifitas program dan pelestarian budaya di sisi lainnya. Serta tetap lestarikan kearifan lokal yang ada sebagai identitas sosio kultural Kota Denpasar mewujudkan pulau Bali yang metaksu.

Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, sebagai konsekuensi logis menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan berdampak terhadap perkembangan Kota Denpasar khususnya terhadap kebudayaan Denpasar. Karena Denpasar didatangi kaum urban menjadikan Kota Denpasar sebagai kota yang dihuni dari berbagai etnis dengan beragam kebudayaan berkembang di Kota Denpasar.

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Disamping itu pengembangan seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata. Dengan adanya misi untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota Budaya maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Potensi seni dan budaya di Kota Denpasar tersebar di setiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan pelestariannya dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar mengangkat potensi budaya unggulan yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan budaya dan adat setempat dengan kemas pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar perlahan tapi pasti mulai mengangkat potensi budaya unggulan tersebut melalui program yang berkelanjutan, seperti :

1. Pesta Kesenian Bali
2. Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik
3. Festival ogoh-ogoh
4. Pementasan rutin sanggar setiap hari Sabtu dan Minggu dilapangan Puputan Badung
5. Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari – hari tertentu di Pura Jagatnatha
6. Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit Puputan Badung
7. Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari sebagai puncak kesenian di Kota Denpasar di setiap akhir tahun
8. Kaderisasi Pelestarian Budaya
9. Misi Kesenian ke Luar Daerah
10. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali



#### 11. Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan

Subak dan desa pekraman sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religious perlu tetap dipertahankan keberadaannya dan tingkatkan keberadaannya. Jumlah subak di Kota Denpasar sampai saat ini 36 subak yang tidak mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun dilihat dari wilayah garapannya mengalami penyusutan setiap tahunnya, sedangkan untuk Desa Pekraman sendiri berjumlah 35 Desa Pekraman.

Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional: menggali dan memelihara serta melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup dimasyarakat; menyelamatkan, mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.

### 13. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

#### A. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kehidupan pariwisata Kota Denpasar di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menjadikan Denpasar sebagai daerah yang terbuka dari berbagai interaksi, baik individu, kelompok, budaya kepentingan dan berbagai organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosbud serta keamanan dan ketertiban. Kondisi diatas menjadi tingkat heterogitas yang pada hakekatnya mengandung berbagai perbedaan yang mengandung potensi konflik. Heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan dapat menjadi potensi pembangunan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan terarah akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah kepada konplik sosial di masyarakat.

Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan yang bersih (good governance), berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan persyaratan terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Kesbangpol perlu terus menerus dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan KesbangPol yang perlu mendapat prioritas adalah :

- a) Peningkatan jumlah aparatur pelaksana tugas deteksi dini menyangkut ketertiban dan ketentraman di wilayah Kota Denpasar
- b) Sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas operasional untuk operasi deteksi dini
- c) Pembinaan dan pengawasan lebih lanjut organisasi politik, organisasi masyarakat/LSM, dan organisasi lainnya untuk tetap teguh dalam kerangka NKRI dan memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan kemasyarakatan, tokoh masyarakat, generasi muda untuk tetap memahami nilai-nilai kebangsaan

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui polisi pamong praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah.



Sedangkan di bidang penanganan konflik, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar merupakan tugas dari Badan KesbangPol Kota Denpasar sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, tentram dan damai untuk menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.

## **B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pegawai pelaksanaan undang-undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator persentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah serta dalam penyediaan perangkat umum yang diperlukan. Sasarn dari program ini adalah meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indicator presentase penertiban terhadap pelanggaran Perda.

Pada tahun 2009, jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Denpasar sebanyak 2.543 obyek, kemudian pada tahun 2010 terdapat 981 obyek pelanggaran, pada tahun 2011 sebanyak 1.510 obyek pelanggaran pada tahun 2012 terdapat 2394 obyek pelanggaran dan pada tahun 2013 terdapat 2552 obyek pelanggaran .Dari seluruh obyek tersebut, yang berhasil ditindak lanjuti adalah sebanyak 240 penindakan (9%) pada tahun 2009, 164 penindakan (70%) pada tahun 2010, 71 penindakan (30%) pada tahun 2011, 2394 penindakan pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya mencapai 9% pada tahun 2009, 70% pada tahun 2010, 30% pada tahun 2011 dan 100% pada tahun 2012 dan 100% tahun 2013

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk mendukung pencapaian program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain:

1. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi di segala bidang
2. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan di segala bidang;
3. Pengendalian keamanan lingkungan kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat bidang penanganan strategis;
4. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang linmas;
5. Publikasi peraturan perundang-undangan;
6. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah yang diwujudkan dalam evaluasi produk hukum;
7. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui sosialisasi produk hukum;

Kondisi ketertiban dan keamanan selalu merupakan hal penting yang harus tetap dijaga di setiap daerah untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih timbulnya dampak dari pemilihan langsung kepala daerah maupun situasi



kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah.

Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan agama Hindu, merupakan ujung tombak untuk keberlanjutan budaya sebagai modal dasar pembangunan. Meminimalisasi konflik yang berlatar belakang adat perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Denpasar.

Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Denpasar sangat mutlak diperlukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata

Sebagai ibu kota Provinsi Bali yang merupakan Daerah Tujuan Wisata, keamanan untuk mengkonsumsi barang dan jasa maupun pengawasan obat dan makanan perlu dijaga oleh Pemerintah Kota Denpasar beserta masyarakatnya. Beberapa masalah terkait dengan menciptakan keamanan Kota Denpasar adalah :

1. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang dengan pekerjaan informal yang memungkinkan timbulnya banyak permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban umum.
2. Adanya peluang munculnya konflik-konflik yang dipicu masalah adat, budaya dan agama.
3. Meningkatnya pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat.

#### **14. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Menciptakan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya.

Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur, rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.

Secara eksternal maka faktor globalisasi dan adanya revolusi teknologi informasi (e-government) juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan memberikan tantangan tersendiri yang memerlukan sikap kehati-hatian. Meningkatnya ketidak pastian akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi dan sosial, makin derasnya arus informasi dan teknologi dari mancanegara yang menimbulkan infiltrasi budaya dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam informasi dalam masyarakat.

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2010–2015 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:



1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan di atasnya.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kinerja Legislatif, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas /Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

## **15. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

### **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Daerah membutuhkan suatu konsep yang berbasis pada potensi yang ada serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep ini akan tercapai jika ada peran aktif dan partisipasi dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kepedulian terhadap hasil pembangunan tersebut. Untuk itu masyarakat dalam bentuk kelembagaan dan organisasi lainnya harus dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa/Kelurahan yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintahan secara efisien dan efektif, serta dalam upaya mewujudkan Desa / Kelurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.

## **16. URUSAN KEARSIPAN**

### **BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut setiap instansi pemerintah termasuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar lebih kreatif, inovatif dan memiliki motivasi kerja yang tinggi agar apa yang menjadi tujuan pembangunan daerah baik secara fisik maupun



non fisik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, terlebih lagi dengan adanya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperbaiki sistem administrasi kearsipan telah dilakukan berbagai upaya. Upaya – upaya tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, serta meningkatkan kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan yang merupakan indikator utama pembangunan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. Pada akhirnya peningkatan pada kedua indikator itu akan dapat meningkatkan minat baca masyarakat serta meningkatkan kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan di Kota Denpasar.

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar diukur melalui 2 indikator kinerja utama. Pertama indikator bidang perpustakaan, yaitu : meningkatnya minat baca masyarakat dengan mengukur (1) jumlah anggota perpustakaan, (2) jumlah pengunjung, (3) jumlah judul dan koleksi perpustakaan.

Kedua, meningkatnya kualitas informasi dan sistem administrasi kearsipan dengan mengukur : (1) peningkatan kualitas SDM dan sistem kearsipan pada Unit-unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, (2) terwujudnya sistem pengelolaan kearsipan yang semakin baik, (3) pengelolaan arsip in aktif.

Hasil pencapaian kinerja sasaran pembangunan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Perpustakaan :

Tabel 2.45  
**Jumlah Anggota Perpustakaan**

<i>Uraian</i>	<i>Tahun</i>			
	2010	2011	2012	2013
<b><i>Jumlah Anggota Perpustakaan</i></b>	199	1.306	1.320	3.244

*Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*

Tabel 2.46  
**Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 2010 s/d 2013**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan Publik</b>	<b>Jumlah Kunjungan (orang)</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1.	Perpustakaan Umum	<b>475</b>	<b>2.407</b>	<b>3.445</b>	<b>5.934</b>
2.	Perpustakaan Keliling	<b>440</b>	<b>5.386</b>	<b>10.690</b>	<b>7.201</b>
3.	Perpustakaan Khusus Jagatnatha			<b>169</b>	<b>613</b>
	<b>Jumlah Kunjungan</b>	<b>915</b>	<b>7.793</b>	<b>14.314</b>	<b>13.748</b>

*Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*



Tabel 2.47  
**Judul Buku dan Koleksi Buku**

Uraian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
<b>Jumlah Judul Buku</b>	6.219	6.669	7.772	8.979
<b>Jumlah Koleksi Buku</b>	10.330	12.590	13.737	17.100

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

Dari tabel dan grafik di atas, tampak bahwa kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dilihat dari pencapaian sasaran strategis, urusan perpustakaan memang dapat dikatakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terjadi trend positif, progress atau kemajuan terhadap jumlah anggota perpustakaan, maupun jumlah koleksi buku yang dimiliki.

## 2. Bidang Kearsipan :

Dari seluruh SKPD / Unit Kerja yang dibina (100%), yang telah melaksanakan tertib administrasi dalam hal ini menerapkan sistem kearsipan pola baru yaitu sebanyak 18 SKPD pada Tahun 2010, 29 SKPD pada Tahun 2011, 29 SKPD pada tahun 2012, dan 29 SKPD pada tahun 2013.

Upaya peningkatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan jumlah SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah urusan kearsipan.

Pencapaian sasaran yang selama ini telah diraih tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi adalah :

1. Prasarana perpustakaan, arsip dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan
2. Masih minimnya tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan

## 17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah merubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu supply dan dimen. Supply berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan dimen terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi seperti pos dan telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur ini di Kota Denpasar menghadapi kendala berupa sulitnya menemukan



lahan representatif untuk pembangunan infrastruktur dimaksud. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan sehingga pelayanan infrastruktur ini dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika adalah:

1. terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien yaitu, yang mampu mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial,
2. meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika,
3. meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.

Sesuai karakteristik penyelenggaraan setiap sub server dilakukan dengan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan laju perkembangan pembangunan infrastruktur informasi pos telekomunikasi teknologi informasi dan penyiaran dengan tetap menciptakan sinergi antara pemerintah dunia usaha dan pengguna usaha dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien. Pada penyelenggaraan pos dan penyiaran pemerintah masih mempunyai fungsi operasi sehingga masih dibutuhkan investasi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik sedangkan pada penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator.

Untuk mendukung sasaran yang dimaksud maka arah kebijakan yang ditempuh adalah

1. peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika,
2. peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi.

### **2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**

#### **1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN**

##### **A. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam pertumbuhan PDRB

Dalam hal ini peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hultikultura Kota Denpasar sangatlah penting, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan sumberdaya di sektor pertanian yang ada di Kota Denpasar. Kunci keberhasilan pengembangan usaha pada sector pertanian terletak pada aspek perencanaan. Adanya perencanaan yang matang dan sistematis sangat diperlukan



karena agribisnis secara modern membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana dan lain-lain. Dalam kebijakan pengembangan sector, pengembangan pertanian kota Denpasar diharapkan untuk menuju pada pengembangan *urban farming* dan menjaga ekosistem perkotaan.

Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar, mengingat semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian. Masalah-masalah dalam pengembangan sektor pertanian di Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Tingginya alih fungsi lahan karena nilai lahan pertanian di Kota Denpasar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Permasalahan yang dihadapi :

- a) Alih fungsi lahan
- b) Kesuburan tanah dan kesediaan air yang menurun
- c) Belum optimalnya kelembagaan petani, kualitas SDM petani, penyuluh dan koordinasi dengan instansi terkait

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung capaian indikator jumlah produktivitas hasil pertanian antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan SDA dan SDM Pertanian;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna dengan menerapkan teknologi budidaya pertanian.
3. Penyediaan sarana produksi pertanian;
4. Pengembangan bibit unggul pertanian;
5. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
8. Monitoring, pengumpulan, analisa dan evaluasi data produksi tanaman pangan dan hortikultura.

## **B. DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan peternakan, hal-hal yang menjadi perhatian adalah tetap terjaganya kualitas daging yang beredar dan penanggulangan penyakit ternak yang dapat menular ke manusia. Kota Denpasar memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih tujuh kilometer, potensi perikanan dan kelautan cukup memadai sebagai lahan untuk mengais rejeki bagi para nelayan.

Beberapa permasalahan umum dalam pengembangan sektor peternakan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kesehatan produksi hasil ternak
- b) Kurangnya keterampilan SDM peternak, pembudaya ikan dan nelayan, dalam rangka peningkatan produksi dan pengelolaan usaha yang berwawasan agribisnis
- c) Alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman mengakibatkan berkurangnya lahan untuk usaha peternakan
- d) Menurunnya kesempatan berusaha di bidang peternakan akibat meningkatnya potensi pencemaran lingkungan
- e) Kurangnya sarana perikanan tangkap kelompok nelayan



## 2. URUSAN PARIWISATA

### DINAS PARIWISATA

Bali sebagai destinasi wisata dunia mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan dan juga mengakibatkan fluktuasi tingkat hunian kamar di Kota Denpasar. Perkembangan kunjungan wisatawan sepuluh tahun terakhir merupakan cerminan membaiknya kondisi kepariwisataan di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama-sama dengan seluruh komponen/pelaku pariwisata untuk memulihkan kondisi kepariwisataan.

#### Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, Tahun 2009 s/d 2013

No	Tahun	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (jiwa)	Kunjungan Wisatawan Nusantara (jiwa)
1	2009	244.559 orang	131.622 orang
2	2010	255.609 orang	162.448 orang
3	2011	276.163 orang	163.836 orang
4	2012	256.372 orang	167.167 orang
5	2013	210.286 orang	154.054 orang

Data menunjukkan bahwa tahun 2009 merupakan pencapaian kuantitas jumlah kunjungan wisatawan menginap di Kota Denpasar terbanyak bagi Kota Denpasar, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disikapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan pelaku pariwisata seperti membangun pencitraan dengan inovasi (pembuatan event pariwisata), pelaksanaan promosi terpadu melalui media cetak maupun elektronik, menyebarkan materi promosi dalam bentuk brosur-brosur (Denpasar Info, Pesona Denpasar, Discover Denpasar, Denpasar To Day, Map of Denpasar dan lain-lain), VCD, mengikuti promosi dan roadshow, pemanfaatan teknologi melalui website.

Kebudayaan dengan latar belakang agama hindu adalah sebagai daya tarik utama kepariwisataan di Kota Denpasar. Eksistensinya harus dapat dipertahankan sebagai modal pembangunan dan untuk pengembangan kepariwisataan ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- Keterbatasan komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah baik intern maupun ektern
- Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan khususnya yang berbasis IT

## 3. URUSAN INDUSTRI

### DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan di Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut :

- Masih perlunya peningkatan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan dan perlindungan terhadap konsumen diperlukan untuk menjamin konsumen (penduduk dan wisatawan) mendapatkan barang yang berkualitas, dan mampu



menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh ketidak puasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

- b) Masih perlunya peningkatan kemampuan manajemen ekspor bagi pengusaha diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya distribusi produk dari Kota Denpasar melewati batas negara.
- c) Masih terbatasnya akses pasar untuk meningkatkan perdagangan terutama produk dagangan yang dihasilkan oleh industri kecil menengah.

## 2.1.4. ASPEK DAYA SAING

### 2.1.4.1 Fokus kemampuan ekonomi daerah (pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Kota Denpasar.

Tabel 2.48  
Angka Konsumsi RT perkapita Menurut Kecamatan Kota Denpasar

NO (1)	Kecamatan (2)	Total Pengeluaran RT (3)		Jumlah RT (4)		RASIO (5)	
		2012*	2013*	2012*	2013*	2012*	2013*
1.	Kecamatan Denpasar Utara	4.960.405	5.285.312	52.204	52.973	95.02	99.77
2.	Kecamatan Denpasar Selatan	4.065.017	4.331.276	79.934	81.112	50.85	53.40
3.	Kecamatan Denpasar Timur	3.671.510	3.911.994	38.488	39.055	95.39	100.17
4.	Kecamatan Denpasar Barat	3.453.088	3.679.265	69.424	70.447	49.74	52.23
	<b>Jumlah</b>	<b>3.980.499</b>	<b>4.240.784</b>	<b>240.049</b>	<b>243.587</b>	<b>16.58</b>	<b>17.41</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Catatan \*) : angka sangat sementara

Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar dikatakan cukup baik.

Tabel 2.49  
Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kota Denpasar

NO (1)	Kecamatan (2)	Total Pengeluaran RT Non Pangan (3)		Total Pengeluaran (4)		Rasio (5=3/4)	
		2012*	2013*	2012*	2013*	2012*	2013*
1.	Kecamatan Denpasar Utara	3.387.399	3.488.306	4.960.405	5.285.312	0.73	0.66
2.	Kecamatan Denpasar Selatan	2.601.611	2.720.016	4.065.017	4.331.276	0.64	0.64
3.	Kecamatan Denpasar Timur	2.234.013	2.542.769	3.671.510	3.911.994	0.65	0.65
4.	Kecamatan Denpasar Barat	2.086.342	2.244.352	3.453.088	3.679.265	0.64	0.61
	<b>Jumlah</b>	<b>2.490.951</b>	<b>2.714.101</b>	<b>3.980.499</b>	<b>4.240.784</b>	<b>0.66</b>	<b>0.64</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Catatan \*) : angka sangat sementara



## 1. Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untukantisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Tabel 2.50  
Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s/d 2012  
Kota Denpasar

No	Uraian	2009	2010	2011	2012*	2013*
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	152.422	214.852	221.958	224.530	209.405
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	20.610	24.885	28.712	30.174	23.790
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	173.032	239.737	250.670	254.704	233.195
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	476.730	553.780	554.230	579.205	613.005
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,36	0,43	0,45	0,44	0,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

\*Angka sangat sementara

Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 sebanyak 168.094 orang, meningkat ditahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010. Untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang. Untuk usai produktif ditahun 2008 sebanyak 460.815 orang, tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010. Untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 sebanyak 279.205 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar 0,36 ditahun 2008, 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0,44

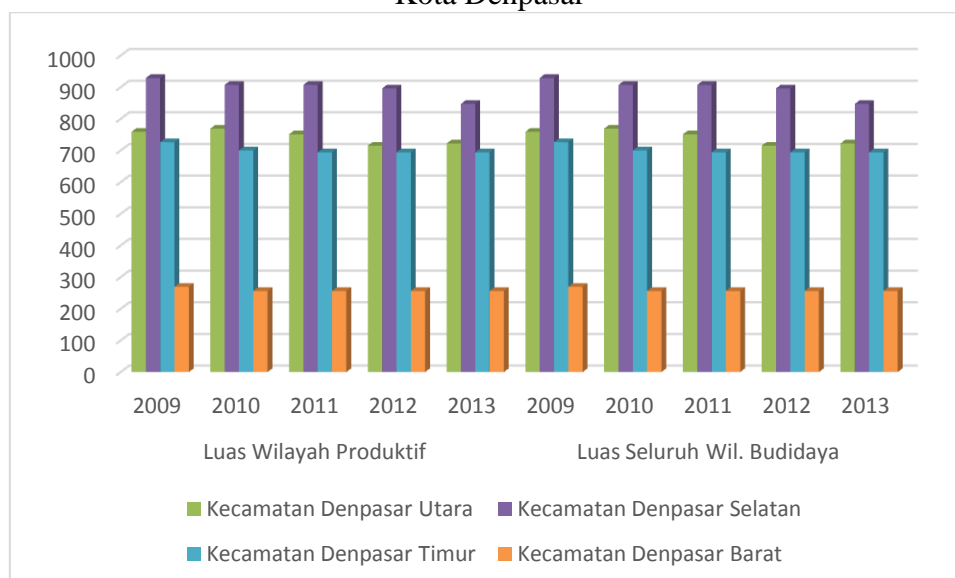
### 2.1.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Tabel 2.51  
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013  
Kota Denpasar

NO	Kecamatan	Luas Wilayah Produktif					Luas Seluruh Wil. Budidaya				
		(3)					(4)				
(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kecamatan Denpasar Utara	759	769	751	715	722	759	769	751	715	722
2	Kecamatan Denpasar Selatan	929	907	907	896	847	929	907	907	896	847
3	Kecamatan Denpasar Timur	726	700	694	694	694	726	700	694	694	694
4	Kecamatan Denpasar Barat	269	256	256	256	256	269	256	256	256	256
	<b>Jumlah</b>	<b>2.683</b>	<b>2.632</b>	<b>2.608</b>	<b>2.561</b>	<b>2.519</b>	<b>2.683</b>	<b>2.632</b>	<b>2.608</b>	<b>2.561</b>	<b>2.519</b>



Gambar 2.22  
 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 s/d 2013  
 Kota Denpasar



Untuk luas wilayah produktif di Kota Denpasar dari tahun ketahun mengalami penyusutan. Hal itu disebabkan oleh alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Timur yang paling banyak mengalami penyusutan lahan produktif. Untuk Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2013 atau seluas 49 ha dan untuk Kecamatan Denpasar Timur tahun 2012 seluas 0 ha pada tahun 2013 atau seluas 49 ha. Dan untuk Kota Denpasar alih fungsi lahan produktif selama 4 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 seluas 113 ha.

#### 2.1.4.3 Fokus Iklim berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, hal penting yang harus ada antara lain adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah. Indikator penting dalam kaitannya dengan iklim investasi daerah antara lain besaran angka kriminalitas yang tertangani oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan).

Tabel 2.52  
 Angka Kriminalitas  
 Kota Denpasar

Jenis Kriminal	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah kasus Narkoba	117	128	163	171	170
Jumlah kasus Pembunuhan	5	8	4	6	6
Jumlah Kejahatan Seksual	13	9	5	3	3
Jumlah kasus Penganiayaan	208	155	16	157	198
Jumlah kasus Pencurian	1137	1187	960	857	919
Jumlah kasus Penipuan	179	111	183	117	147
Jumlah kasus Penadaha	1	1	2	13	4
Jumlah kasus penggelapan	221	133	247	206	174



Jumlah kriminalitas selama 1 tahun	1673	1732	2.379	2.743	3.052
------------------------------------	------	------	-------	-------	-------

Sumber : Poltabes Kota Denpasar

Dilihat dari data kriminal yang terjadi di Kota Denpasar, yang paling banyak terjadi adalah kasus pencurian , untuk tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup drastis sebanyak 857 kasus. Hal ini disebabkan pengamanan yang terjadi di Kota Denpasar sudah ada peningkatan. Untuk tahun 2013 terjadi sebanyak 919 kasus pencurian. Untuk kasus kriminal yang mengalami penurunan dari tahun ketahun adalah kasus penggelapan, kasus penadahan juga mengalami penurunan.

#### 2.1.4.4 Fokus sumber daya manusia

##### 2. Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai.

Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur per Desember 2013, terbanyak adalah lulusan S-1 sebanyak 3449 orang atau 45,80%, diikuti lulusan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan sebanyak 1798 orang atau sebesar 23,88 %.

Tabel 2.53  
Penyebaran Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Denpasar

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar	109
2	Sekolah Menengah Pertama	175
3	Sekolah Menengah Umum	1798
4	Diploma 1 (D-1)	73
5	Diploma 2 (D-2)	1017
6	Dipoloma 3 (D-3)	566
7	Dipoloma 4 (D-4) dan Sarjana Muda	18
8	Strata Satu (S-1)	3449
9	Strata Dua (S-2)	325
10	Doktor (S3)	0
<b>JUMLAH</b>		<b>7530</b>

Sumber: BKPP Kota Denpasar

Jumlah aparatur yang memadai akan lebih optimal perannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM aparatur ini, pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya.

##### 3. Rasio Ketergantungan Penduduk

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untukantisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan , kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).



Tabel 2.54  
Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s/d 2012  
Kota Denpasar

No	Uraian	2009	2010	2011	2012*
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	152.422	214.852	221.958	224.530
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	20.610	24.885	28.712	30.174
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	173.032	239.737	250.670	254.704
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	476.730	553.780	554.230	579.205
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,36	0,43	0,45	0,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

\*Angka sementara

Untuk rasio ketergantungan di Kota Denpasar, jumlah usia tidak produktif di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 sebanyak 168.094 orang, meningkat ditahun 2009 sebanyak 173.032 orang dan 239.737 orang ditahun 2010. Untuk tahun 2011 yaitu sebanyak 250.670 orang. Untuk usai produktif ditahun 2008 sebanyak 460.815 orang, tahun 2009 sebanyak 476.730 orang dan 553.780 orang ditahun 2010. Untuk tahun 2011 adalah yaitu sebanyak 554.230 orang dan tahun 2012 adalah 579.205 orang. Untuk rasio ketergantungan sebesar 0,36 ditahun 2008, 2009 sebesar 0,36 ditahun 2010 sebesar 0,43 dan di tahun 2011 sebesar 0,45 dan tahun 2012 sebesar 0.44.

## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPDP SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai jika ada keterkaitan antara perencanaan di masa datang dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di masa lalu. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui suatu evaluasi terhadap capaian kinerja yang didasarkan kepada informasi yang obyektif. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang secara sekaligus menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Dari uraian hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPDP tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPDP tahun lalu dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPDP tahun lalu dan RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dengan Renstra SKPD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD . **Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDP sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJM**

## 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik



- a. Tingginya dinamika Kota, dan kompleksnya masalah yang dihadapi oleh wilayah perkotaan membutuhkan agen perubahan yang handal dan profesional. Profesionalisme birokrasi sangat diperlukan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Reformasi birokrasi juga menjadi begitu penting guna mengantisipasi perubahan yang pesat dibidang ilmu dan teknologi. Tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional untuk mendukung pemerintahan yang baik yang berlandaskan hukum, masih memerlukan waktu yang cukup panjang.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan membutuhkan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Banyak hal yang dapat menentukan kondisi ini, seperti isu yang terkait dengan suku, ras, agama, kesenjangan pendapatan, kemiskinan, sebagai isu yang berkembang internal. Isu terorisme, migrasi penduduk, dan budaya luar yang merusak. Antisipasi terhadap factor internal dan eksternal dalam upaya penciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif perlu terus selalu diusahakan.
- c. Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan pemerintahan ini adalah Pendapatan Asli Daerah, yang banyak disumbangkan dari Pajak Hotel dan Restoran. Kondisi ekonomi yang masih belum baik dan adanya isu keamanan terutama terorisme dan isu wabah seperti flu burung, flu babi, rabies, demam berdarah dan kolera menyebabkan pluktuatifnya penerimaan pendapatan asli daerah. Disisi lain masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah yang ditandai dengan terbatasnya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme juga juga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan

## 2. Pendidikan

- a. Pembangunan bidang pendidikan ini masih menjumpai banyak kendala. Sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. SDM tenaga kependidikan perlu ditingkatkan guna menunjang peningkatan tingkat kesesuaian guru mengajar, mengingat masih ada guru yang memiliki tingkat kesesuaian mengajar relatif rendah. Denpasar tidak memiliki sumber daya alam dan hanya mengandalkan sektor perdagangan dan jasa dalam pembangunan ekonominya. Salah satu faktor keberhasilan sektor perdagangan dan jasa dalam menghadapi kompetitor adalah peran dari Sumber Daya Manusianya. Untuk dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditunjang oleh pendidikan yang berkualitas baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal yang berhimpitan dengan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran.

## 3. Kesehatan

- a. Terjangkaunya biaya kesehatan bagi semua lapisan masyarakat dan mudahnya menjangkau sarana kesehatan. Pembangunan kesehatan erat kaitannya dengan upaya peningkatan kunjungan wisata, mengingat isu penyakit yang berkembang akan berpengaruh secara signifikan terhadap kunjungan wisata. Sebaran fasilitas kesehatan di Kota Denpasar telah menyebabkan mudahnya penduduk untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun tidak menutup kemungkinan kemudahan akses



ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki khususnya oleh penduduk yang kurang mampu. Pemerintah kota Denpasar telah memberikan kemudahan akses kepada penduduknya untuk memperoleh layanan kesehatan. Sebagai pelayan masyarakat, kualitas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan perlu terus ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada penduduknya. Desa/Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, dan penduduk marginal yang tinggal di kantong-kantong kumuh perlu mendapatkan perhatian di bidang kesehatan untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat, menuju Denpasar Sehat.

- b. Peningkatan keluarga sejahtera dan perlindungan sosial masyarakat. Masalah sosial utama yang ada disebabkan oleh tingginya migrasi penduduk ke Kota Denpasar, masalah kemiskinan, gepeng, pengangguran, penyandang cacat, kriminalitas dan masalah sosial lainnya disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang tidak punya skill di Kota Denpasar. Untuk itu pembenahan administrasi kependudukan menjadi sangat mendesak dan penting. Adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Denpasar memerlukan penanganan melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, bantuan dan jaminan sosial untuk mengatasinya, hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan perlindungan kesejahteraan sosial di Kota Denpasar.

#### 4. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi. Akan tetapi didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak-hak dasar seseorang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan pendekatan ini maka kemiskinan diidentifikasi dari rendahnya akses terhadap berbagai sumberdaya dan aset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan sarana kebutuhan hidup dasar. Rendahnya akses ini dipengaruhi oleh faktor seperti : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, gender serta kondisi lingkungan.

#### 5. Infrastruktur

- a. Infrastruktur merupakan roda penggerak pembangunan, selain itu infrastruktur mempunyai peran penting dalam menjaga keutuhan satu wilayah. Guna terwujudnya pembangunan ekonomi masyarakat, infrastruktur yang harus ada antara lain : sumber daya air, energy, tenaga listrik, pos dan telekomunikasi, perumahan, air minum, limbah, persampahan dan drainase. Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan dana yang cukup besar dan lebih banyak bersifat *cost center*, sehingga pihak swasta tidak berminat menanamkan modalnya.
- b. Dalam pembangunan ekonomi, transportasi berfungsi sebagai katalistor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi pelayanan umum transportasi harus ditujukan melalui penyediaan jasa transportasi, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, melancarkan distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sector-sektor ekonomi daerah.

#### 6. Kebudayaan

- a. Bali pada umumnya dan Denpasar pada khususnya yang merupakan daerah tujuan wisata terkemuka di dunia, tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh budaya luar baik yang positif (yang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan) maupun yang negatif (yang menghambat, merusak tatanan



budaya local). Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi membuat informasi tidak bisa disekat-sekat lagi oleh batas teritori suatu Negara. Globalisasi yang terjadi dalam segala aspek kehidupan ini memiliki permasalahan dan tantangan tersendiri dalam upaya membangun dan memperkuat jatidiri masyarakat Kota Denpasar yang dilandasi Budaya Bali. Agama Hindu sebagai agama mayoritas yang dianut oleh Penduduk di Provinsi Bali dan Kota Denpasar perlu lebih dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari guna membentengi diri dari pengaruh negative budaya luar.

- b. Institusi adat seperti Desa Adat, Banjar Adat, Sekehe-sekehe yang ada di Kota Denpasar, memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah. Namun demikian keberadaan institusi ini masih mengalami pasang surut. Sampai tahun 2009 Kota Denpasar memiliki 35 Desa Pekraman, 392 Banjar Adat, 299 Banjar Dinas, 431 Sekehe Kesenian, dan 40 Subak dengan 35 Pakaseh. Subak sebagai lembaga adat yang cukup eksis keadaannya sekarang semakin terjepit karena terjadinya alih fungsi lahan yang cukup tinggi. Keberadaan institusi ini keberadaannya perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik lagi guna menunjang proses pembangunan.

#### 7. Kreativitas dan Inovasi

Pada hakekatnya usaha perdagangan adalah jasa untuk menghubungkan produk dengan konsumen yang membutuhkan. Produk yang dipasarkan melalui usaha perdagangan di Kota Denpasar terkait dengan hasil kegiatan pertanian, perkebunan, industri, kerajinan dan lainnya. Produk-produk tersebut tidak saja berasal dari Propinsi Bali, tetapi juga berasal dari propinsi lainnya yang menjadikan Bali sebagai tempat pemasaran hasil produksinya. Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Pengawasan terhadap produk yang dipasarkan dan perlindungan terhadap konsumen diperlukan untuk menjamin konsumen (penduduk dan wisatawan) mendapatkan barang yang berkualitas, dan mampu menyelesaikan masalah masalah yang ditimbulkan oleh ketidak puasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Salah satu masalah yang dihadapi oleh sektor industri di Kota Denpasar adalah keterbatasan akses pasar untuk meningkatkan pemasaran hasil industri terutama produk industri yang dihasilkan oleh industri kecil, industri Rumah Tangga/Kerajinan. Fasilitasi peningkatan akses pasar melalui promosi sangat diperlukan untuk mengembangkan industri khususnya industri kecil, Rumah tangga dan kerajinan di Kota Denpasar.

#### 8. Ketahanan Pangan

Sebagai daerah perkotaan, Kota Denpasar masih memiliki daerah pertanian dengan luas sawah kurang lebih 2.506 Ha. Pertanian dalam arti luas mencakup tanaman bahan makanan, hortikultural, peternakan dan hasil-hasilnya, tanaman perkebunan, perikanan serta kelautan. Sektor ini mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusinya dapat dilihat dari pembentukan PDB, penerimaan devisa melalui ekspor, penyediaan bahan baku industry dan penyerapan tenaga kerja. Di Kota Denpasar masih ditemukan kendala dalam pengembangan sector ini karena tingginya alih fungsi lahan pertanian.

#### 9. Perekonomian

Transportasi yang tidak terkendali berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena kemacetan yang ditimbulkan serta kesulitan menyediakan lahan parkir. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah



(UMKM) mempunyai peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan. Dengan meningkatnya peran dan kemampuan koperasi dan UMKM, pendapatan masyarakat berpotensi untuk menjadi lebih baik dan kesenjangan ekonomi dapat diminimalisasi karena setiap rumah tangga berpeluang untuk menjadi pelaku usaha atau penerima manfaat dari koperasi dan UMKM. Disamping Koperasi, LPD sebagai lembaga keuangan mikro telah memberikan kontribusi terhadap berkembangnya perekonomian skala kecil. Upaya pemberdayaan LPD perlu terus ditingkatkan guna dapat membantu cepatnya akselerasi perkembangan perekonomian khususnya usaha-usaha skala kecil di Kota Denpasar.

#### 10. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Peran serta masyarakat ini diperlukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat Kota Denpasar yang dilandasi dengan kearifan yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat. Muara dari semua pemberdayaan ini adalah peningkatan produktivitas masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, karena meningkatnya investasi. Selama ini peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan masih relative kecil dibandingkan dengan peran pemerintah dan sector swasta.

#### 11. Kesejahteraan Rakyat

- a. Peningkatan keluarga sejahtera dan perlindungan sosial masyarakat. Masalah sosial utama yang ada disebabkan oleh tingginya migrasi penduduk ke Kota Denpasar, masalah kemiskinan, gepeng, pengangguran, penyandang cacat, kriminalitas dan masalah sosial lainnya disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang tidak punya skil di Kota Denpasar. Untuk itu pembenahan administrasi kependudukan menjadi sangat mendesak dan penting. Adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Denpasar memerlukan penanganan melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, bantuan dan jaminan sosial untuk mengatasinya, hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan perlindungan kesejahteraan sosial di Kota Denpasar.
- b. Perhatian yang baik terhadap kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak. Kehidupan yang berkualitas ditandai oleh meningkatnya peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak atas perlindungan dari perlakuan yang salah, tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi. Permasalahan yang masih menonjol adalah masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mana korbannya juga adalah anak-anak, eksploitasi terhadap anak, perdagangan anak dan pekerja anak.
- c. Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga. Pembangunan ketiga hal ini bermuara pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan penduduk seimbang di masa datang. Pembangunan pemuda dan olah raga bertujuan mewujudkan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing serta miliki nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, dan disiplin tinggi sehingga siap untuk memegang estafet kepemimpinan dalam segala bidang. Banyak generasi muda sekarang



terjerumus pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan, dan kehilangan motivasi berprestasi.

## 12. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

- a. Sebagai kota Metropolitan, Kota Denpasar dihuni oleh 608.595 jiwa pada tahun 2007 dengan tingkat pertumbuhan 4,28 persen. Pertumbuhan penduduk yang besar ini disumbang oleh migrasi pendatang yang diakibatkan oleh arus urbanisasi. Kondisi ini bila dilihat dari segi ekonomi, menandakan Kota Denpasar memiliki potensi ekonomi yang besar dan mampu menarik penduduk usia produktif untuk bermigrasi ke Kota Denpasar. Bertambahnya penduduk tersebut akan berpengaruh langsung terhadap semakin besar penyediaan infrastruktur baik social maupun ekonomi. dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan.
- b. Kota Denpasar dengan luas 127,78 km<sup>2</sup> atau 2,18 persen dari luas pulau Bali dihuni oleh 608.595 jiwa dengan tingkat kepadatan 4.763 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah yang relative kecil dan jumlah penduduk yang tinggi dengan berbagai aktivitasnya, telah membawa dampak berupa menurunnya kemampuan lingkungan untuk menyangga aktivitas di atasnya (terjadi degradasi lingkungan). Agar terjadi *sustainable development* perlu ditingkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup lebih serius lagi.
- c. Konsekuensi logis dari tingginya jumlah penduduk di Kota Denpasar, maka volume sampah yang dihasilkan juga meningkat tajam. Volume sampah pada tahun 2009 sebesar 805.697 m<sup>3</sup>. Meningkatnya volume sampah setiap harinya membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terlaksananya peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kota Denpasar.

## 13. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban

- a. Masih adanya komplik yang terkait dengan adat dan budaya Bali, dapat memberikan kontribusi yang tidak baik pada upaya pembangunan pariwisata yang berlandaskan budaya Bali. Adat dan Budaya yang merupakan sarana untuk mengimplentasikan ajaran agama Hindu perlu lebih diperkuat dan dikembangkan sehingga menjadi lebih fleksibel dengan perkembangan jaman.
- b. Sebagai kota dengan heterogenitas yang tinggi, kepadatan tinggi dan mobilitas tinggi, memunculkan kesenjangan multidimensi. Kesenjangan ini berpotensi memunculkan konflik dalam masyarakat. Dalam dinamika pemecahan masalah-masalah social ini dalam praktek banyak memerankan lembaga adat guna diperolehnya perlindungan kepada masyarakat secara umum.

### 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam RKPD ini merupakan permasalahan yang termuat dalam RPJMD dikaitkan dengan kondisi aktual Kota Denpasar, melalui pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota dalam rangka sinergitas, sinkronisasi dan integrasi dari pemerintah sampai pada pemerintah daerah



Tabel 2.55  
Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak  
Pembangunan Daerah Tahun 2014

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014	ISU STRATEGIS DALAM RKP TAHUN 2014	ISU STRATEGIS PROVINSI BALI 2014	KOTA DENPASAR	KET
1	2	3	4	5
<b>Prioritas 1 :</b>				
<b>Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</b>	1 Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1 Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	- Penciptaan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	
	2 Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Dapat Diakses dengan Mudah oleh Masyarakat	- Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik	
		2 Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik	- Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik	
		3 Mengendalikan Pertumbuhan, Persebaran, dan Administrasi Kependudukan	- Penataan administrasi kependudukan	
	3 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	- Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat	1 Pengurangan secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas	
			2 Pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi	
<b>Prioritas 2 :</b>				
<b>Pendidikan</b>	1 Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin	- Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	1 Pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga miskin	
			2 Peningkatan pendidikan anak usia dini	
	2 pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013-2014 secara bertahap	- Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	1 Peningkatan pendidikan anak usia dini	
			2 Pelaksanaan wajib belajar pendidikan	



			Sembilan tahun	
			3 Pelaksanaan pendidikan menengah	
	3 pelaksanaan pendidikan menengah universal	1 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	
			2 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan	
		2 Penurunan Angka Buta Aksara Kelompok Usia 45 Tahun ke Atas	1 Penyelenggaraan pendidikan non formal	
			2 Penyelenggaraan pendidikan non formal	
		3 Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Pendidikan	- Pengelolaan manajemen pelayanan pendidikan	
<b>Prioritas 3 :</b>				
<b>Kesehatan</b>	1 penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria)	- Penanggulangan Penyakit Menular berbasis Binatang dan HIV/AIDS	- Pemenuhan layanan kesehatan keluarga miskin.	
	2 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata	1 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	- Pervitalisasian keluarga berencana	
		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan	- Perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	
		3 Peningkatan dan Pengembangan Program JKBM	- Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	
		4 Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Kesehatan	- Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
		5 Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan	- Peningkatan sumber daya kesehatan	
<b>Prioritas 4:</b>				
<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	1 Perluasan Program Keluarga Harapan	1 Pengembangan Pembangunan Berbasis Desa Terpadu	- Pengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir	
		2 Pembangunan Rumah Layak Huni	- Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin	
	2 Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan	1 Penanganan Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah Sosial	- Pemenuhan upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin.	



	Masyarakat)			
		2 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS	1 Peningkatan kualitas perumahan keluarga miskin.	
			2 Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin.	
	3 Peningkatan produktivitas usaha mikro	- Peningkatan Kesejahteraan dan Perluasan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	- Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa	
	4 Pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan (demand side)		-	
	<b>Prioritas 5 :</b>			
<b>Ketahanan Pangan</b>	1 Kesejahteraan petani / Nelayan dan peningkatan produksi perikanan	1 Peningkatan Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Bali	- Peningkatan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan	
		2 Peningkatan Kerjasama Pengembangan Budidaya, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian	- Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian	
		3 Pengembangan Komoditas Andalan/Unggulan Pertanian	- Pengembangan agribisnis	
		4 Peningkatan Produktivitas dan Produksi Pertanian dalam Arti Luas	- Peningkatan ketahanan pangan	
		5 Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan serta Ekosistem Perairan, Pesisir dan Daratan	- Pengembangan sumber daya perikanan	
		6 Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh	- Pengembangan ekonomi lokal	
		7 Penuntasan Kasus Penyakit Asal Hewan dan Penyakit Ternak	- Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan	



		8 Meningkatkan Peran Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Bali	- Pengembangan sumber daya perikanan	
<b>Prioritas 6 :</b>				
<b>Infrastruktur</b>	1 Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan	- Peningkatan Prasarana Publik yang Memadai	1 Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	
			2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian	
	2 penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah	- Penyediaan Infrastruktur untuk Menciptakan Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah	- Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan	
	3 Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi	1 Pemantapan Kondisi Jalan dan Jembatan untuk Menciptakan Sistem Transportasi yang Handal dan Terintegrasi	- Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	
		2 Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan	1 Pemeliharaan jalan dan jembatan	
			2 Peningkatan dan membangun jalan dan jembatan	
		3 Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	- Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	
<b>Prioritas 7 :</b>				
<b>Investasi Dan Iklim Usaha</b>	1 penurunan biaya logistik nasional	- Peningkatan dan Pemerataan Iklim Investasi	- Penciptaan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah	
	2 Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru	1 Pengembangan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga yang Berdaya Saing Tinggi	- Perbanyak pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat	
		2 Peningkatan Dukungan terhadap Pengusaha Lokal dan Kemitraan Pemasaran Hasil Industri Kecil dan	- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah	



		Menengah		
		3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ekspor	- Peningkatan perdagangan dalam negeri dan ekspor	
		4 Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah	
<b>Prioritas 8 :</b>				
<b>Energi</b>	1 Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi			
	2 Peningkatan Rasio Elektrifikasi			
	3 Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik panas bumi			
<b>Prioritas 9 :</b>				
<b>Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana</b>	1 Pengendalian perubahan iklim		- Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
	2 peningkatan kualitas lingkungan	1 Peningkatan Pengelolaan Limbah/Sampah Padat dan Cair	- Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	
		2 Peningkatan Pemulihan dan Fungsi Kawasan Hutan, Perlindungan, Konservasi Alam serta Pelestarian Panorama Alam Bali	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	
		3 Mewujudkan Pengaturan Tata Ruang sesuai RTRW	- Pengendalian pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan	
		4 Penanggulangan Bencana Secara Dini	- Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam	
		5 Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Pemeliharaan keamanan lingkungan secara berkelanjutan	
<b>Prioritas 10 :</b>				
<b>Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik</b>	1 Pembangunan daerah tertinggal serta penguatan diplomasi			



	2 Pembangunan infrastruktur, Hankam serta fasilitas custom immigration, quarantine, security (CIQS) kawasan perbatasan			
<b>Prioritas 11 :</b>				
<b>Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi</b>	1 Penguatan Jatidiri Bangsa Dan Pelestarian Budaya	1 Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Apresiasi terhadap Kearifan Budaya Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat	- Peningkatan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya	
		2 Pemberdayaan Desa Pekramaan dan Subak/Subak Abian	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian	
		3 Peningkatan Kontribusi Dunia Pariwisata terhadap Pelestarian Budaya	Pengembangan destinasi pariwisata	
	2 Peningkatan Kemampuan IPTEK dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional	1 Peningkatan Pengelolaan Destinasi, Pemasaran dan SDM Pariwisata	- Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan	
		2 Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisata	- Pengembangan destinasi pariwisata	
		3 Pengembangan Ekonomi Kreatif	- Pengembangan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan	
<b>Prioritas Lainnya:</b>				
<b>(1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</b>	1 Pembinaan masyarakat	1 Peningkatan Kecerdasan Masyarakat dalam Berpolitik	- Peningkatan pendidikan politik masyarakat	
		2 Penyelesaian Kasus Sosial dan Adat di Bali		
		3 Peningkatan Keharmonisan Hubungan Antar Masyarakat	- Pengelolaan keragaman budaya	
		4 Menciptakan Keamanan yang Kondusif dan Kewaspadaan Dini	- Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat	



		5 Mewujudkan Sistem Keamanan yang Berstandar Internasional		
<b>(2) Bidang Perekonomian</b>	1 Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas		- Peningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa	
	2 Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015		-	
<b>(3) Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	1 Peningkatan kerukunan beragama		- Peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan ber agama, peran serta lembaga social keagamaan dan terciptanya harmoni sosial yang kondusif	
	2 Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional		- Peningkatan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah	



## **BAB III**

### **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2015 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.

Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata.

Searah dengan hal tersebut maka potensi Unggulan daerah di Kota Denpasar adalah disektor Pariwisata, yang meliputi obyek wisata kota, daya tarik wisata dan atraksi wisata. Obyek Wisata Kota ini tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar meliputi tempat-tempat yang dapat memikat kedatangan wisatawan ke Kota Denpasar. Sedangkan daya tarik pariwisata, sebagaimana halnya dengan daya tarik Pulau Dewata lebih disebabkan karena keunikan dan budaya masyarakat. Hal inilah yang memberikan nuansa pada berbagai atraksi wisata yang ada di Kota Denpasar. Atraksi tersebut berupa tari-tarian sakral, even-even Nasional dan Internasional yang dilaksanakan di Kota Denpasar, permainan tradisional dan sebagainya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka menata potensi obyek-obyek wisata kota, dalam perjalanannya telah diikuti pula oleh penataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lainnya. Penataan ini disatu pihak dapat memberikan nilai tambah pada pariwisata Bali, tetapi dapat pula menjadi penyebab beralihnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata di luar kota Denpasar.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan



kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan.

Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015**

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Perkembangan ekonomi Kota Denpasar dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Denpasar. Kegiatan kepariwisataan di Bali memiliki peranan sebagai penarik dan mendorong tumbuhnya sektor/lapangan usaha perekonomian tersebut. Hasil pantauan ke beberapa pelaku industri pariwisata menunjukkan angka kunjungan normal bahkan cenderung meningkat walaupun peningkatan yang dialami tidak begitu tajam .

Disisi lain, kepariwisataan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap faktor keamanan, kesehatan dan lainnya. Upaya untuk mempertahankan keamanan yang kondusif di Propinsi Bali khususnya di Kota Denpasar perlu terus diupayakan dan pemberantasan penyakit menular, pengawasan terhadap kualitas barang konsumsi yang beredar di Kota Denpasar diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Propinsi Bali maupun ke Kota Denpasar. Pengembangan industri pariwisata harus lebih kreatif melakukan pembenahan dan lebih serius dalam penanganan termasuk aktif dalam berbagai event promosi pariwisata serta program wisata yang ditawarkan harus lebih beragam dan menarik bagi wisatawan asing dan domestik.

Karakteristik perekonomian Bali yang spesifik dengan mengandalkan pesona alam, seni, budaya dan adat istiadat yang sangat terkenal ke manca negara menyebabkan perekonomian Bali sangat tergantung kepada perkembangan industri Pariwisata, menyebabkan pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh perdagangan hotel dan restaurant, persewaan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata.

Sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, sangat wajar bila pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto Bali (PDRB) sangat dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pariwisata, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Sementara sektor-sektor lainnya merupakan pendukung dari kegiatan pariwisata, sehingga apabila sektor PHR turun, dalam jangka menengah beberapa sektor lainnya-pun akan ikut turun. Sebagai contoh sektor perdagangan dan perindustrian, khususnya industri kecil akan tergantung juga dengan kunjungan wisatawan.

Strategi pembangunan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar tahun 2011 yang mencapai 6,77 persen.



Pertumbuhan tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang hanya sebesar 6,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Denpasar adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup potensial bagi perekonomian Provinsi Bali secara umum.

Perkembangan PDRB Kota Denpasar, menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang terus meningkat, hal ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang didukung oleh dunia usaha telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Dari perkembangan sektoral nampak sektor perdagangan, hotel dan Restoran menciptakan nilai tambah yang paling besar tahun 2011 yaitu Rp. 5.378.315,45,- (harga berlaku), sehingga sektor ini masih merupakan motor penggerak pembangunan Kota Denpasar, disamping juga menampung tenaga kerja.

Indikator ekonomi yang mencerminkan struktur ekonomi dilihat dari besarnya kontribusi serta nilai tambah sektoral dalam pembentukan PDRB. Struktur ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada sektor perdagangan hotel dan restoran 38,81persen. Bila dilihat dari tiga kelompok besar nampak sektor tersier menjadi penggerak pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Dengan kata lain, bahwa perekonomian Kota Denpasar dicirikan oleh perekonomian perkotaan yang didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa. Dibandingkan dengan PDRB Bali nampak bahwa perekonomian Kota Denpasar lebih dominan pada struktur ekonomi perkotaan. Rendahnya sektor primer yaitu pertanian dan penggalian disebabkan adanya alih fungsi lahan, namun untuk ke depan perlu menyediakan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan dengan mengarahkan pada pola pengembangan pertanian terpadu yang mampu menciptakan teknologi pasca panen yang mudah diakses petani.

Tabel 3.1  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi  
Kota Denpasar

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2011	2012*	2013	2014
1	2	3	6	8	9	
1.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral	Miliar	13.856.496,18	15.557.924,87	17.579,52	18.816,56
2.	Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan	Juta	40,41	45,75	52,15	
3.	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)	Miliar	13.856.496,18	15.557.924,87	17.579,52	18.816,56
4.	Besaran ICOR (Incremental Capital	-	0,1003	0,1033	0,2813	



No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2011	2012*	2013	2014
1	2	3	6	8	9	
	Output Ratio)					
5.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	10,43	10,50	10.57	
6.	Tingkat Pengangguran	Orang	15.950	15.880	15.770	
7.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:	Juta				
	- Pendapatan Perkapita					
	- Kemampuan Investasi	Miliar	3.526,10	3.718,39	3.938,42	
	- Besaran Indeks Gini ( <i>Gini Ratio Ibdex</i> )					
	- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)		77,82	77,93	78,06	
	- PPP tingkat daya beli Masyarakat	Ribu /bulan	642,50	643,59	644,75	
8.	Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan					
	- Pajak Daerah terhadap PDRB					
	- Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB					
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)					
	- Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah					
	- dan sebagainya.					

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

### 3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diukur berdasarkan nilai PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita. PDRB diartikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah yang diukur dalam harga pasar. Ukuran ini memiliki kelemahan karena bersifat global dan



tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan PDRB perkapita sering dianggap lebih mendekati ukuran kesejahteraan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014  
Atas dasar Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku  
Kota Denpasar

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi						Proyeksi			
		2010		2011		2012		2013		2014	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	PDRB (Harga berlaku)	12.497.412,51	100	13.856.496,18		15.557,92		17.579,52		18.816,56	
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu	5.710.412,32	100	6.097.167,27		6.535,17		6.926,11			
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	6,57	-	6,77	-	7,18	-	6,69	-	6,94
4.	Tingkat Inflasi (%)	-	9,03	-	3,75	-	4,75	-	3,54		
5.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ADHB	12.497.412,51	100	13.856.496,18		15.557.924,87	100	17.579,52	100		
	Pertanian	865.148,39	6,92	937.114,94		1.022,99	5,60	919,80	5,23		
	Penggalian	607,12	0	655,51		0,69	0	0,80	0		
	Industri Pengolahan	1.435.275,94	11,48	1.528.259,18		1.674,13	13,31	2.475,26	14,08		
	Listrik, gas dan air bersih	496.606,49	3,97	559.338,60		645,36	4,23	727,47	4,14		
	Bangunan	478.322,01	3,83	528.765,92		605,06	4,28	784,13	4,46		
	• Perdagangan, Jasa, restoran	4.675.632,89	37,41	5.378.315,45		6.155,67	33,58	5.763,99	32,76		
	• Pengangkutan dan Komunikasi	1.601.105,32	12,81	1.728.724,32		1.872,31	13,21	2.320,04	13,20		
	• Keuangan	1.747.884,91	13,99	1.929.158,24		2.199,23	15,00	2.671,66	15,20		
	• Jasa-jasa	1.196.829,44	9,58	1.266.164,02		1.382,49	10,77	1.916,38	10,90		
6.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral ADHK (Juta Rupiah)	5.710.412,32	100	6.097.167,27		6.535,17	100	6.926,13	100		
	• Pertanian	385.373,49	6,75	391.243,44		402,59	6,64	439,77	6,35		
	• Penggalian	243,71	0	244,75		0,25	0	0,29	0		
	• Industri Pengolahan	702.078,21	12,29	726.056,42		768,96	12,30	864,91	12,49		
	• Listrik, gas dan air bersih	213.771,90	3,74	228.261,23		244,46	3,76	253,20	3,66		
	• Bangunan	178.941,26	3,13	187.377,17		205,67	3,14	218,55	3,16		
	• Perdagangan, Jasa, restoran	2.195.132,92	38,44	2.409.328,50		2.615,21	38,13	2.464,02	38,02		
	• Pengangkutan dan Komunikasi	712.479,10	12,48	746.315,69		790,20	12,76	893,07	12,89		
	• Keuangan	745.022,53	13,05	807.275,18		879,60	12,76	878,96	12,69		
	• Jasa-jasa	577.369,20	10,11	601.064,90		628,23	10,50	731,36	10,56		
7.	PDRB per kapita (juta RP)	15,85	-	17,22		18,66	-	27,86 <sup>*)</sup>	-		
8.	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	-									
9.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :										
	• Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)	0,2949									
	• Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	77,94		78,31		78,50	0	78,06	0		
10.	Angka Melek Huruf	97,33	-	97,49		98,00	0	97,29	0		

Ket : \*) Angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari laju/lambatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Apabila series data laju pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya percepatan, berarti pembangunan perekonomian mengalami peningkatan. Namun percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan (pengentasan masalah kemiskinan) dan penyediaan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), akan menjadi polemik tersendiri bagi pembangunan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum perekonomian Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Selain besaran pertumbuhan per sektor di Kota Denpasar pada tahun 2012 dapat pula dilihat sumber pertumbuhan yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2012. Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar sebesar 7,18 persen pada tahun 2012 disumbangkan dari sektor tersier sebesar 5,73 persen, sektor sekunder adalah penyumbang sumber pertumbuhan berikutnya yaitu sebesar 1,27 persen, sedangkan pertumbuhan yang terkecil disumbangkan dari sektor primer sebesar 0,19 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar telah menunjukkan tren positif. Walaupun pertumbuhan diperkirakan membaik namun ada beberapa faktor yang perlu dicermati untuk bisa mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan antara lain :

- a) Adanya ketidakpastian proses pemulihan perdagangan dunia mengingat proses pemulihan di negara maju yang didukung stimulus fiskal lebih berorientasi pada permintaan domestik
- b) Masih tingginya angka pengangguran di negara maju, masih terdapatnya proteksionisme di beberapa negara pasca krisis global, serta risiko meningkatnya harga minyak dunia yang didorong kegiatan spekulasi
- c) Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai kalau pemerintah mendorong peningkatan investasi PMA maupun PMDN dan perbankan memfokuskan penyaluran kreditnya untuk modal kerja dan kredit investasi.
- d) Target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah sudah mempertimbangkan pemberian stimulus yang akan digunakan untuk sektor perpajakan, kepabeanan, maupun belanja subsidi.
- e) Melakukan revitalisasi industri untuk pertahanan pendapatan agar industri tumbuh dan tidak kalah bersaing dengan produk impor.
- f) Percepatan pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta.
- g) Ada kemungkinan terjadi kenaikan harga tarif listrik, PDAM dan Bahan Bakar Minyak serta kenaikan harga komoditi bahan pokok. Sehingga perlu antisipasi oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatifnya.

### 3.1.1.2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang tidak bisa disebut sebagai inflasi kecuali jika kenaikan harga barang itu mengakibatkan harga barang lain menjadi ikut naik. Tingkat inflasi dicerminkan dari adanya kenaikan tingkat upah. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah dan mengadakan inventasi.

Tabel 3.3  
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar  
Tahun 2010 – 2014 (Dalam Persen)

	2010	2011	2012	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi	6,57	6,77	7,18	6,69	6,94
Inflasi	9,03	3,75	4,75	6,85	6,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Apabila laju inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya laju inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam konteks Kota Denpasar, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2011 mencapai 6,77 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 3,75 persen. Begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2012 mencapai 7,18 persen, lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 4,75 persen.

### 3.1.1.3. Kebutuhan Investasi (PMA dan PMDN)

Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena *multiplier effect* dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan kontrol kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Disamping itu juga sebagai tempat terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, seperti : pendidikan, kesehatan, olah raga dan lainnya yang memiliki skala pelayanan regional. Kondisi ini membawa dampak tingginya pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di propinsi Bali. Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdirinya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam setahun terakhir ini.

Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investasi-investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Disamping itu Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan pemerintah daerah/kota yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan akan sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah.

Kecendrungan yang terjadi dengan pemberlakuan undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah/kota berlomba-lomba untuk dapat menarik investasi ke daerahnya, yang secara ekonomi dapat dikatakan terjadinya persaingan untuk dapat merebut investasidan ini merupakan babak baru yang harus dihadapi pemerintah daerah/kota. Potensi daerah/kota dan adanya iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, sehingga Kota Denpasar yang memiliki infrastruktur yang memadai sering diincar oleh para investor untuk berinvestasi.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA)



dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh BKPM RI merupakan Penanaman Modal dengan Fasilitas. Penanaman Modal baik perseorangan maupun badan usaha yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah juga merupakan Penanam Modal Dalam Negeri non fasilitas dan dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, penanam modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, karena tumbuhnya penanaman modal secara sehat akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari peningkatan penerimaan nasional, perluasan kegiatan usaha, peningkatan peluang ekspor, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.

Sebagaimana proses manajemen maka investasi juga dimulai dari adanya rencana investasi. Rencana investasi dengan fasilitas yang pendaftarannya di BKPM RI persetujuannya dalam bentuk Surat Pendaftaran Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN. Selanjutnya setelah adanya surat pendaftaran yang juga disebut Ijin Prinsip Penanaman Modal maka penanam modal tersebut harus menindaklanjuti dengan perijinan-perijinan daerah yang diperlukan sesuai dengan usaha yang dibangun. Setelah perijinan daerah dilengkapi maka penanam modal dapat memohon Ijin Usaha Tetap Penanaman Modal (IUT). Dengan adanya IUT maka sudah terjadi realisasi investasi.

Dalam kegiatan penanaman modal peran dari aparat pemerintah adalah sebagai fasilitator/mediator yang selalu dituntut untuk mengembangkan pemahaman terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penanaman modal, terutama bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan bersikap proaktif dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan. Kegiatan pembinaan ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Tentunya para penanam modal yang memerlukan perijinan di daerah hendaknya menindaklanjuti perijinan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang dituju. Dalam hal ini perlu dilaksanakan Pengendalian Penanaman Modal secara efektif dan terus menerus untuk menuntun setiap rencana investasi dapat di realisasikan dengan meminimalkan hambatan, pelanggaran maupun penyimpangan sehingga secara nyata mendatangkan manfaat dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengendalian penanaman modal tersebut wawasan pengetahuan serta kemampuan profesionalisme aparat pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan perlu ditingkatkan mengingat pengendalian mempunyai implikasi yang besar terhadap kelancaran dan terlaksananya suatu investasi. Aparatur pengendalian tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dan berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah.

Mengingat pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka sangatlah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam usaha menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Denpasar. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menjaga keamanan, menyederhanakan proses perijinan, dan mengembangkan potensi-potensi daerah, dan sebagainya. Dengan mengetahui kondisi riil terhadap pelaksanaan investasi di Kota Denpasar maka dapat dipahami permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan investasi di Kota Denpasar.



Tabel 3.4  
Perkembangan Rencana Investasi PMA Berdasarkan Lokasi  
Periode Tahun 2009 s/d 2012

Kota Denpasar	2010		2011		2012		2013	
	Proyek	Investasi US\$. Ribu	Proyek	Investasi US\$. Ribu	Proyek	Investasi US\$. Ribu	Proyek	Investasi US\$. Ribu
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1	500	1	1.000	3	54.900	5	287,109.1
Industri Tekstil	1	750					1	1,200.0
Industri Mineral Non Logam			1	2.000				
Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan			1	1.300				
Konstruksi	1	2.222	2	3.222				
Jasa Lainnya	22	7.398	21	9.867	22	27.872	14	18,050.0
Hotel dan Restoran	7	77.370	2	3.646	4	5.644	7	12,009,151.4
Industri Makanan	3	2.500	2	1.096	2	1.800	1	1,200.0
Perikanan			1	900				
Perdagangan dan Reparasi	10	7.300	18	8.000	11	17.922	9	11,490.3
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik								
Industri Lainnya	1	556	1	722				
Listrik, Gas dan Air								
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	18.121	2	8.182			-	749.5
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>116.717</b>	<b>52</b>	<b>39.935</b>	<b>42</b>	<b>108.139</b>	<b>37</b>	<b>12,328,950.3</b>

Sumber : BKPM RI

Tabel 3.5  
Perkembangan Rencana Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi  
Periode Tahun 2010 s/d 2013

Kota Denpasar	2010		2011		2012		2013	
	Proyek	Investasi Rp. Juta	Proyek	Investasi Rp. Juta	Proyek	Investasi Rp. Juta	Proyek	Investasi Rp. Juta
Konstruksi	1	46.000						
Jasa Lainnya	4	8.800			1	3.000		
Perikanan			1	10.000				
Perdagangan dan Reparasi					-	3.000	1	94,541.3
Listrik, Gas dan Air								
Industri Makanan	1	51.818						
Hotel dan Restoran	-	8.000					-	11,500.0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran								<b>1,350.0</b>
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>114.618</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>6.000</b>	<b>1</b>	<b>107,391.3</b>

Sumber : BKPM RI

Tabel 3.6  
Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Tahun 2010 s/d 2013

		2010		2011		2012		2013	
		Proyek	Investasi (US\$ Ribu)	Proyek	Investasi (US\$ Ribu)	Proyek	Investasi (US\$ Ribu)	Proyek	Investasi (US\$ Ribu)
Bali	Kota Denpasar	59	7.730	61	20.683,1	18	4.232	107	10,812.8
	<b>Total(Kabkot)</b>	<b>59</b>	<b>7.730</b>	<b>61</b>	<b>20.683,1</b>	<b>18</b>	<b>4.232</b>	<b>107</b>	<b>10,812.8</b>

Sumber : BKPM RI

Tabel 3.7  
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Periode Tahun 2010 s/d 2013

		2010		2011		2012		2013	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Bali	Kota Denpasar	5	61.003,9	5	269,9	5	1.920.423,4	11	1,713,139.9
	<b>Total(Kabkot)</b>	<b>5</b>	<b>61.003,9</b>	<b>5</b>	<b>269,9</b>	<b>5</b>	<b>1.920.423,4</b>	<b>11</b>	<b>1,713,139.9</b>

Dari tabel diatas (tabel 3.6 dan 3.7) yang bersumber dari BKPM RI, perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN di Kota Denpasar mengalami



fluktuasi dari tahun 2009 s/d 2012. Investasi tersebut merupakan investasi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas seperti pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

Pada kurun waktu dari tahun 2011 s/d 2012 realisasi investasi PMA terjadi penurunan sebesar (US\$ Ribu) 16.451,1 atau mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 79,53%. Sedangkan untuk nilai realisasi investasi PMDN di Kota Denpasar dari tahun 2011 s/d 2012 terjadi kenaikan sebesar (Rp Juta) 1.920.153,5 atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 1.920 %. Untuk mendapatkan perhitungan pertumbuhan ekonomi melalui investasi hendaknya data investasi baik PMA/PMDN dengan fasilitas digabungkan dengan data PMDN non fasilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar agar diperoleh data yang signifikan untuk mewakili pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar dipengaruhi oleh banyak faktor dan saling berkaitan satu sama lain, dengan semakin menurunnya investasi asing maka kita harus membangkitkan kembali ekonomi lokal melalui gerakan ekonomi kerakyatan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar.

Begitu pentingnya investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu upaya yang lebih koordinatif dalam penanganannya. Nilai investasi akan meningkat apabila terciptanya iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi investor melalui transparansi regulasi investasi.

### **3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014 dan tahun 2015**

Pemerintah bertekad mengembangkan ekonomi , tetapi untuk merealisasikannya tidak mudah. Pengalaman dari negara lain bahwa membangun basis industri yang kokoh dan mengakar serta mampu mentransformasikan gagasan, yang akan menyentuh benak konsumen sebagai pasarnya merupakan tahapan yang cukup unik. Mulai dari proses seleksi, penguatan kapasitas, pematangan di inkubator, mempertemukan dengan distributor, sampai kepada pemberi modal, dan membangun pasar, semestinya peran ini diambil pemerintah agar berlangsung kesinambungan. Terutama, industri yang berbasis budaya. Sebab, sektor ini yang banyak digeluti UKM dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, keunggulan lain industri berbasis budaya adalah dari kekuatan pasar, yang masih bisa diandalkan untuk bertahan hidup dan tidak melakukan PHK.

Beberapa tantangan Pengembangan Ekonomi : *Pertama*, pengaruh harga minyak global yang semakin tak terkendali dan tidak stabil. Kenaikan ini akan mempengaruhi kinerja industri kreatif, terutama pada meningkatnya harga bahan baku dan ongkos produksi. *Ke-dua*, masih sulitnya pengembangan investasi karena keterbatasan dari pengembangan kota, sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas. *Ke-tiga*, daya saing produk-produk kita yang masih rendah, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini bisa memengaruhi volume produksi dari industri kreatif. Dan ke-empat, terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan yang kompetitif dan berdaya saing

Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam rangka pengembangan ekonomi di diantaranya yaitu:

1. Mengupayakan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, para pelaku industri kreatif, kalangan akademisi dalam sebuah blueprint rencana pengembangan ekonomi kreatif.
2. Sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat media cetak, elektronik maupun online, serta penyelenggaraan seminar dan penerbitan buku-buku.
3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dengan pola pembinaan, pelatihan dan pendampingan langsung, sehingga akan tercipta pelaku bisnis industri kreatif yang memiliki jiwa entrepreneurship.



4. Memfasilitasi pelaku bisnis industri kreatif dengan berbagai kemudahan akses pembiayaan usaha, baik perbankan maupun nonperbankan.
5. Dalam rangka menyikapi dinamika perkembangan ekonomi global pada era industri kreatif, Kota Denpasar memolakan pembangunan dengan empat strategi pokok yang saling mendukung dan saling menguatkan yaitu (1) pemberdayaan lembaga adat, budaya, dan pemahaman agama, (2) penguatan sistem ekonomi kerakyatan, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) keamanan lingkungan yang kondusif.

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi; (2) pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan; (3) pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah; (4) peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi); (5) peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (*sektor riil*) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja); dan (6) peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain: (1) pengelolaan sistem perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pengembangan kegiatan investasi dalam pemanfaatan potensi wilayah; (2) penciptaan paket investasi kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat untuk mendukung peningkatan kegiatan produksi komoditas unggulan, dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat; (3) pengembangan pengelolaan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan potensi wilayah, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, pemasaran produk unggulan daerah, dan pengembangan kawasan dan infrastruktur; dan (4) peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada sasaran sektor dan wilayah, serta kelompok masyarakat.

Prioritas dapat diberikan pada beberapa hal krusial berikut: (1) penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah untuk meningkatkan keseimbangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (2) pelaksanaan strategi pengeluaran keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik, dan sekaligus mendukung perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah; dan (3) meningkatkan penerahan sumber pembiayaan investasi melalui pembentukan semacam dana amanah (*trust fund*) untuk mendukung investasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi



yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. pendapatan
2. belanja dan
3. pembiayaan.

Upaya untuk meningkatkan hasil penerimaan Perusahaan Daerah dan Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah perlu ditingkatkan dengan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Daerah.

Disisi lain, menciptakan iklim investasi yang semakin baik akan mendorong peningkatan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan antara lain yang berasal dari dana bagi hasil bersumber pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Sumber-sumber penerimaan lain yang efektif adalah badan usaha milik daerah memiliki nilai strategis mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi untuk pemerataan dan pengendalian atas sumber-sumber daya yang memiliki daerah kota terhadap warganya, serta bernilai ekonomis karena produk pelayanan yang dihasilkan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan perkotaan saat ini. Jadi optimalisasi perusahaan daerah perlu dilakukan mengingat memberikan penerimaan daerah yang berkelanjutan juga pengelolaan sumber-sumber daya daerah dapat optimal, khususnya Perusahaan Daerah Parkir dan Perusahaan Daerah Pasar.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang bernilai strategis dan ekonomis perlu didorong seperti pembangunan terminal cargo dan fasilitasnya sebagai bentuk investasi baik dikelola sendiri oleh pemerintah maupun dikerjasamakan dengan pihak swasta.

### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

#### 3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Tabel 3.8  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar  
Tahun 2012 s.d tahun 2016

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Tahun Berjalan 2014	Proyeksi/Target pada Tahun 2015	Proyeksi/Target pada Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>511,326,621,036.38</b>	<b>658,974,707,435.78</b>	<b>610,266,592,425.00</b>	<b>652,847,134,203.03</b>	<b>698,677,665,099.38</b>
1.1.1	Pajak daerah	377,247,592,363.38	504,981,564,103.82	468,840,592,125.00	497,605,905,613.03	528,155,498,227.98
1.1.2	Retribusi Daerah	43,772,749,610.00	47,874,288,091.00	44,804,344,000.00	47,716,626,360.00	50,818,207,073.40
1.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan	18,489,906,755.58	20,774,562,997.87	24,815,606,000.00	28,537,946,900.00	32,818,638,935.00



	Daerah yang dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	71,816,372,307.42	85,344,292,243.09	71,806,050,300.00	78,986,655,330.00	86,885,320,863.00
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>655,349,185,469.00</b>	<b>661,103,049,179.00</b>	<b>715,256,133,459.03</b>	<b>690,613,353,459.03</b>	<b>690,613,353,459.03</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak</b>	<b>134,193,389,469.00</b>	<b>72,201,429,179.00</b>	<b>74,651,447,459.03</b>	<b>74,651,447,459.03</b>	<b>74,651,447,459.03</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>133,478,555,323.00</b>	<b>71,412,107,062.00</b>	<b>73,937,095,169.00</b>	<b>73,937,095,169.00</b>	<b>73,937,095,169.00</b>
1.2.1.1.1	Bagi hasil dari Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	59,717,806,326.00	59,425,799,046.00	62,984,368,397.00	62,984,368,397.00	62,984,368,397.00
1.2.1.1.2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan bangunan	73,760,748,997.00	11,986,308,016.00	10,952,726,772.00	10,952,726,772.00	10,952,726,772.00
1.2.1.1.3	Bagi Hasil dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-	-	-
<b>1.2.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>714,834,146.00</b>	<b>789,322,117.00</b>	<b>714,352,290.03</b>	<b>714,352,290.03</b>	<b>714,352,290.03</b>
1.2.2.1.1	Bagi Hasil dari pungutan Hasil Perikanan	343,986,219.00	347,408,873.00	289,738,431.00	289,738,431.00	289,738,431.00
1.2.2.1.1	Bagi hasil cukai Tembakau	370,847,927.00	441,913,244.00	424,613,859.03	424,613,859.03	424,613,859.03
<b>1.2.2</b>	<b>Dana alokasi umum</b>	<b>512,666,446,000.00</b>	<b>580,807,702,000.00</b>	<b>615,961,906,000.00</b>	<b>615,961,906,000.00</b>	<b>615,961,906,000.00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Dana Alokasi khusus</b>	<b>8,489,350,000.00</b>	<b>8,093,918,000.00</b>	<b>24,642,780,000.00</b>	-	-
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>212,373,359,444.00</b>	<b>227,527,456,492.69</b>	<b>141,998,437,360.00</b>	<b>108,135,152,360.00</b>	<b>108,135,152,360.00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Hibah</b>	<b>3,273,528,828.00</b>	<b>1,487,687,126.00</b>	<b>1,636,248,000.00</b>	<b>1,636,248,000.00</b>	<b>1,636,248,000.00</b>
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3,273,528,828.00	1,487,687,126.00	1,636,248,000.00	1,636,248,000.00	1,636,248,000.00
1.3.1.1.1	Pendapatan hibah Kapitasi ASKES	-	-	-	-	-
1.3.1.1.2	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah (Dep.PU WASAP)	-	-	-	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>Dana Darurat</b>	-	-	-	-	-
<b>1.3.3</b>	<b>Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya</b>	<b>105,202,989,383.00</b>	<b>98,076,351,366.69</b>	<b>106,343,904,360.00</b>	<b>106,343,904,360.00</b>	<b>106,343,904,360.00</b>
<b>1.3.3.1</b>	<b>Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>105,202,989,383.00</b>	<b>98,076,351,366.69</b>	<b>106,343,904,360.00</b>	<b>106,343,904,360.00</b>	<b>106,343,904,360.00</b>



1.3.3.1.1	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	71,006,624,739.56	72,012,714,893.02	32,111,031,680.00	32,111,031,680.00	32,111,031,680.00
1.3.3.1.2	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	32,906,466,465.79	25,886,382,093.32	25,971,750,000.00	25,971,750,000.00	25,971,750,000.00
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	48,166,547,680.00	48,166,547,680.00	48,166,547,680.00
	Bagi hasil pajak Air Bawah Tanah	1,193,935,422.58	51,805,890.27	-	-	-
1.3.3.1.3	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	95,962,755.07	125,448,490.08	94,575,000.00	94,575,000.00	94,575,000.00
<b>1.3.4</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>89,705,986,000.00</b>	<b>127,408,208,000.00</b>	<b>22,763,285,000.00</b>	-	-
1.3.4.1.1	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
1.3.4.1.2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	62,958,595,000.00	127,408,208,000.00	-	-	-
1.3.4.1.4	Dana BOS	-	-	-	-	-
	Dana Insentif Daerah	26,747,391,000.00	-	22,763,285,000.00	-	-
1.3.4.1.5	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	-	-	-
<b>1.3.5</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi pemerintah daerah lainnya)</b>	<b>14,190,855,233.00</b>	<b>555,210,000.00</b>	<b>11,255,000,000.00</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>155,000,000.00</b>
1.3.5.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	14,190,855,233.00	555,210,000.00	11,255,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
1.3.5.1.1	Tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa	1,109,700,000.00	-	-	-	-
1.3.5.1.2	Tunjangan penghasilan Bendesa adat	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
1.3.5.1.3	Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka penduduk pendatang pengendalian mobilitas	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
1.3.5.1.4	Bantuan Kepada Sekaa/sanggar dalam rangka Pesta Kesenian Bali	150,000,000.00	160,000,000.00	200,000,000.00	-	-
1.3.5.1.5	Bantuan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Keluarga Kurang Mampu	35,250,000.00	-	-	-	-
1.3.5.1.6	Bantuan Keuangan bersifat Khusus Bidang Pendidikan	12,640,905,233.00	-	10,900,000,000.00	-	-
1.3.5.1.7	Bantuan Keuangan bersifat Khusus Bidang Pendidikan (Pembuatan Lapangan Basket SMP 10)	100,000,000.00	-	-	-	-
1.3.5.1.8	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Monumen Puputan Badung)	-	-	-	-	-



1.3.5.1.9	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Puskesmas)	-	86,385,000.00		-	-
1.3.5.1.10	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Kegiatan Linmas dalam rangka Pemilukada)	-	153,825,000.00		-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1,379,049,165,949.38	1,547,605,213,107.47	1,467,521,163,244.03	1,451,595,640,022.06	1,497,426,170,918.41

Sumber : Bagian Keuangan

### 3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang-undangan.

Tabel 3.9  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah  
Tahun 2012 s.d Tahun 2016

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target	Proyeksi/Target
		2012	2013	2014	pada Tahun 2015	pada Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>700,414,758,839.31</b>	<b>800,951,858,486.99</b>	<b>750,941,456,956.03</b>	<b>846,059,293,378.04</b>	<b>951,168,305,263.34</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	607,158,432,474.82	672,317,362,731.86	626,718,909,480.03	720,726,745,902.04	828,835,757,787.34
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	27,591,357,000.00	58,971,604,952.10	33,616,568,018.00	33,616,568,018.00	33,616,568,018.00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	-	218,635,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	19,187,618,085.00	21,544,000,000.00	21,544,000,000.00	21,544,000,000.00	21,544,000,000.00
2.1.6.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	19,187,618,085.00	21,544,000,000.00	21,544,000,000.00	21,544,000,000.00	21,544,000,000.00
2.1.7	Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota Pemerintah Desa dan partai Politik	46,181,343,279.49	38,776,153,810.84	66,846,979,458.00	66,846,979,458.00	66,846,979,458.00
2.1.7.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	24,994,399,704.49	15,266,881,885.84	42,071,423,783.00	42,071,423,783.00	42,071,423,783.00
2.1.7.1.1	Bantuan Keuangan Untuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)	12,242,727,235.75		27,434,019,408.00	27,434,019,408.00	27,434,019,408.00
2.1.7.1.2	Belanja Bantuan Keuangan PHR kepada Provinsi	12,751,672,468.74	15,266,881,885.84	14,637,404,375.00	14,637,404,375.00	14,637,404,375.00
2.1.7.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan	20,340,499,900.00	22,677,799,800.00	23,929,112,000.00	23,929,112,000.00	23,929,112,000.00
2.1.7.2.1	Bantuan Kepada Kelurahan	20,340,499,900.00	12,766,799,800.00	12,766,800,000.00	12,766,800,000.00	12,766,800,000.00
2.1.7.2.2	Bantuan Kepada Desa Pakraman	-	875,000,000.00	1,225,000,000.00	1,225,000,000.00	1,225,000,000.00



2.1.7.2.3	Bantuan Kepada Banjar adat	-	1,800,000,000.00	2,520,000,000.00	2,520,000,000.00	2,520,000,000.00
2.1.7.2.4	Bantuan Kepada Banjar Dinas	-	2,030,000,000.00	2,961,000,000.00	2,961,000,000.00	2,961,000,000.00
2.1.7.2.5	Bantuan Nafkah Bendesa	-	420,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00
2.1.7.2.6	Tunjangan Penghasilan Kelian Adat	-	2,160,000,000.00	2,592,000,000.00	2,592,000,000.00	2,592,000,000.00
2.1.7.2.7	Bantuan Keuangan Kepada desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan	-	1,100,000,000.00	-	-	-
2.1.7.2.8	Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa / Kelurahan	-	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00
2.1.7.2.9	Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.1.7.2.10	Bantuan Kepada DPD Asosiasi LPM	-	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
2.1.7.2.11	Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Kelurahan Penatih	-	100,000,000.00	-	-	-
	Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum Pengolahan Air Limbah (BLUPAL)			1,204,812,000.00	1,204,812,000.00	1,204,812,000.00
2.1.7.2.12	Bantuan Kepada Desa (Bantuan Kepada Sekaa Teruna Se Kota Denpasar)	-	1,270,500,000.00	-	-	-
2.1.7.5	<b>Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b>	<b>846,443,675.00</b>	<b>831,472,125.00</b>	<b>846,443,675.00</b>	<b>846,443,675.00</b>	<b>846,443,675.00</b>
2.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>296,008,000.00</b>	<b>9,124,101,992.19</b>	<b>1,890,000,000.00</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>-</b>
B	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>700,414,758,839.31</b>	<b>800,951,858,486.99</b>	<b>750,941,456,956.03</b>	<b>846,059,293,378.04</b>	<b>951,168,305,263.34</b>
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>609,115,223,118.24</b>	<b>736,904,284,991.65</b>	<b>801,579,706,288.00</b>	<b>605,536,346,644.03</b>	<b>-</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	50,005,352,300.00	50,422,356,896.00	18,637,751,000.00		-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352,966,157,103.24	432,473,575,504.65	511,682,958,990.00		-
2.2.3	Belanja Modal	206,143,713,715.00	254,008,352,591.00	271,258,996,298.00		-
C	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>609,115,223,118.24</b>	<b>736,904,284,991.65</b>	<b>801,579,706,288.00</b>	<b>605,536,346,644.03</b>	<b>-</b>
D	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,309,529,981,957.55</b>	<b>1,537,856,143,478.64</b>	<b>1,552,521,163,244.03</b>	<b>1,451,595,640,022.06</b>	<b>951,168,305,263.34</b>

Sumber : Bagian Keuangan

### 3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.10  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
Tahun 2012 s.d Tahun 2016

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Tahun Berjalan 2014	Proyeksi/Target pada Tahun 2015	Proyeksi/Target pada Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>205,911,243,706.78</b>	<b>257,796,738,849.61</b>	-	-	-



3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	205,836,243,706.78	257,796,738,849.61	100,000,000,000.00	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberi pinjaman	75,000,000.00	0	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>205,911,243,706.78</b>	<b>257,796,738,849.61</b>	<b>100,000,000,000.00</b>	-	-
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>17,633,688,849.00</b>	<b>45,162,429,564.93</b>	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-			
3.2.2	Penyertaan pokok utang	-	-			
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
3.2.5	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	17,633,688,849.00	45,054,173,324.93	15,000,000,000.00	-	-
	Pembayaran Pokok Hutang	-	108,256,240.00			
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>17,633,688,849.00</b>	<b>45,162,429,564.93</b>	<b>15,000,000,000.00</b>	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>188,277,554,857.78</b>	<b>212,634,309,284.68</b>	<b>85,000,000,000.00</b>	-	-

Sumber : Bagian Keuangan



## **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **4.1.1. Visi**

Visi merupakan wawasan dan cara pandang (*vision du mont*), baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Pada dasarnya di dalam visi telah mengandung misi yang ingin diwujudkan, karena itu misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya sehingga gerak pembangunan berjalan ke arah yang ditetapkan.

Materi Visi, Misi dan Program Pembangunan Kota Denpasar yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar tahun 2010-2015, ini merupakan penyempurnaan dari materi Visi, Misi dan Program yang telah disampaikan pada tahun 2005-2010. Walaupun demikian, apabila mencermati perubahan situasi dan kondisi yang sangat dinamis, maka sebagian besar materi dimaksud telah dikembangkan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009. Akhirnya, Visi, Misi, dan Program Pembangunan Kota Denpasar periode tahun 2010-2015 ini dapat kami susun sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Visi Kota Denpasar tahun 2005-2010, adalah Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya dengan Keharmonisan dalam Keseimbangan secara Berkelanjutan. Visi ini dilandasi oleh tiga pilar pembangunan yang penting yaitu Tri Hita Karana yang merupakan implementasi dari upaya menjaga serta mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan serta lingkungannya secara berkesinambungan.

Ketiga pilar nilai budaya ini patut dijadikan acuan serta pedoman dalam keseluruhan proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian maka secara langsung proses pembangunan Kota Denpasar telah mampu menyentuh keseluruhan elemen dasar dari aspek religi, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup dan kesenian. Atau dapat dikatakan pemerintah Kota Denpasar telah meletakkan dasar yang kuat bagi terciptanya Denpasar sebagai Kota Berwawasan Budaya.

Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar dalam periode 2005-2010 sudah merealisasikan banyak pembangunan baik fisik dan non fisik yang dilaksanakan seperti pelaksanaan industri kreatif dan kota kreatif dapat terwujud secara konkret baik dalam level mikro dan makro. Pada level mikro (banjar dan institusi yang ada didalamnya) maupun level makro (SKPD) telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat Bali umumnya dan khususnya masyarakat Kota Denpasar dalam perkembangan dan dinamika globalisasi, terus menerus dihadapkan pada berbagai persoalan ditengah-tengah kompetisi yang ketat antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan material yang bersifat ekonomis, dengan tuntutan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Adalah sangat sulit untuk meninggalkan salah satu dari kedua aspek di atas. Oleh karenanya upaya yang paling mungkin dilakukan adalah mensinergikan kedua aspek ini untuk kepentingan kemajuan pembangunan di Kota Denpasar. Pemenuhan kebutuhan



material yang bersifat ekonomi sebaiknya dilandasi oleh basis pemahaman agama dan budaya yang baik. Sehingga akan memunculkan manusia-manusia pembangunan yang inovatif dan kreatif dengan basis budaya yang unggul.

Dengan landasan di atas Kota Denpasar, telah melakukan pendalaman terhadap eksistensi sebuah kebudayaan, bahwa sesungguhnya dasar-dasar kebudayaan harus dipahami dengan baik. Dalam pandangan ini kebudayaan dijadikan sebagai sentral ide, kemudian karena stimulus dan motivasi berproses melalui reinterpretasi, reintegrasi dan adaptasi akan memberikan sebuah pemahaman baru tentang suatu hal. Melalui proses inilah antisipasi pengaruh perubahan oleh arus globalisasi akan memperkuat tradisi yang sudah berkembang di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan landasan pokok kebudayaan Bali, bahwa pengayaan kebudayaan mesti dikembangkan dengan basis konvergensi antara tradisi dan modernisasi atau sinergi antara budaya ekspresif yang mengutamakan nilai-nilai spritual, tradisi, estetika dengan budaya progresif yang mengutamakan nilai-nilai ekonomi, teknologi dan sains. Inilah pondasi untuk budaya kreatif yang sangat potensial untuk mengembangkan industri kota kreatif, nilai ekspresif dan progresif inilah merupakan genuinesitas/lokal genius kebudayaan Bali untuk menghadapi modernisasi.

Untuk menguatkan pondasi Denpasar sebagai Kota Kreatif tahun 2010-2015 dan aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggul secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal yang bersifat mendasar : (1) Konsep utuh dan operasional tentang Kota Kreatif, Industri Kreatif dan kebudayaan unggul yang cocok dengan kondisi kontekstual Kota Denpasar sebagai komunitas urban, berjatidiri kebudayaan Bali dan bersifat multikultural; (2) Inventori data dasar (*database*) tentang keberadaan, perkembangan dan persebaran unsur budaya unggulan. Sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan; (3) Kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan unggul dalam habitat urban. Disatu pihak kehidupan urban yang modern dan mengglobal ditengah isu komodifikasi, hegemoni, marginalisasi dan dilain pihak semakin terbukanya aneka peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi dan sains. Dalam aneka pembaharuan bentuk, fungsi dan makna, serta beragam peluang dan tantangan kontekstual, penelitian ilmiah untuk merumuskan konsep kunci kota kreatif dan inventori unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif menjadi amat relevan dan urgen.

Sebuah konsep kota kreatif bercirikan dan mengandung muatan :

1. Membangun Citra dan identitas lokal
2. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan
3. Menciptakan iklim bisnis yang positif
4. Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan
5. Menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan yang kompetitif
6. Memberikan dampak yang positif pada masyarakat.

Keseluruhan aspek di atas dijadikan dasar untuk menggerakkan individu, seniman, budayawan dan komunitas-komunitas kreatif, yang esensinya adalah membangun keseimbangan antara jiwa dan raga, batiniah lahiriah, spritual dan material dari masyarakat secara kreatif menuju keseimbangan dalam perubahan. Dalam hal ini ketiga pilar pembangunan Pemerintah, Swasta dan masyarakat merupakan penyangga utama untuk mewujudkan bangunan Kota Kreatif.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi diatas sudah saatnya visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2010-2015 dipertajam dan dijabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar tahun 2010-2015 dengan mempertimbangkan berbagai bidang pembangunan dan dampak



yang ditimbulkan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, ditetapkan visi sebagai berikut :

**“ DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA  
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN ”**

#### **4.1.2. Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2010-2015**

Misi pembangunan sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Denpasar 2010-2015 adalah:

1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali.
2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*good governance*) melalui Penegakan Supremasi Hukum (*law enforcement*)
4. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (*welfare society*)
5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan.

#### **4.1.3. Tujuan.**

1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali, bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
  - b. Melestarikan dan mengembangkan budaya.
  - c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - d. Meningkatkan sportivitas dan kesegaran jasmani.
  - e. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.
  - f. Mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
  - g. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota.
2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif , bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.
  - b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi lokal.
  - c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok masyarakat, merukunkan umat Bergama dan melindungi masyarakat.
3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*good governance*) melalui Penegakan Supremasi Hukum (*law enforcement*), bertujuan untuk :
  - a. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
  - b. Menicptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - c. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Misi Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (*welfare society*), bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
  - b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.
  - c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social.
  - d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak.
  - e. Menanggulangi kemiskinan.
  - f. Mengatur pos dan telekomunikasi.



- g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga.
  - h. Mencegah dan menanggulangi bencana.
5. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk :
- a. Mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan.
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar perekonomian.
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan sarana sistem perhubungan.
  - d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni
  - e. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
  - f. Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota.
  - g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien
  - h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggul.
  - i. Meningkatkan daya saing industry, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
  - j. Meningkatkan perbaikan iklim ketenaga kerjaan dan perluasan jangkauan transmigrasi

#### **4.1.4.Sasaran**

1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali, mempunyai sasaran sebagai berikut :
  - a) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, peranserta lembaga sosial keagamaan dan terciptanya harmoni sosial yang kondusif.
  - b) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.
  - c) Menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, menurunnya jumlah pecandu narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar.
  - d) Meningkatkan Jumlah orang yang senang berolah raga.
  - e) Mengendalikan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan.
  - f) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  - g) Meningkatkan daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dengan meminimalisasi pencemaran dan membangun taman kota yang nyaman.
2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif mempunyai sasaran sebagai berikut :
  - a. Menciptakan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian
  - c. Mewujudkan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.
  - d. Memangkas prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi.



3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*good governance*) melalui Penegakan Supremasi Hukum (*law enforcement*), mempunyai sasaran sebagai berikut :
  - a. Mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas;
  - b. Menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
  - d. Menjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan di atasnya.
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kearsipan yang profesional.
  - f. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerapan sanksi yang tegas.
  - g. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat
  
3. Misi Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (*welfare society*), mempunyai sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu.
  - b. Meningkatkan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat.
  - c. Meningkatkan kesejahteraan social oleh dan untuk semua kalangan masyarakat berdasarkan tat twam asi.
  - d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, serta perlindungan anak serta meningkatkan peran gender dalam masyarakat.
  - e. Menanggulangi kemiskinan penduduk Kota Denpasar
  - f. Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu.
  - g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga.
  - h. Meningkatkan sosialisasi pencegahan, melaksanakan pengawasan dan koordinasi serta meningkatkan kualitas aparat penanggulangan bencana alam
  
4. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan, mempunyai sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan jumlah dan mutu insane kreatif dan membudayakan pola pikir kreatif .
  - b. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian.
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat.
  - e. Meningkatkan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa.
  - f. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan.
  - g. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan, perikanan dan kelautan.
  - h. Mengembangkan pariwisata sebagai percepatan atau lokomotif pembangunan
  - i. Meningkatkan jumlah investasi dan produksi perdagangan di Kota Denpasar.



- j. Meningkatkan pemerataan kesempatan kerja, kualitas dan perlindungan tenaga kerja serta mengelola transmigrasi

#### 4.1.5. Tema Pembangunan.

Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMD 2010-2015. Adapun langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dengan demikian secara menyeluruh tema RKPD dari tahun 2010 sampai 2015 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1  
Tema RKPD dari tahun 2010 - 2015

2010	•Denpasar Kota Kreatif Berbasis Budaya Unggulan
2011	•Mewujudkan Denpasar Kreatif Melalui Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota
2012	•Dengan Spirit Sewaka Dharma Dan Berfikir, Berkata Dan Berbuat Yang Baik Kita Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik
2013	•Reformasi Birokrasi Berbasis Kearifan Lokal
2014	•Tata Kelola Pemerintahan Inklusif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Budaya Unggul
2015	• <i>Peningkatan</i> Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Guna Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Tema "*Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Guna Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah*" dalam RKPD 2015 dilandasi oleh kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2015 baik secara internal maupun eksternal yang menuntut perlunya penguatan ekonomi nasional.

Pembangunan Kota Denpasar menempatkan budaya sebagai fondasi dasar pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dilaksanakan berorientasi pada kesejahteraan, peradaban dan dinamika dalam konteks lokal, nasional dan global dengan mengedepankan segi-segi positif kebudayaan Bali. Pemerintah Kota Denpasar yang sekaligus adalah Ibukota Provinsi Bali telah mengambil inisiatif dan merespon secara holistik, untuk mengimplementasikan kegiatan industri kreatif dan mewujudkan Denpasar Kota Kreatif berbasis budaya unggulan. Konsep kebudayaan unggul mencakup unsur-unsur budaya, filosofi, nilai, kearifan lokal, heritage, lembaga-lembaga kebudayaan, proses aktivitas budaya dan kesenian yang memiliki karakteristik.

#### 4.2. Prioritas Pembangunan.

Sebagai penjabaran RPJMD 2010-2015 pembangunan Kota Denpasar dalam RKPD 2015 dituangkan ke dalam 13 prioritas pembangunan termasuk didalamnya kemungkinan adanya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD untuk menanggapi situasi terkini dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Selanjutnya 13 prioritas Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik
2. Pendidikan



3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Infrastruktur
6. Kebudayaan
7. Kreativitas dan inovasi
8. Ketahanan Pangan
9. Perekonomian
10. Iklim investasi dan iklim usaha
11. Kesejahteraan rakyat
12. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
13. Politik, hukum, keamanan dan ketertiban



Tabel 4.1.  
Sinergitas keterkaitan prioritas pembangunan

No.	Nasional	Provinsi	Kota Denpasar
1.	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Reformasi birokrasi dan Tata kelola	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2.	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan
3.	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
4.	Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penanggulangan Kemiskinan
5.	Ketahanan Pangan	Pertanian dan Ketahanan pangan	Ketahanan Pangan
6.	Infrastruktur	Infrastruktur Wilayah	Infrastruktur
7.	Iklim investasi dan iklim usaha	Industri kecil, Pariwisata, Investasi. UMKM dan Koperasi	Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8.	Energi		
9.	Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	Lingkungan hidup dan Pengelolaan Bencana	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10.	Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik		
11.	Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi	Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi teknologi	- Kebudayaan - Kreativitas dan Inovasi
12.	Prioritas lainnya di bidang polhukam, perekonomian dan kesra	Ketentraman dan ketertiban, Pengamanan terpadu Berstandar Internasional	- Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban - Perekonomian - Kesejahteraan Rakyat

Tabel 4.2.  
Prioritas Pembangunan 2011 s/d 2015

No	Prioritas Pembangunan				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Ketahanan Pangan	Penanggulanga n Kemiskinan	Perekonomian	Perekonomian
2	Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular	Iklim infestasi dan iklim usaha	Perekonomian	Iklim infestasi dan iklim usaha	Iklim infestasi dan iklim usaha
3	Pelestarian dan pengembangan	Infrastruktur	Lingkungan	Ketahanan	Ketahanan



	budaya, pengelolaan lingkungan hidup		hidup dan pengelolaan bencana	Pangan	Pangan
4	Pemembrdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan investasi	Kesehatan	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan
5	Peningkatan prasarana dan prasarana (infrastruktur) dasar perekonomian	Penanggulangan Kemiskinan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
6		Kesejahteraan rakyat	Iklm infestasi dan iklim usaha	Infrastruktur	Infrastruktur
7	Revitalisasi pertanian, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pariwisata	Kebudayaan	Infrastruktur	Kesejahteraan rakyat	Kesejahteraan rakyat
8	Penegakan hokum dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Perekonomian	Kebudayaan	Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan
9	Peningkatan ekonomi kreatif berbasis budaya unggulan	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik
10		Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	Kesejahteraan rakyat	Kebudayaan	Kebudayaan
11	Kependudukan,pe nanggulangan kemiskinan,penin gkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan social	Pendidikan	Politik, hukum, keamanan dan ketertiban	Politik, hukum, keamanan dan ketertiban	Politik, hukum, keamanan dan ketertiban
12	Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Kreativitas dan inovasi	Kreativitas dan inovasi	Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
13		Politik, hukum, keamanan dan ketertiban	Ketahanan Pangan	Kreativitas dan inovasi	Kreativitas dan inovasi



Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke tiga belas arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung Kota Denpasar sebagai kota budaya sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Denpasar tahun 2010-2015.

Tabel 4.3.  
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

No	Prioritas Pembangunan daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Nama Program		Unit Kerja Penanggungjawab		
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah		
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur			
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
			4	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			
			5	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			
			6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			
			7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan			
			8	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
			1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat		
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran			
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
			4	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara			
			5	Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			
			6	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			
			7	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			
			1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat (Bagian Hukum)		
			2	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
			3	Penataan Peraturan Perundang-undangan			
			1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat (Bag.Aset)		
			2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
			3	Peningkatan Disiplin Aparatur			
			4	Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			
			5	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			
			6	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			
			7	Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah			



		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
		2	Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah	
		3	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
		4	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	
		5	Program Pengembangan sistem informasi pertanahan	
		6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah	
		7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	
		8	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	
		9	Program pembinaan kecamatan dan kelurahan	
		10	Program Pengembangan sistem informasi Laporan Penyelenggaraan emerintahan Daerah (LPPD)	
		1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat (Bag.Kerjasama / Bag. Perekonomian)
		2	Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	
		3	Program kerjasama pembangunan	
		4	Program pengembangan pemasaran pariwisata	
		5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPP
		2	Program Peningkatan sarana dan prasarana	
		3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
		4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	
		5	Program pendidikan kedinasan	
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat (Bag.Humas)
		2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
		3	Program Kerjasama Informasi dengan mes media	
		4	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
		5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah	
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat (Bag Organisasi)
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		5	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	
		6	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	
		7	Program penataan peraturan perundang-undangan	



			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat (Bag.Probang)
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	
			5	Program koordinasi pembangunan daerah	
			6	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat (Bag. Umum)
			2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	
			1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat (Bag.Keuangan)
			2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Set DPRD
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peninkatan disiplin aparatur	
			4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Denut
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri	
			5	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
			6	Upaya Kesehatan Masyarakat	
			7	Program Pelestarian nilai budaya	
			8	Program perencanaan pembangunan daerah	
			9	Penataan Administrasi Kependudukan	
			1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Densel
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri	
			5	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
			6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
			7	Program Pelestarian budaya	



			8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
			9	Program administrasi kependudukan	
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dentim
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri	
			5	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
			6	Program Upaya kesehatan masyarakat	
			7	Program pelestarian nilai budaya	
			8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
			9	Program Administrasi kependudukan	
			1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Denbar
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri	
			5	ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
			6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
			7	Program Pelestarian Nilai Budaya	
			8	Program Perencanaan pembangunan daerah	
			9	Penataan Administrasi Kependudukan	
			1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Pengumpulan Data/Informasi	
			5	Program Kerjasama Pembangunan	
			6	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	
			7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh	
			8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	
			9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
			11	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	
			12	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	
			13	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	
			14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	



		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.	1	Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran,	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,	
			4	Program Peningkatan disiplin aparatur	
			5	Program Pemeliharaan ketenteraman dan pencegahan tindak criminal,	
		Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	1	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Dispenda
			2	Peningkatan sarana dan prasarana	
			3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			4	Peningkatan Disipilin Aparat	
			5	Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar	
			6	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	
		Pos dan Telematika.	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			3	Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur	
			4	Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa	
			5	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	
			6	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	
			7	Program kerjasama informasi dengan mess media	
2	Pendidikan	Peningkatkan Asesibilitas dan Kualitas Pendidikan.	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan
			2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			4	Peningkatan disiplin aparatur	
			5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
			6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
			7	Program Pendidikan Menengah	
			8	Program Pendidikan Non Formal dan informal	
			9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			10	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
			11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
			12	Manajemen Pelayanan Pendidikan	
3	Kesehatan	Peningkatkan Asesibilitas dan Kualitas Kesehatan.	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
			5	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	



			6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
			7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
			8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
			9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
			10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
			11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
			12	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	
			13	Program standarisasi pelayanan kesehatan	
			14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
			15	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	
			16	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
			17	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita	
			18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
			19	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
			20	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	
			1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	RSU.Wangaya
4	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat dan Institusi Lokal.	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan dan BPM
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	
			5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	
			6	Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	
			7	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan	
			8	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	
			9	Program perbaikan gizi masyarakat	
			10	Program peningkatan ketahanan pangan	
			11	Program Penanggulangan Kemiskinan	
		Penanggulangan Kemiskinan.		<b>Pemenuhan Hak Atas Pangan</b>	Bappeda (sekretariat)
			1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
			2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
			3	Program Upaya Kesehatan Perorangan	
			4	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit	
			5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
			6	Program Sumber Daya Kesehatan	
			7	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	
			8	Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	



				<b>Pemenuhan Hak Atas Layanan Pendidikan</b>	
			1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
			2	Program Pendidikan Menengah	
			3	Program Pendidikan Non-Formal	
			4	Program Meningkatkan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				<b>Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Berusaha</b>	
			1	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	
			2	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	
			3	Program Perluasan Kesempatan Kerja Yang Dilakukan Pemerintah	
			4	Program Pendukung Pasar Kerja	
			5	Program Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	
			6	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	
				<b>Pemenuhan Hak Atas Perumahan</b>	
			1	Program Pengembangan Perumahan	
			2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
			3	Program Lingkungan Sehat	
				<b>Pemenuhan Hak Atas Air Bersih</b>	
			1	Program Pengembangan Pengelolaan, Konservasi Sungai, Dan Sumber AirLainnya	
			2	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	
			3	Program Lingkungan Sehat	
				<b>Pemenuhan Hak Atas Tanah</b>	
			1	Program Pengelolaan Pertanahan	
				<b>Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam</b>	
			1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	
			2	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	
			3	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	
			4	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				<b>Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman</b>	
			1	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
			2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	
			3	Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial	
			4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	



			5	Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak	
			6	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	
				<b>Pemenuhan hak Berpartisipasi</b>	
			1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
			2	Program Penataan Peran Negara Dan Masyarakat	
			3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	
				<b>Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender</b>	
			1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	
			2	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan	
			3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
				<b>Revitalisasi Pembangunan Perkotaan</b>	
			1	Program Pengembangan Perkotaan	
			2	Program Penataan Ruang	
			3	Program Pengembangan Permukiman	
			4	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	
			5	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	
			6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	
				<b>Pengembangan Kawasan Pesisir</b>	
			1	Program Pengembangan budidaya Perikanan	
			2	Program Pengembangan perikanan tangkap	
			3	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	
5	Infrastruktur	Peningkatan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Dasar Perekonomian	1	Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas PU
			2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Peningkatan disiplin aparatur	
			5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya	
			6	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
			7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
			1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	DTRP
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
			4	Program Pengembangan Perumahan	
			5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
			6	Program perencanaan tata ruang	
			7	Program pemanfaatan ruang	



			8	Program pengendalian pemanfaatan ruang		
		Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Perhubungan.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas PU	
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
			4	Program Peningkatan disiplin aparatur		
			5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
			6	Program pembangunan jalan lingkungan		
			7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		
			8	Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan		
			9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
			10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
			1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
			4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
			5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan		
			6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
			7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
			8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
			9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		
			10	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		
6	Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat (Bag.Kesra)	
			2	Program Pengembangan nilai budaya		
			3	Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan		
			4	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama		
			5	Program Pengembangan nilai budaya		
			6	Program Pengembangan wawasan kebangsaan		
			7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		
			8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
		Pelestarian dan Pengembangan Budaya		1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kebudayaan
				2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
				3	Program Pengembangan keragaman budaya	
				4	Program Pengembangan nilai budaya	
				5	Program Pengembangan Kekayaan Budaya	
	7	Kreatifitas dan Inovasi	Pengembangan Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya.	1	Program pengembangan industry kecil dan menengah	Dinas Perindustrian
2				Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial		



8	Ketahanan Pangan	Revitalisasi Pertanian.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pertanian  Dinas Peternakan / Bag. Perekonomian	
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		
			4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
			5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		
			6	Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		
			7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		
			8	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		
			9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		
			1	Program Pelayanan administrasi perkantoran		
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
			3	Program Peniongkatan kapasitas sumberdaya aparatur		
			4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak		
			5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		
			6	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		
			7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		
			8	Program pemerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan		
			9	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.		
			10	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan		
			11	Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan		
			12	Program pengembangan budidaya perikanan		
			13	Program pengembangan perikanan tangkap		
			14	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar		
			15	Program pengembangan sistim penyuluh perikanan		
9	Perekonomian	Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	1	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Dinas Pendapatan	
			2	Peningkatan sarana dan prasarana		
			3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
			4	Peningkatan Disipilin Aparat		
			5	Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar		
			Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	1	Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi / Bag. Perekonomian
		2		Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur		
		3		Meningkatkan kualitas aparatur		
		4		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif		
		5		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
		6		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
		7		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		



			8	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	
			9	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
		Meningkatkan Daya Saing Industri.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perindustrian / Bag. Perekonomian
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
			4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
			5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
			6	Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi	
			7	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	
			8	Program penataan struktur industri	
			9	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
			10	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	
			11	Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi	
10	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	Perbaiki Iklim Ketenagakerjaan.	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertransos
			2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja.	
			3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	
			4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	
			5	Program Transmigrasi Lokal	
		Pengembangan Pariwisata.	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pariwisata
			2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
			5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
			6	Program Pengembangan Kemitraan	
		Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor.	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindustrian
			2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
			3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
11	Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Disnakertransos
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
			4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
			5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	
			6	Program Pembinaan anak terlantar	
			7	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	
			8	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	



			9	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	
			10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
			11	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	
			12	Program Peningkatan Kesempatan Kerja.	
			13	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
			14	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	
			15	Program Transmigrasi lokal	
		Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Perlindungan Anak.	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana	
			3	Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur	
			4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	
			5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
			6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
			7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	
			8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
		Pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemuda dan Olah Raga.	1	Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Capil, KB dan PP, Dinas Pendidikan
			2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
			4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
			5	Pelayanan administrasi perkantoran	
			6	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			7	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
			8	Program Keluarga Berencana	
			9	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
			10	Program Pelayanan Kontrasepsi	
			11	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	
			12	Peningkatan penggulungan narkoba.PMS termasuk AIDS	
			13	Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
			14	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan	
			15	Pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU	
			16	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
12	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	BLH
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	
			4	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	
			5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	



			6	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan	
			7	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	
			8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
			9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			10	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	DKP
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
			5	Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan	
			6	Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam	
			7	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.	1	Pelayanan administrasi perkantoran	BPBD
			2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
			4	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	
			5	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	
			6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	
			7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
			8	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	
			9	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
			10	Program tanggap darurat bencana	
			11	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	
13	Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	1	Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Program Peningkatan disiplin aparatur	
			5	Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal	
		Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama dan Perlindungan Terhadap Masyarakat.	1	Program Administrasi Perkantoran	Kesbangpol
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	
			4	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	
			5	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	
			6	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	
			7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
			8	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional	



			9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
			10	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat	
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.	1	Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
			4	Program Peningkatan disiplin aparatur	
			5	Program Pemeliharaan ketenteraman dan pencegahan tindak criminal	



## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan tahun 2015 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 2015 (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat.

Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah.

Tabel 5.1  
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2015

No	Misi	Sasaran Pembangunan 2015	Prioritas Pembangunan 2015
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik ( <i>good governance</i> ) melalui Penegakan Supremasi Hukum ( <i>law enforcement</i> ) (3)	Penegakan hukum dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2.	Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat ( <i>welfare society</i> ) (4)	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	- Pendidikan - Kesehatan
3.	Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat ( <i>welfare society</i> ) (4)	Kependudukan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan sosial	- Penanggulangan Kemiskinan - Kesejahteraan Rakyat
4.	Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan (5)	Peningkatan sarana dan prasarana (infra struktur) dasar perekonomian	- Infrastruktur - Perekonomian
5.	Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan (5)	Peningkatan Ekonomi Kreatif berbasis budaya Unggulan	Kreativitas dan Inovasi
6.	Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan (5)	Revitalisasi pertanian, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pariwisata	- Ketahanan Pangan - Iklim Investasi dan Iklim Usaha
7.	Meningkatkan Pelayanan Publik menuju	Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana



	Kesejahteraan Masyarakat ( <i>welfare society</i> ) (4)	dan peningkatan pemberantasan penyakit menular	
8.	Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. (1)	Pelestarian dan pengembangan budaya, pengelolaan lingkungan hidup	Kebudayaan
9.	Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. (1)	Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Politik, Hukum dan Ketentraman dan Ketertiban
10.	Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan (5)	Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan investasi	

Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang terdapat disuatu daerah yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis. Dalam suatu daerah, termasuk Pemerintah Kota Denpasar penentuan prioritas pembangunan daerah ini merupakan suatu yang penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani segala urusan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan di atas, merupakan hasil sinergisme, sinkronisasi dan pengintegrasian dengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dimaksud mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke tiga belas arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung percepatan pembangunan ekonomi kreatif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran diarahkan melalui sinergi kegiatan dari beberapa sektor terkait yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan. Adapun pada nama program dan kegiatan pada RPJMD Kota Denpasar tahun 2010 – 2015 mengalami beberapa penyesuaian dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang penyempurnaan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari 13 prioritas pembangunan Kota Denpasar yang telah disinkronisasikan dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi. Maka tahun 2015 bobot prioritas diutamakan pada infrastruktur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

No	Prioritas Pembangunan daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Nama Program	Pagu Indikatif tahun 2015 dalam RPJM	Pagu Indikatif musrenbang tahun 2015	Indikator Capaian	SKPD Penanggung jawab



1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,658	0.695	1. Berkurangn ya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas; 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahann yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	0,364	0.648			
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,161	0.119			
			4	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	0,689	0.267			
			5	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	0,817	0.628			
			6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	0,932	1.911			
			7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	0,128	0.089			
			8	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,889	1.852			
			1	Program pelayanan administrasi perkantoran	0,943	0.722			Inspektorat
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	0,751	0.555			
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,373	0.363			
			4	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	0.219				
			5	Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	0.700	1.041			
			6	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	0,122	0.087			
			7	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	0,165	0.055			
			1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,121	0.082			(Sekretariat) Bag.Hukum
			2	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,263	0.319			
			3	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,755	1.782			
			1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,266	4.626			(Sekretariat) Bag.Aset
			2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,006	2.301			
			3	Peningkatan Disiplin Aparatur	10,794	12.019			
			4	Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0,534	0.185			
			5	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0,167	0.247			
			6	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	0,098	0.017			
			7	Peningkatan Manajemen asset/barang Daerah	0,169				



			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,116	0.272	(Sekretariat) Bag. Pemerintahan
			2	Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah	0,067	0	
			3	Program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah	0.126	0.230	
			4	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	1,536	0.030	
			5	Program Pengembangan sistem informasi pertanahan	0.780	0.097	
			6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah	0,147	0.135	
			7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1,609	1.125	
			8	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	0,249	0	
			9	Program pembinaan kecamatan dan kelurahan	0.640	0.157	
			10	Program Pengembangan sistem informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD)	0.780		
			1	Program pelayanan administrasi perkantoran	0,274	0.365	(Sekretariat) Bag. Kerjasama / Bag. Perekonomian
			2	Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	0,548	0.291	
			3	Program kerjasama pembangunan	0,466	0.274	
			4	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,645	0.940	
			5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	0,219		
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.213	1,823	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	2,675	1,741	
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,6746	0.790	
			4	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0.824	-	
			5	Program Kerjasama Informasi dengan Mess Media	0.892	0,929	
			6	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	0,319	0,687	
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,693	1.516	BKPP
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana	0,603	0.682	
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2,852	6.450	
			4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	6.763	0.634	
			5	Program pendidikan kedinasan	2,852	1.937	
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,510	2.264	(Sekretariat) Bag. Humas
			2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,099	0.043	



		3	Program Kerjasama Informasi dengan mes media	2,084	2.849		
		4	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	0,483	0.431		
		5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah	2,413	2.310		
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,263	0.329		(Sekretariat) Bag Organisasi
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0,132	0.198		
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,263			
		4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	0,631	0.028		
		5	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	0,263	0.146		
		6	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	1,678	0.208		
		7	Program penataan peraturan perundang-undangan	0,066			
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,258	0.200		(Sekretariat) Bag.Proban g
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	0.270	0.745		
		3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.199			
		4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	0,197	0.814		
		5	Program koordinasi pembangunan daerah	0,197	0.150		
		6	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	0.180	0.240		
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,605	5.393		(Sekretariat) Bag. Umum
		2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5,165	5.140		
		3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,642			
		4	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	0,013			
		1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	0,165	0.742		(Sekretariat) Bag.Keuan gan
		2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,861	1.836		
		1	Program pelayanan administrasi perkantoran	4,995	3.874		(Sekretariat) DPRD
		2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,614	2.433		
		3	Program peninkatan disiplin aparatur	0,451	0.252		
		4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,213	0.122		



			5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	25,754	24.004	
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.636	3.224	Kec. Denut
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.205	0.448	
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.451	0.667	
			4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri	0,099	0.057	
			5	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0,137	0.126	
			6	Upaya Kesehatan Masyarakat	0.060	0.113	
			7	Program Pelestarian nilai budaya	0,159	0.203	
			8	Program perencanaan pembangunan daerah	0,060	0.023	
			9	Penataan Administrasi Kependudukan	0.346	0.099	
			1	Program pelayanan administrasi perkantoran	3,729	3.283	Kec. Densel
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,395	1.093	
			3	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.040	0.716	
			4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	0,768	0.098	
			5	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0,247	0.155	
			6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.060	0.174	
			7	Program Pelestarian budaya	0,373	0.467	
			8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0,049	0.031	
			9	Program administrasi kependudukan	0.525	0.142	
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.800	3.035	Kec. Dentim
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	1.331	0.600	
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.705	0.650	
			4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri	0,099	0.070	
			5	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0,208	0.190	
			6	Program Upaya kesehatan masyarakat	0.060	0.257	
			7	Program pelestarian nilai budaya	0,285	0.485	
			8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0,088	0.030	
			9	Program Administrasi kependudukan	0.346	0.095	
			1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	4,058	2.941	Kec. Denbar
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,356	0.524	
			3	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.040	0.662	



		4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri	0,099	0.067	3. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Denpasar			
		5	ProgramPemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0,296	0.163				
		6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.060	0.093				
		7	Program Pelestarian Nilai Budaya	0,313	0.213				
		8	Program Perencanaan pembangunan daerah	0,044	0.025				
		9	Penataan Administrasi Kependudukan	0.742	0.225				
		1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,675	1.102			4. Peningkatan pendapatan daerah dari sumber penerimaan potensi lainnya	Bappeda
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	0,938	0.938				
		3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,098	0.150				
		4	Pengumpulan Data/Informasi	0,082	0.366				
		5	Program Kerjasama Pembangunan	0,011	0.553				
		6	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	-					
		7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh	0,132	1.205				
		8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	2,139	0.525				
		9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,013	0.213				
		10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,590	1.193				
		11	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	0,395	0.555				
		12	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	0,247	1.181				
		13	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	0,307	0.210				
		14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	0,336	0.408				
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.	1	Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran,	3,236	1.303	5. Meningkatkan kapasitas serta kemampuan	Kesatuan Polisi Pamong Praja		
		2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4,080	1.264				
		3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,	0,022	0.309				
		4	Program Peningkatan disiplin aparatur	0,614	0.445				
		5	Program Pemeliharaan ketenteraman dan pencegahan tindak kriminal,	0,601	0.380				
	Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	1	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	0,178	3.278	5. Meningkatkan kapasitas serta kemampuan	Dispenda		
		2	Peningkatan sarana dan prasarana	1,759	3.472				
		3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,055	1.301				



			4	Peningkatan Disiplin Aparat	1,650	0.146	masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif	Dinas Komunikasi dan Informatika
			5	Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar	0,035			
			6	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		6.397		
	Pos dan Telematika.	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,865	2.206			
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,987	2.233			
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,132	0.030			
		4	Program Pengembangan komunikasi. informasi dan media masa	1,569	9.595			
		5	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	0,351	0.500			
		6	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	0,132				
		7	Program kerjasama informasi dengan mess media	0,132	1.602			
2	Pendidikan	Peningkatkan Asesibilitas dan Kualitas Pendidikan.	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,464	6.315	1. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan pembangunan 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan
			2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,600	3.408		
			3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,026	0.695		
			4	Peningkatan disiplin aparatur	0,601			
			5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0,195	0.462		
			6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21,937	86.685		
			7	Program Pendidikan Menengah	5,824	12.146		
			8	Program Pendidikan Non Formal dan informal	0,329	1.015		
			9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,711	2.503		
			10	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,083	0.047		
			11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3,356	5.866		
			12	Manajemen Pelayanan Pendidikan	0,088			
3	Kesehatan	Peningkatkan Asesibilitas dan Kualitas Kesehatan.	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,539	7.961	1. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,675	8.750		
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,247	0.370		
			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,285	-		
			5	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1,404	1.828		



			6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0,768	0.709		
			7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2,194			
			8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	13,162	14.820		
			9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	0,175	0.294		
			10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7,130	2.614		
			11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	0,165	0.111		
			12	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	0,208	0.350		
			13	Program standarisasi pelayanan kesehatan	0,367	0.636		
			14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	0,013	0.070		
			15	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	0,466	0.360		
			16	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1.240	6.890		
			17	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak dan balita	0,066	0.273		
			18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	0,384	0.460		
			19	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	0,132	0.327		
			20	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	0.165	0.375		
			1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	82,322	73.909		RSU.Wang aya
4	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat dan Institusi Lokal.	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,790	0.88	1. menurunkan a jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhin ya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap	BPM
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,709	0.57		
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,046	0.05		
			4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	0,779	0.57		
			5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1,430	0.90		
			6	Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	0,211	2.09		
			7	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan	2,312	2.22		
			8	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	0,279			
			9	Program perbaikan gizi masyarakat	0,410	0.33		
			10	Program peningkatan ketahanan pangan	1,974	0.89		
			11	Program Penanggulangan Kemiskinan	1,459	0.45		
		Penanggulangan Kemiskinan.		<b>Pemenuhan Hak Atas Pangan</b>				Bappeda (sekretariat)



			1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
			2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
			3	Program Upaya Kesehatan Perorangan				
			4	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit				
			5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
			6	Program Sumber Daya Kesehatan				
			7	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				
			8	Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan				
				<b>Pemenuhan Hak Atas Layanan Pendidikan</b>				
			1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
			2	Program Pendidikan Menengah				
			3	Program Pendidikan Non-Formal				
			4	Program Meningkatkan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				
				<b>Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Berusaha</b>				
			1	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja				
			2	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				
			3	Program Perluasan Kesempatan Kerja Yang Dilakukan Pemerintah				
			4	Program Pendukung Pasar Kerja				
			5	Program Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah				
			6	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro				
				<b>Pemenuhan Hak Atas Perumahan</b>				
			1	Program Pengembangan Perumahan				
			2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				
			3	Program Lingkungan Sehat				
				<b>Pemenuhan Hak Atas Air Bersih</b>				
			1	Program Pengembangan Pengelolaan, Konservasi Sungai, Dan Sumber AirLainnya				
			2	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku				
			3	Program Lingkungan Sehat				
				<b>Pemenuhan Hak Atas Tanah</b>				
			1	Program Pengelolaan Pertanahan				





				Pemerintah Daerah						
				<b>Pengembangan Kawasan Pesisir</b>						
			1	Program Pengembangan budidaya Perikanan						
			2	Program Pengembangan perikanan tangkap						
			3	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan						
5	Infrastruktur	Peningkatan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Dasar Perekonomian	1	Pelayanan administrasi perkantoran	2.332	4.570			1. Peningkatan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Dasar Perekonomian	Dinas PU
			2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.692	6.213				
			3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.547	0.100				
			4	Peningkatan disiplin aparatur	0.212					
			5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan jaringan Pengairan lainnya	5,185	6.683			2. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Perhubungan	
			6	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	0,027					
			7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	21.366	15.065				
			1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	0,888	1.768				DTRP
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,779	1.444				
			3	Program Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0,055	0.150				
			4	Program Pengembangan Perumahan	0,671	2.232				
			5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	0,671	0.406				
			6	Program perencanaan tata ruang	1,211	0.099				
			7	Program pemanfaatan ruang	19,733	60.380				
			8	Program pengendalian pemanfaatan ruang	0,656	0.510				
		Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Perhubungan.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	2,468	4.449				Dinas PU
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.287	5.544				
			3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.426	0.100				
			4	Program Peningkatan disiplin aparatur	0.426					
			5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	44.445	274.844				
			6	Program pembangunan jalan lingkungan	1.778					
			7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	8.929	30.750				
			8	Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan	0.372	0.300				
			9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.070	5.625				
			10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.138					



			1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,259	15.261		Dinas Perhubungan
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,645	3.696		
			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,219	0.170		
			4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2,382			
			5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	0,952	11.335		
			6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	14,861	165.112		
			7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	0,367			
			8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1,975	2.443		
			9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	3,806	3.624		
			10	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2,273			
6	Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,239	0.204	1.Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bag.Kesra
			2	Program Pengembangan nilai budaya	3,139	1.269		
			3	Program Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan	0,175	0	2.Pelestarian dan Pengembangan Budaya	
			4	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	0,285	0		
			5	Program Pengembangan nilai budaya	3,753	6.097		
			6	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	0,521	1.256		
			7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	0,932	0.690		
			8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0,167			
		Pelestarian dan Pengembangan Budaya	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	0,655	1.145		Dinas Kebudayaan
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,286	1.817		
			3	Program Pengelolaan keragaman budaya	2,450	3.432		
			4	Program Pengembangan nilai budaya	2,776	6.897		
			5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3,328	6.497		
7	Kreatifitas dan Inovasi	Pengembangan Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya.	1	Program pengembangan industry kecil dan menengah	1,419	0.954	5.2.1. Pengembangan Kota Kreatif Berbasis Budaya Unggulan	Dinas Perindustrian
			2	Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial	0,099	0.038		
8	Ketahanan Pangan	Revitalisasi Pertanian.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1,053	1.017	1. Revitalisasi Pertanian	Dinas Pertanian
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,877	0.641		
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0,075	0.030		



			4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	0,111	0.190		
			5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	3,378	1.211		
			6	Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	0,302	0.322		
			7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	0,654	0.675		
			8	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	0,167	0.270		
			9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	0,233	0.143		
			1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1,080	1.009		
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.001	1.120		Dinas Peternakan / Bag. Perekonomian
			3	Program Penionggkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0,044	0.030		
			4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	0,768	0.544		
			5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	0.700	0.757		
			6	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	0,356	0.389		
			7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	0,488	0.772		
			8	Program pemerdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan	0.159	0		
			9	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.	0,044	0.110		
			10	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	0.070	0		
			11	Program Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	0.050	0.185		
			12	Program pengembangan budidaya perikanan	0,285	0.429		
			13	Program pengembangan perikanan tangkap	0.140	1.149		
			14	Program pengembangan kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar	0,132	0.030		
			15	Program pengembangan sistim penyuluh perikanan	0,023	0.015		
9	Perekonomian	Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	1	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	0,178	3.278	1. Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan
			2	Peningkatan sarana dan prasarana	1,759	3.472		
			3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,055	1.301		
			4	Peningkatan Disiplin Aparat	1,650	0.146		
			5	Pemberian Surat Keterangan Pajak Rampung (SKPR) dan Surat Peringatan (SP) yang melanggar	0,035	-	2. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	



			6	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-	6.397	3. Meningkatkan Daya Saing Industri	Dinas Koperasi / Bag. Perekonomian	
	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.		1	Pelayanan administrasi perkantoran	0,263	0.808			
			2	Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur	0,175	0.384			
			3	Meningkatkan kualitas aparatur	0,033	0.060			
			4	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	0,326	0.368			
			5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	0,381	0.437			
			6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0,494	1.075			
			7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	0,713	0.681			
			8	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	0,384	0.066			
			9	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	0,987	0.721			
	Meningkatkan Daya Saing Industri.		1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	0,836	1.052		Dinas Perindustrian / Bag. Perekonomian	
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,524	0.654			
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0,171	0.100			
			4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3,488	1.672			
			5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	9,543	1.515			
			6	Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi	0,233	0.537			
			7	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	2,018	3.864			
			8	Program penataan struktur industri	0,110	0.046			
			9	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2,249	0.620			
			10	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	0,338	0.198			
			11	Peningkatan promosi dan kerja sama investasi	0,768	0.725			
10	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,139	0.766	1. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja. 2. Pengembangan Pariwisata. 3. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor.	Disnakertransos	
				2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja.	1,380			0.910
				3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	0,935			0.749
				4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0,599			
				5	Program Transmigrasi Lokal	0,178			
			Pengembangan Pariwisata.	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,016	0.924	Dinas Pariwisata	
		2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,707	0.582			



			3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,033	0.078	4. Meningkatkan Iklim Investasi.		
			4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3,675	1.797			
			5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,178	2.294			
			6	Program Pengembangan Kemitraan	0,537	0.410			
		Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor.	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2,249	0.620			Dinas Perindustrian
			2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	9,543	1.672			
			3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	9,543	1.515			
11	Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1,109	0.858	1. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. 2. Peningkatan Kualitas hidup dan Peran Perempuan serta Perlindungan Anak. 3. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera serta Pemuda dan Olah Raga.	Disnakertransos	
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,986	0.594			
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0,013	0.143			
			4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0,824	2.604			
			5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	0,607	0.288			
			6	Program Pembinaan anak terlantar	0,135				
			7	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	0,758	0.887			
			8	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	0,053				
			9	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	0,065				
			10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2,815	2.520			
			11	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1,060	0.766			
			12	Program Peningkatan Kesempatan Kerja.	1,265	0.910			
			13	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	0,871	0.749			
			14	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0,511				
			15	Program Transmigrasi lokal	0,159				
		Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Perlindungan Anak.	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,220	1.112		Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	
			2	Program Peningkatan sarana dan prasarana	2,150	0.900			
			3	Program Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur	0,584	0.150			
			4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0,286	0.247			
			5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	0,915	1.005			



				dan Anak				
			6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0,731	0.390		
			7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	0,180	0.143		
			8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	0,065	0.054		
		Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil ,Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemuda dan Olah Raga.	1	Pelayanan administrasi perkantoran	0,768	1.382		Dinas Capil, KB dan PP, Dinas Pendidikan
			2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,274	731		
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0,274	0.350		
			4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,225	4.317		
			5	Pelayanan administrasi perkantoran	0.757	1.674		
			6	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0.539	0.731		
			7	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0.217	0.350		
			8	Program Keluarga Berencana	0,081	0.375		
			9	Program Keesehatan Reproduksi Remaja	0,163	0.225		
			10	Program Pelayanan Kontrasepsi	0,454	0.260		
			11	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	0,073	0.068		
			12	Peningkatan penggulungan narkoba.PMS termasuk AIDS	0,030	0.033		
			13	Pengembangan bahan informasi tentang pengapusan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0,597	0.342		
			14	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan	0,186	0.250		
			15	Pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU	0,071	0.060		
			16	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	0,760	0.722		
12	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	0.768	0.905	1.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.	BLH
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0.768	0.446		
			3	Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	0.285	0.237		
			4	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	0.658	0.198		
			5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	2.139	0.820	2.Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota.	
			6	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan	0.603	0.536		
			7	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2.797	1.742	3.Penataan Ruang Kota yang Nyaman dan	



			8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.179	1.384	Terkendali. 4.Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.		
			9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.797	0.938			
			10	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.442	3.368			
		Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	19.603	34.632		DKP	
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0.222	1.278			
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.055	0.050			
			4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	26.895	46.772			
			5	Program pengembangan dan pengelolaan pertamanan	22.244	29.914			
			6	Program perlindungan dan konversi Sumber Daya Alam	0.182	0.250			
			7	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	0.419	0.454			
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.	1	Pelayanan administrasi perkantoran	2.194	4.365	BPBD		
			2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0.987	1.568			
			3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	0.439	0.300			
			4	Program pembangunan saluran draenase/ gorong-gorong	0.439	0.737			
			5	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	0.439	0.844			
			6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0.439	2.857			
			7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	5.484	3.527			
			8	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	0.329	0.410			
			9	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	0.329	0.413			
			10	Program tanggap darurat bencana	3.291	1.861			
			11	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1.645	1.461			
13	Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	1	Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	3.236	1.303	1.Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban. 2.Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat, Kerukunan Umat	Kesatuan Polisi Pamong Praja	
			2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.080	1.264			
			3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.022	0.309			
			4	Program Peningkatan disiplin aparatur	0.614	0.445			
			5	Program Pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak criminal	0.601	0.380			



Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama dan Perlindungan Terhadap Masyarakat.	1	Program Administrasi Perkantoran	0.401	0.808	Beragama dan Perlindungan Terhadap Masyarakat.	Kesbangpol
	2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0.285	0.688		
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	0.088	0.080		
	4	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	0.568	1.172		
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	0.132			
	6	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	1.736	1.016		
	7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.141	0.161		
	8	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional	0.137	0.495		
	9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	0.203	0.387		
	10	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat	0.121	0.272		
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.	1	Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	3.236	1.303	Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	
	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.080	1.264		
	3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.022	0.309		
	4	Program Peningkatan disiplin aparatur	0.614	0.445		
	5	Program Pemeliharaan ketenteraman dan pencegahan tindak criminal	0.601	0.380		

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan, sehingga dipandang perlu untuk lebih mengarahkan melalui sub prioritas (fokus) pembangunan, yang akan memperjelas hubungan antara sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan, ke tiga belas arah prioritas pembangunan yang dipergunakan mendukung Kota Denpasar sebagai kota budaya sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Denpasar tahun 2010-2015.

## 5.1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

### A. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

#### Sasaran

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2010–2015 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;



4. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan di atasnya.

### **Arah Kebijakan**

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah 2010–2015 diarahkan untuk:

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara:
  - a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;
  - b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
  - d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;
  - e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
  - f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui:
  - a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
  - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
  - c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
  - d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
  - e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan:
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
  - b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;
  - c. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

### **B. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.**

#### **Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 5 tahun kedepan adalah :

- a. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Denpasar
- b. Menurunnya pelanggaran hukum khususnya pelanggaran Peraturan Daerah untuk menciptakan rasa aman masyarakat.

### **Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maka kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah 2010–



2015 diarahkan untuk menerapkan sistem monitoring yang lebih intensif terhadap berbagai aktivitas fisik masyarakat dengan meningkatkan peran perangkat desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat secara umum guna membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi secara lebih awal dan peningkatan koordinasi dengan unsur pimpinan daerah lainnya (Muspida) sehinggasecara lebih dini dapat dicegah terjadinya pelanggaran.

### **C. Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.**

#### **Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai dalam Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah dari sumber penerimaan potensi lainnya, yaitu :
  - a. Hasil penerimaan dari iklan dan reklame
  - b. Hasil Perusahaan daerah (PD.Pasar, PD. Parkir dan PDAM, BLU Rumah Sakit Wangaya)
  - c. Rumah Potong Hewan
  - d. Retribusi Rumah Sewa/Kos, dan lain-lain
2. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

#### **Arah Kebijakan**

Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik yang dilaksanakan melalui kebijakan: Meningkatkan pemasukan atau pendapatan asli daerah melalui perusahaan daerah yang dikelola di bawah pemerintah daerah.

### **D. Pos dan Telematika.**

#### **Sasaran.**

Sasaran umum yang hendak dicapai dalam pembangunan pos dan telematika dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien, yaitu yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika;
3. Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.

#### **Arah Kebijakan**

Sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan setiap subsektor, dilakukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan laju pembangunan infrastruktur informasi pos, telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran dengan tetap menciptakan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan pengguna jasa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien. Pada penyelenggaraan pos dan penyiaran, pemerintah masih mempunyai fungsi operasi sehingga masih dibutuhkan investasi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik; sedangkan pada penyelenggaraan telekomunikasi, pemerintah tidak lagi berperan dalam aspek operasi. Dalam pembangunan fisik telekomunikasi, pemerintah lebih bersifat sebagai fasilitator.

Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan lima tahun mendatang, arah kebijakan yang ditempuh adalah:



1. Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika. Penyediaan infrastruktur pos dan telematika yang memadai sangat diperlukan untuk memperkecil kesenjangan digital. Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumber pembiayaan, secara langsung telah membatasi kemampuan pembangunan. Oleh karena itu akan ditempuh langkah-langkah peningkatan efisiensi baik dalam pemanfaatan infrastruktur yang ada maupun pembangunan infrastruktur baru, seperti optimasi pemanfaatan infrastruktur non-telekomunikasi yang berpotensi untuk digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan pemakaian bersama suatu infrastruktur oleh beberapa penyelenggara (*resource sharing*). Dengan adanya efisiensi investasi melalui *resource sharing* diharapkan para penyelenggara dapat menggunakan hasil penghematan investasi untuk memperluas jaringan akses lokal (*last mile*) atau pengembangan layanan lain. Dengan bertambahnya kapasitas infrastruktur, trafik diharapkan akan lebih mudah dibangkitkan dan pada saat yang sama industri aplikasi juga dapat berkembang.
2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Selain itu, pengembangan serta pemanfaatan materi (*content*) dan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga penting karena informasi yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan infrastruktur merupakan alat untuk mendapatkan informasi.  
Cepatnya perkembangan teknologi membutuhkan investasi baru yang dapat membebani masyarakat dengan adanya berbagai biaya tambahan akibat perubahan teknologi. Dalam upaya pengembangan berbagai aplikasi yang padat teknologi, pemerintah akan meningkatkan kemampuan industri dalam melakukan adopsi dan adaptasi teknologi serta sekaligus menjaga keutuhan sistem yang telah ada sesuai dengan standar dan kualitas tertentu. Selain itu pemerintah akan memperkuat kemampuan industri nasional dan mempersiapkan perangkat peraturan yang dapat mendorong pemanfaatan aplikasi telematika secara luas. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang dibutuhkan industri.

## 5.2. Pendidikan

### A. Peningkatkan Asesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Sasaran

Sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2010 adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Secara lebih rinci sasaran pembangunan pendidikan antara lain ditandai oleh:

1. Meningkatkan taraf pendidikan penduduk melalui:
  - 1) Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan:
    - a. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB, MI dan paket A.
    - b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB, dan paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B.
    - c. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A.
    - d. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A



- e. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS)
- 2) Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan:
  - a. Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C).
  - b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah;
  - c. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah;
- 3) Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK;
- 4) Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
- 5) Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;
- 6) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Meningkatnya kualitas pendidikan ditandai dengan:

- a. Tersedianya standar pelayanan minimal pendidikan ;
- b. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar;
- c. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik;
- d. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan;
- e. Meningkatnya minat baca;
- 2. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan pembangunan yang antara lain diukur dengan:
  - a. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
  - b. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
- 3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan
  - a. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah;
  - b. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
  - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
  - d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan.

### **Arah Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas akan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi hak dasar warga negara. Untuk itu upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD termasuk



SDLB, MI dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B serta upaya menurunkan angka putus sekolah harus dioptimalkan;

2. Menjaga agar penduduk tetap terbebas dari buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (*relapse illiteracy*), dan menciptakan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
4. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
5. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
6. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, serta masyarakat penyandang cacat;
7. Menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang terkena bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar;
8. Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
9. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan untuk semua kepada seluruh kelompok masyarakat serta pelaksanaan advokasi bagi pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
10. Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik;
11. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
12. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan hidup;



13. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar;
14. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran;
15. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan;
16. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan ;
17. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;
18. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
19. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (student-based financing) dan peningkatan anggaran pendidikan secara bertahap hingga mencapai 20 persen dari APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
20. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu.

### **5.3. Kesehatan**

#### **A. Peningkatkan Asesibilitas dan Kualitas Kesehatan.**

##### **Sasaran**

Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2010-2015 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin dari indikator dampak (*impact*) yaitu:

1. Meningkatnya umur harapan hidup;
2. Menurunnya angka kematian bayi ;
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita

##### **Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada :

1. Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;



3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin;
4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
5. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan
6. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

#### **5.4. Penanggulangan Kemiskinan**

##### **A. Pemberdayaan Masyarakat dan Institusi Lokal.**

###### **Sasaran**

1. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan institusi lokal dalam pembangunan
2. Penguatan eksistensi institusi lokal baik dari sisi kelembagaan maupun sisi pembiayaan
3. Menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif
4. Mengoptimalkan pengembangan nilai-nilai budaya luhur secara berkelanjutan
5. Mengembangkan penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan
6. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

###### **Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan ketahanan budaya lokal sebagai upaya untuk menangkal pengaruh negatif dari budaya asing dan berupaya meningkatkan apresiasi masyarakat dalam pengembangan budaya
3. Mempertahankan keberadaan organisasi kesenian di masing-masing Desa atau Banjar
4. Mengembangkan organisasi kesenian di masing-masing Desa atau Banjar
5. Mengendalikan peralihan fungsi lahan secara berlebihan

##### **B. Penanggulangan Kemiskinan.**

###### **Sasaran**

Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:

1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan;
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau;
3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;
4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;
5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;
7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;
8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;
9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;
10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan;
11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.



## **Arah Kebijakan**

Untuk merespon permasalahan pokok dan sasaran di atas, maka arah kebijakan yang diperlukan meliputi :

### **1. Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Dasar**

#### **1) Pemenuhan Hak atas Pangan**

Pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga;
- c. Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi;
- d. Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan;
- e. Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor;
- f. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan; dan
- g. Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

#### **2) Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan**

Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat;
- c. Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan masyarakat miskin;
- d. Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan;
- e. Meningkatkan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin;
- f. Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki;
- g. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi;
- h. Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah/swasta dalam pelayanan.

#### **3) Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan**

Pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu serta tanpa diskriminasi gender dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur formal atau non formal termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B serta lulusan SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B;



- b. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD termasuk SDLB dan MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (*relapse illiteracy*), dan menciptakan masyarakat belajar;
- c. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
- d. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermatapencaharian yang diperlukan oleh masyarakat miskin;
- e. Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin; dan
- f. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

#### 4) Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Usaha

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis;
- b. Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha;
- d. Melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan keamanan kerja;
- e. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan Koperasi;
- f. Mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.

#### 5) Pemenuhan Hak atas Perumahan

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan:

- a. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat;

#### 6) Pemenuhan Hak atas Air Bersih

Peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersih dan aman, serta pengembangan sarana sanitasi dasar yang berpihak pada masyarakat miskin;



- c. Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke air minum yang bersih dan aman, serta sanitasi;
- d. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin;
- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar;
- f. Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman, serta sanitasi dasar bagi masyarakat miskin dan di tempat lembaga publik;

7) Pemenuhan Hak atas Tanah

Upaya menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas tanah dilakukan dengan:

- a. Pengembangan sistem informasi pertanahan yang transparan
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat;
- c. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah

8) Pemenuhan Hak atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- c. Mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan

9) Pemenuhan Hak atas Rasa Aman

Upaya memenuhi hak atas rasa aman dan perlindungan dari gangguan keamanan dan konflik bagi masyarakat miskin dilakukan dengan:

- a. Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini;
- b. Mengembangkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah perdagangan anak dan perempuan secara universal;
- c. Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Indonesia di seluruh wilayah RI;
- d. Mengembangkan sistem perlindungan sosial para pekerja anak dan anak jalanan, dan korban konflik;
- e. Mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan;
- f. Memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan;
- g. Memulihkan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca konflik;
- h. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, mencegah dan menangani persoalan pasca konflik; dan
- i. Meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja anak dan anak jalanan.



#### 10) Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi

Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan;
- b. Meningkatkan peranserta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin baik laki-laki dan perempuan.

#### 2. Kebijakan Pengembangan Wilayah Untuk Mendukung Pemenuhan Hak Dasar

##### 1) Revitalisasi Pembangunan Perkotaan

Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

- a. Penyediaan tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin;
- b. Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat;
- c. Penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha;
- d. Pengembangan forum lintas pelaku; serta
- e. Peningkatan akses masyarakat kota terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan.

##### 2) Pengembangan Kawasan Pesisir

Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan kecil;
- b. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan;
- c. Peningkatan dalam pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan kelautan; serta
- d. Peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan serta pengamanan sumberdaya kelautan dan pesisir dari pencurian dan perusakan.

### 5.5. Infrastruktur

#### A. Peningkatan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Dasar Perekonomian.

##### 1. Sumber Daya Air.

###### Sasaran

1. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan;
2. Terkendalinya potensi konflik air;
3. Terkendalinya pemanfaatan air tanah;
4. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;
5. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan;
6. Terkendalinya pencemaran air;
7. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut;
8. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat;
9. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi;
10. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan;
11. Tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses; dan



12. Pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan.

### **Arah Kebijakan**

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Pada masa lalu fokus pembangunan lebih ditujukan pada pendayagunaan. Kedepan upaya konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selain itu, pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan.

Pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Untuk itu, pemanfaatan air tanah akan dibatasi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara finansial mempunyai prospek menguntungkan. Upaya yang terlalu menitik bertakan pada sisi penyediaan (*supply*) terbukti kurang efisien dan efektif dalam rangka memecahkan masalah pengelolaan sumber daya air. Untuk itu, upaya tersebut perlu disertai dengan upaya melakukan rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui *demand management*.

Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air adalah hal yang sangat perlu dilakukan karena penting dan tak-tergantikannya fungsi vegetatif dalam konteks lingkungan. Namun disadari bahwa hasil dari upaya vegetatif tersebut bersifat jangka panjang. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan upaya vegetatif perlu diimbangi upaya-upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan, yang lebih bersifat *quick yielding*. Upaya konservasi sumber-sumber air dilakukan tidak hanya untuk melestarikan kuantitas air, tapi juga diarahkan untuk memelihara kualitas air. Selain itu, upaya konservasi air tanah terus akan ditingkatkan dengan pengisian kembali (*recharging*), pembuatan sumur resapan, atau dengan aplikasi teknologi lain yang tersedia dan layak. Untuk melindungi sumber daya air dan bencana banjir, maka perlu dilakukan pengamanan daerah aliran sungai.

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Untuk mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, akan dikembangkan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia mempertahankan lahan sawahnya.

Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat. Sesuai data 2010, ada 12 titik banjir di Kota Denpasar yaitu : Jalan Pura Demak Denpasar Barat ketinggian air mencapai 1,5 meter, Banjar Buana Santi, Denpasar Barat, Jalan Kebo Iwa Gang Citarum Denpasar Barat, Jalan Gunung Talang air mencapai ketinggian 1 meter, SD No, 11 dan SD No.



13 Padangsembian, Denpasar Barat air mencapai ketinggian 1 meter, Jalan Gunung Agung Denpasar Barat (sebelah jembatan Tukad Mati) air mencapai ketinggian 1,5 meter, Perumahan Gunung Sari Denpasar Barat air mencapai ketinggian 1 meter, Jalan Mahendradata Gang Manggis Denpasar Barat air mencapai ketinggian 1,5 meter, Perumahan Monang Maning Denpasar Barat air mencapai ketinggian 1 meter, Jalan Buana Raya Denpasar, air mencapai ketinggian 1 meter, Jalan Puduk Denpasar ketinggian air 1 meter, Jalan Gunung Gede Denpasar air mencapai 1 meter.

Peran modal sosial dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting, terutama dalam hal mendorong rasa memiliki masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur. Pengembangan modal sosial akan dilakukan dengan pendekatan budaya, terutama untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*) yang secara tradisi banyak tersebar di masyarakat Indonesia.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air perlu didukung dengan ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu, penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Potensi pemerintah daerah, pengelola, dan pemakai sumber daya air perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin.

## **2. Perumahan dan Permukiman.**

### **Sasaran**

Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara untuk memiliki rumah maka sasaran umum pembangunan perumahan adalah pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang *market friendly*, efisien, dan akuntabel.

Bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terbatas kemampuannya, maka sasaran umum yang harus dicapai adalah terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai kepastian dalam hal ketersediaan setiap tahun. Sasaran lain yang juga hendak dicapai adalah terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat.

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan yang akan dikembangkan untuk mencapai sasaran sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat;
2. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat;
3. Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan (*income generating*) dalam rangka upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja;
4. Menciptakan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran;
5. Mengembangkan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada semua tingkatan pemerintahan serta fasilitasi



- pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif;
6. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung;
  7. Menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure);
  8. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan.

## **B. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Perhubungan.**

### **1. Prasarana Jalan.**

#### **Sasaran**

Sasaran umum pembangunan prasarana jalan adalah :

1. Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan;
2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi;
3. Terwujudnya partisipasi aktif pemerintah maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi ;

#### **Arah Kebijakan**

Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.

1. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.
2. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
3. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.

### **2. Lalu Lintas Angkutan Jalan.**

#### **Sasaran**

Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya;

1. Meningkatkan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ;
2. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan;
3. Meningkatkan keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa;
4. Meningkatkan keterjangkauan pelayanan transportasi umum;
5. Meningkatkan efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan;



7. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.
8. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat.

### **Arah Kebijakan**

Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.

1. Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan).
2. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu
3. Penataan sistem jaringan dan terminal;
4. Peningkatan manajemen lalu lintas;
5. Pemasangan fasilitas dan rambu jalan;
6. Penegakan hukum dan disiplin di jalan;
7. Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek;
8. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil.
9. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan;
10. Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.
11. Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat;

## **5.6. Kebudayaan**

### **A. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.**

#### **Sasaran**

Sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pemahaman ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya;
3. Peningkatan peranserta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan;
4. Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai.

### **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama;
2. Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama,



## **B. Pelestarian dan Pengembangan Budaya**

### **Sasaran**

Sasaran Pelestarian dan pengembangan budaya adalah:

1. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
2. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

### **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan kebudayaan adalah:

1. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya;
2. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan social untuk memperkuat identitas nasional.

## **C. Peningkatan Partisipasi Masyarakat.**

### **Sasaran**

1. Penciptaan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian
3. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.
4. Pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi
5. Meningkatkan investasi secara bertahap

### **Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan pola pendampingan yang berkaitan dengan kegiatan swadaya masyarakat
2. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai (start up) maupun tahapan operasi suatu bisnis.
3. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum.
4. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama di dalam pengembangan (formalisasi) dan operasionalisasi usaha di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi) dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan.

## **5.7. Kreatifitas dan Inovasi**

### **A. Pengembangan Kota Kreatif Berbasis Budaya Unggulan.**

#### **Sasaran.**

1. Insan Kreatif dengan pola pikir dan moodset kreatif.
2. Industri yang unggul di pasar dalam dan luar negeri, dengan peran dominan wirausahawan lokal.
3. Teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat.
4. Pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri dibidang ekonomi.
5. Masyarakat yang menghargai HKI dan mengkonsumsi produk kreatif lokal.
6. Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri dibidang ekonomi kreatif sebagai industri yang menarik.



### **Arah Kebijakan.**

1. Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif yang berkualitas secara berkesinambungan dan tersebar merata di seluruh wilayah.
2. Peningkatan jumlah dan perbaikan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.
3. Peningkatan penghargaan kepada insan kreatif oleh pemerintah daerah.
4. Peningkatan jumlah wirausahawan kreatif sebagai lokomotif industri dibidang ekonomi kreatif.
5. Penciptaan database dan jejaring insan kreatif di dalam maupun diluar negeri.
6. Peningkatan daya tarik industri dibidang ekonomi kreatif.
7. Peningkatan efisiensi serta produktivitas industri untuk meningkatkan keunggulan komparatif.
8. Peningkatan inovasi bermuatan lokal, untuk menciptakan keunggulan kompetitif.
9. Pembentukan basis-basis teknologi pendukung industri dibidang ekonomi kreatif menuju kluster teknologi.
10. Penguatan kapasitas penguasaan teknologi dan kemampuan pemanfaatan komputer dibidang ekonomi kreatif.
11. Penguatan iklim usaha kondusif bagi investasi teknologi pendukung ekonomi kreatif.
12. Peningkatan kemampuan SDM untuk memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam.
13. Peningkatan apresiasi dan promosi sadar lingkungan pada industri dibidang ekonomi kreatif yang menggunakan bahan baku alam.
14. Pembentukan basis-basis teknologi penghasil bahan baku pendukung industri di bidang ekonomi kreatif.
15. Penciptaan iklim kondusif untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri dibidang ekonomi kreatif.
16. Penciptaan penghargaan terhadap HKI dan sosialisasi pentingnya HKI.
17. Peningkatan apresiasi terhadap budaya bangsa dan kearifan lokal.
18. Peningkatan kesadaran dan penghargaan dunia internasional terhadap produk kreatif Indonesia dan Daerah.
19. Penciptaan masyarakat kreatif yang saling menghargai dan saling bertukar pengetahuan demi kuatnya industri nasional dibidang ekonomi kreatif.

## **5.8. Ketahanan Pangan**

### **A. Revitalisasi Pertanian.**

#### **Sasaran**

Sasaran akhir dari Revitalisasi Pertanian adalah meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sasaran antara adalah:

1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi.
2. Terjaganya tingkat produksi beras
3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri.
5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan.
6. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.



7. Meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab.

#### **Arah Kebijakan.**

Revitalisasi pertanian ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk:

1. Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.
2. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif, membangun delivery system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
3. Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian.

Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk:

1. Mempertahankan tingkat produksi beras dalam negeri dengan ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, agar kemandirian pangan nasional dapat diamankan.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
3. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan, untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif.

Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk:

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: (1) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; (2) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; (3) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, terutama di wilayah ZEEI; (4) pengembangan perikanan samudera dan bioteknologi perikanan; (5) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; (6) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; (7) percepatan peningkatan produk perikanan budidaya; (8) peningkatan kemampuan SDM, penyuluh, dan pendamping perikanan; dan (9) perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi dan pengembangan peraturan perundangan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada; (10) peningkatan kemampuan dan pengetahuan petani ternak; (11) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan penyuluhan peternakan; (12) melaksanakan penanganan wilayah terhadap kasus penyakit zoonosis; (13) mengembangkan teknologi tepat guna usaha peternakan.
2. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan



dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah.

3. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
4. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.

## **5.9. Perekonomian**

### **A. Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.**

#### **Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai dalam Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah dari sumber penerimaan potensi lainnya, yaitu :
  - a. Hasil penerimaan dari iklan dan reklame
  - b. Hasil Perusahaan daerah (PD.Pasar, PD. Parkir dan PDAM, BLU Rumah Sakit Wangaya)
  - c. Rumah Potong Hewan
  - d. Retribusi Rumah Sewa/Kos, dan lain-lain
2. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

#### **Arah Kebijakan**

Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pemerintahan daerah yang baik yang dilaksanakan melalui kebijakan: Meningkatkan pemasukan atau pendapatan asli daerah melalui perusahaan daerah yang dikelola di bawah pemerintah daerah.

### **B. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

#### **Sasaran.**

Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Dengan perspektif peran seperti itu, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya produktivitas UMKM;
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah;
4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan



5. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LPD)

### **Arah Kebijakan.**

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan *gender* terutama untuk:
  - a. Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;
  - b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;
  - c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan :
  - a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi;
  - b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
  - c. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
  - d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
6. Membangun Lembaga Keuangan Mikro (LPD) yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk membenahi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LPD)



### C. Meningkatkan Daya Saing Industri.

#### Sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan daya saing industri adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.
2. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor.
3. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan.
4. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri sebagai faktor penguat daya saing.

#### Arah Kebijakan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat makro, upaya peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (*necessary condition*) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing industri manufaktur yang ingin diwujudkan. Hal tersebut perlu dicerminkan di dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha secara sehat. Oleh karena itu, perbaikan iklim usaha di segala mata-rantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.
2. Dalam lima tahun mendatang pengembangan sektor industri manufaktur perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan kata lain, pola pengembangannya perlu lebih banyak ditekankan pada pendalaman (*deepening*) daripada perluasan (*widening*). Dengan demikian, semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (*multiplier*) di masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan. Dalam kaitan itu, kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi ini perlu ditingkatkan melalui antara lain pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor.
3. Intervensi langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik diarahkan pada hal-hal dimana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung. Dalam tataran ini, aspek tersebut meliputi antara lain: (1) pengembangan litbang (*R & D*) untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi, termasuk pada pengembangan manajemen produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan (*clean production*); (2) peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; (3) layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar



negeri; (4) sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk;

## **5.10. Iklim Investasi dan Iklim Usaha**

### **A. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja.**

#### **Sasaran.**

Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka

#### **Arah Kebijakan.**

Kondisi ketenaga kerjaan Indonesia secara umum menunjukkan adanya perbaikan dengan meningkatnya angkatan kerja dari 315.100 orang pada tahun 2005 menjadi 342.738 pada tahun 2009. Sebagian besar angkatan kerja pada tahun 2009 berpendidikan SMU sebesar 31, 27 %. Ini menunjukkan adanya peningkatan angkatan kerja yang berpendidikan SMU yang pada tahun 2008 sebesar 28.53%. Peningkatan angkatan kerja tidak diikuti dengan peningkatan lowongan pekerjaan yang ada. Hal ini terlihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2009 sebesar 5.323 orang sedangkan lowongan kerja yang ada sekitar 1,525 lowongan sehingga masih banyak pencari kerja yang menganggur. Tingkat pengangguran tahun 2009 di Kota Denpasar pada bulan Agustus 2009 sebesar 5,2% meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 4.4. %. Permasalahan lain yang dihadapi dalam bidang ketenaga kerjaan antara lain : rendahnya kualitas tenaga kerja, rendahnya perluasan kesempatan kerja, belum kondusifnya hubungan industrial sehingga kebijakan ketenaga kerjaan diarahkan kepada :

- a. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri.
- b. Penetapan kopetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja
- c. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif dalam melaksanakan hubungan industrial yang harmonis
- d. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenaga kerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan penegakan hukum.

Sedangkan kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.
3. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.
4. Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal.
5. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja.



## **B. Pengembangan Pariwisata.**

### **Sasaran**

Sasaran pengembangan pariwisata adalah

1. Meningkatnya jumlah wisatawan yang menginap di Kota Denpasar
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kota Denpasar.

### **Arah Kebijakan.**

Arah kebijakan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan fokus pada upaya:

1. Peningkatan promosi pariwisata
2. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata unggulan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas sarana dan pelayanan kepariwisataan

## **C. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor.**

### **Sasaran.**

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan perdagangan dalam negeri dan ekspor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk yang diproduksi di Kota Denpasar.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis.

### **Arah Kebijakan.**

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi peningkatan perdagangan dalam negeri dan ekspor adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung perkuatan daya saing produk ekspor, arah kebijakan bidang perdagangan luar negeri adalah meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Aspeknya meliputi:
  - a. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.
  - b. Peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari dominasi bahan mentah (sektor primer) ke dominasi barang setengah jadi dan barang jadi.
  - c. Perkuatan kapasitas pelatihan eksportir kecil;
  - d. Peningkatan jenis dan kualitas pelayanan ekspor melalui konsep support at company level kepada para eksportir dan calon eksportir UKM potensial;
  - e. Optimalisasi implementasi berbagai bentuk kerjasama perdagangan seperti skema imbal dagang dan perdagangan bebas antar negara (*free trade agreement*);
2. Di bidang perdagangan dalam negeri, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha. Upaya ini perlu diintegrasikan dengan arah kebijakan peningkatan kinerja perdagangan luar negeri guna mewujudkan ketahanan ekonomi yang kokoh. Langkah-langkahnya mencakup:
  - a. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan;
  - b. Perkuatan kelembagaan perdagangan yaitu kelembagaan perlindungan konsumen, kemetrologian, bursa berjangka komoditi, dan kelembagaan persaingan usaha, dan kelembagaan perdagangan lainnya;



- c. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi
- d. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa.

#### **D. Meningkatkan Iklim Investasi.**

##### **Sasaran.**

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor non-migas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi. Reformasi dimaksud mencakup upaya untuk menuntaskan sinkronisasi sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan
2. Pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkat efisiensi
3. Meningkatnya investasi secara bertahap

##### **Arah Kebijakan.**

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai (*start up*) maupun tahapan operasi suatu bisnis. Inti dari kegiatan ini adalah penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur perijinan dan pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksanaannya. Upaya ini akan bermanfaat dalam menekan sekecil-kecilnya *barier to entries* terutama UKM. Langkah yang dapat ditempuh adalah melalui: Menata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata pemerintahan yang baik. Keinginan politik (*political will*) dan komitmen yang kuat akan sangat mempengaruhi keberhasilan upaya ini. Revitalisasi pelaksanaan dan penegakan semua peraturan serta perundangan sebagaimana digariskan di dalam Inpres Nomor 5 tahun 2003 (*White Paper*) dapat menjadi titik awal untuk penyelenggaraan kegiatan ini.
2. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (*property rights*), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (*dispute settlements*) terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkuatan implementasi persaingan usaha, perkuatan implementasi standarisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen.
3. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama di dalam pengembangan (*formalisasi*) dan operasionalisasi usaha di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (*simplifikasi*) dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan.

### **5.11. Kesejahteraan Rakyat**

#### **A. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial**

##### **Sasaran**

Sasaran perlindungan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar;
2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional;
6. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial;
7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial; dan
8. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

### **Arah Kebijakan**

Guna mencapai sasaran di atas, arah kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang memperhatikan keserasian kebijakan nasional dan daerah serta kesetaraan gender, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
4. Mengembangkan dan menyeraskan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa;
6. Mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional;
7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
8. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; dan
9. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

## **B. Peningkatan Kualitas hidup dan Peran Perempuan serta Perlindungan Anak.**

### **Sasaran**

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2010–2015 dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak adalah:

1. Terjaminnya keadilan gender dalam program pembangunan, dan kebijakan publik;
2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

### **Arah Kebijakan**

Dengan adanya kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarkal) dan sekaligus bersifat struktural (dimainkan oleh tatanan sosial politik yang ada) tersebut, maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu,



diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
5. Meningkatkan perlindungan anak; dan
6. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

### **C. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera serta Pemuda dan Olah Raga.**

#### **Sasaran**

Untuk mencapai sasaran pembangunan kependudukan dan catatan sipil dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olahraga dalam lima tahun mendatang, disusun tiga sasaran pokok sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditandai dengan:

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan;
2. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien;
3. Meningkatnya peserta KB Pria;
4. Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun;
5. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (*unmet need*);
6. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
7. Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif;
8. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Sasaran kedua adalah:

1. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
2. Pembinaan Sistem Administrasi dan Informasi Kependudukan (SIAM) sebagai kelanjutan dari Program Sistem Informasi dan Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang nantinya akan diterapkan secara nasional;
3. Memantapkan pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Meningkatnya pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sasaran ketiga adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat daerah;
3. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga;



4. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

### **Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pemuda dan olahraga, maka disusun tiga arah kebijakan untuk mencapai ketiga sasaran tersebut di atas, sebagai berikut;

*Pertama*, Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil bahagia dan sejahtera maka kebijakan diarahkan untuk merevitalisasi program KB serta mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan :

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat atau obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat atau obat kontrasepsi dan meningkatnya pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dan meningkatnya kemandirian ber-KB serta meningkatnya pendapatan keluarga khususnya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

*Kedua*, kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan untuk menata pembangunan kependudukan melalui:

1. Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk.

*Ketiga*, kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui:

1. Mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan;
2. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
3. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
4. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan;
5. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;



6. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
9. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
10. Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga;
11. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

## **5.12. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana**

### **A. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.**

#### **Sasaran**

Saran Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah:

1. Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi tanah di wilayah daratan dengan ekosistem pesisir dan laut;
2. Meningkatnya kualitas udara perkotaan khususnya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan;
3. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020 (*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan*);
4. Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan;
5. Terwujudnya pelayanan air limbah dan pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah serta berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja;
6. Terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer;
7. Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;
8. Tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, dan tsunami, serta bencana-bencana alam lainnya;
9. Tersusunnya aturan pendanaan-lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi rendahnya pembiayaan sektor lingkungan hidup;
10. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah:

1. Mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;



4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;
6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan
7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
8. Pemenuhan hak masyarakat atas sanitasi.
9. Mempersiapkan sumber daya manusia pengelola pelayanan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

## **B. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota**

### **Sasaran**

Sasaran Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota adalah:

1. Meningkatkan Kebersihan dan Keindahan Kota untuk mendukung daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata.

### **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan kebijakan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.
4. Memperindah wajah kota dengan peningkatan pemeliharaan dan penataan taman kota.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
6. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota;

## **C. Penataan Ruang Kota yang Nyaman dan Terkendali**

### **Sasaran**

Sasaran Penataan Ruang Kota Denpasar yang Nyaman dan Terkendali adalah:

1. Terkendalinya pemanfaatan ruang;
2. Mencegah terjadinya pelanggaran Terkait Tata Ruang dan Bangunan.

### **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Penataan Ruang Kota Denpasar yang Nyaman dan Terkendali adalah: Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antar fungsi

## **D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.**

### **Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Mencegah terjadinya bencana;
2. Penanganan pasca bencana;
3. Mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh bencana



### **Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Denpasar, ditempuh dengan langkah-langkah sebagaiberikut : melaksanakan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana; meningkatkan pengawasan teknis keamanan dan keselamatan gedung; meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan bencana; melengkapi sarana-prasarana pencegahan penanggulangan bencana.

### **5.13. Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban**

#### **A. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban**

##### **Sasaran**

Sasaran dari Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya angka pelanggaran hukum untuk menciptakan rasa aman masyarakat;
2. Mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan
3. Menurunnya jumlah pecandu narkoba;
4. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.
5. Meningkatkan rasa aman untuk mengkonsumsi barang dan jasa kepada masyarakat dan mencegah isu negatif akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat mengganggu stabilitas kepariwisataan

##### **Arah Kebijakan**

Sasaran tersebut dicapai dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh meliputi:

1. Penanggulangan dan pencegahan konflik komunal berlatar belakang etnik, ras, dan agama
2. Penanggulangan dan pencegahan gangguan Kamtibmas
3. Pencegahan kasus akibat mengkonsumsi barang dan jasa
4. Melakukan upaya sinergis komprehensif untuk menurunkan angka kecanduan narkoba.

#### **B. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama dan Perlindungan Terhadap Masyarakat**

##### **Sasaran**

1. Terpeliharanya situasi aman dan damai;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan
3. Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling mengormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai

##### **Arah Kebijakan**

1. Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial, sebagai bagian penting dari upaya membangun masyarakat sipil yang kokoh;



2. Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.
3. Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi.
4. Meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama

Sedangkan untuk mengetahui secara lebih rinci tentang implementasi dari program prioritas pembangunan daerah dapat diketahui pada **lampiran II : Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2015 Kota Denpasar.**



## BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2015 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD Kota Denpasar Tahun 2015 ini juga merupakan Penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2015 mengambil tema “*Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Guna Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah*”. Dari tema tersebut terdapat 13 (tiga belas) Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2015. Pemilihan prioritas tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar kedepan, tidak cukup hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah saja, tapi perlu melibatkan pilar-pilar pembangunan yang lain, seperti peran swasta/dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan diharapkan bisa memperkuat ketahanan ekonomi dan daya saing daerah.

Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dijadikan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2015 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita – cita Pembangunan Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan dapat tercapai

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

